

MODUL
PELATIHAN BAGI PARA PELATIH
(TRAINING OF TRAINERS)
Penguatan Moderasi Beragama
Kementerian Agama Republik Indonesia
(DRAF#3)

Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama
2021

Judul: Modul Pelatihan Bagi Para Pelatih (Training of Trainers) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia

Penyusun:

Ahmad Zainul Hamdi
Alamsyah M Dja'far
Alissa Wahid
Marzuki Wahid
Nurmey Nurulhaq

Editor: Alamsyah M Dja'far

Penyelia Aksara:

Halaman :

Tahun : 2021

Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama 2021

Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI.

Kantor: Gedung Kementerian Agama

Lt. 3 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Jakarta 10710

Phone: (+1) 1234 56789

Fax: (+1) 12 3456 78910

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR.....	27
BAB III KEMAMPUAN FASILITATOR/TRAINER.....	31
BAB IV UDAR ASUMSI MEMBANGUN PERSPEKTIF	35
BAB V SKETSA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA.....	47
BAB VI ANALISIS SOSIAL DENGAN PERANGKAT ANALISIS GUNUNG ES	80
BAB VII NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM AGAMA.....	95
BAB VIII KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENAG RI	109
BAB IX WAWASAN KEBANGSAAN	120
BAB X SIKAP DIRI ASN KEMENAG RI	132
BAB XI EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA.....	138
BAB XII STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA: <i>RETHINKING, REDESIGNING, REFRAMING, REACTING</i>	144
BAB XIII MEMBANGUN GERAKAN: KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN	150
BAB XIV PRAKTIK MICRO TEACHING.....	156
BAB XV REFLEKSI, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI	161
BAB XVI MENEGUHKAN KOMITMEN PENGERAK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA.....	169
MODUL TAMBAHAN.....	171
BAB XVII MEMBANGUN GERAKAN: TIM DAN JARINGAN	171
BAB XVIII MEMBANGUN GERAKAN : BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK.....	179
REFERENSI	190
LAMPIRAN.....	193
LAMPIRAN MATERI 1 LEMBAR EVALUASI PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA	193
LAMPIRAN 2 LEMBAR UJI PRA DAN PASCAPELATIHAN (<i>PRE AND POST-TEST</i>) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan tingkat kebinaaan yang tinggi. Kebinaaan ini menjadi identitas penting keindonesiaan. Mengingkari kebinaaan bangsa Indonesia berarti mengingkari Indonesia itu sendiri. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah suku dan sub suku di Indonesia mencapai 1.331 suku. Pada 2013, jumlah ini diklasifikasi oleh BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) menjadi 633 kelompok suku besar. Adapun terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada 2017 memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya.¹

Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari kebinaaan ini. Dengan kesadaran kebinaaan yang tinggi, Pancasila akhirnya disepakati sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang mengikat seluruh komponen bangsa yang beragam. Semangat persatuan dan kesatuan dalam kebinaaan tertuang dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Realitas kebinaaan bangsa Indonesia menjadi kebanggaan bersama dan diyakini sebagai salah satu modal penting dalam pembangunan nasional. Sekalipun demikian, kebinaaan itu juga menyimpan potensi yang –jika tidak dikelola dengan baik—destruktif dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kerukunan dan toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia selama ini menjadi perhatian banyak kalangan dan membuat mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang berhasil mempertahankan kemajemukan dan menghindarkan dari konflik sosial keagamaan.²

Sayangnya, dewasa ini kita sedang menghadapi situasi kehidupan sosial-keagamaan yang memiliki daya destruksi terhadap kebinaaan bangsa.

¹ Lukman Hakim Saifuddin, “Prolog,” *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 2-3.

² Nurcholish Madjid, “Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience,” *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994); Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2001); Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); K.A. Steenbrink, “The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions,” *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998); D.E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London; New York: Routledge, 2002); B.F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis* (New York: Peter Lang, 2006); Irwan Abdullah, “Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13; Parsudi Suparlan, “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan?,” *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003); Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009); Farid Masdar Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010).

Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang kita hadapi saat ini: (1) berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang berkelindan dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik; (2) berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan; dan (3) berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.

Tantangan pertama berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki kelompok tertentu.

Pada 2012, CSIS melakukan survei nasional. Dari 1.200 total responden, ditemukan bahwa 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya.³ Data-data di atas menunjukkan betapa kuatnya sikap keberagamaan eksklusif, sebuah sikap keberagamaan yang dibangun di atas hilangnya kepercayaan kepada kelompok lain, yang jika dibiarkan akan berujung pada tindakan penyingkiran kepada kelompok lain yang berbeda.

Tantangan kedua berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama. Pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif pada akhirnya melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang menghancurkan dan mematikan.⁴ Setidaknya, sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah.

Pada 2002, meledak bom Bali yang menewaskan 202 orang.⁵ Peristiwa ini disusul dengan pengeboman Hotel J.W. Marriot Jakarta, dengan korban 11 orang meninggal dan 152 mengalami luka serius (2003).⁶ Pada 2004, 5 orang

³ Kompas, "Toleransi Jadi Tantangan," Kompas.com, 2012,
<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/03234293/toleransi.jadi.tantangan?page=all>.

⁴ Rizal Sukma, "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution", dalam Kusuma Snitwongse dan W. Scott Thompson (eds.), *Ethnic Conflict in Southeast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), 1.

⁵ K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003); B. Singh, "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No.1 (2004): 47-68; J. Magouirk, S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16; B. West, "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353; F. Galamas, "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215; A.S. Zora, "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

⁶ G.S. Oak, "Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.

meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka berat karena ledakan bom di Kedutaan Besar Australia Jakarta.⁷ Setahun kemudian, bom terbesar kedua meluluh-lantakkan Kuta Bali dan menewaskan sekurang-kurangnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang.⁸ Pada 2009, sepasang bom diledakkan di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, dengan korban 7 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka.⁹

Peristiwa terus terjadi. Pada 14 Januari 2016, salah satu jaringan ISIS di Indonesia meledakkan bom di Jalan Thamrin Jakarta dan mengakibatkan hilangnya nyawa 8 orang.¹⁰ Pada 2018, terjadi pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKJ Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Markas Polrestabes Surabaya di tahun 2018.¹¹

Pada akhirnya, di depan ideologi keagamaan yang tertutup, dipenuhi kebencian dan kekerasan ini, Indonesia dipertaruhkan. Inilah **tantangan ketiga**, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Di sinilah, kita menemukan ideologi khilafah dijajakan sebagai alternatif pengganti NKRI.

Pada Oktober 2010-Januari 2011, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) melakukan survei kepada siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Jabodetabek. Hasilnya: 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan; 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam; 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom.¹²

⁷ M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.

⁸ M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)."

⁹ Rizal Sukma, J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, "The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?," *Journal of Human Security*, Vol. 7, No. 1 (2001): 21; M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)."

¹⁰ A. Fenton dan D. Price, "ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks," *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26; Y.P. Suratman, "The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156; H.F. Sundoko, R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo, "Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia," in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* (Singapore: Springer, 2018), h. 33-56; Gary van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London; New York: Routledge, 2007).

¹¹ I.A. Irawan, "Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018," kumparan.com 17 Mei 2018, <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018> (Diakses 7 Juni 2019).

¹² BBC, "Survei: hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal," www.bbc.com, 2011, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.

Pada 2016, Jaringan GUSDURian melakukan pemetaan sosial media dan internet, di mana hasilnya adalah narasi keislaman dan keindonesiaan didominasi oleh pandangan keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi dan Indonesia dianggap sebagai musuh bagi Islam.¹³ Karena demokrasi dan Indonesia dianggap sebagai musuh Islam, maka ideologi yang harus dipeluk umat Islam adalah ideologi khilafah.

Di tahun yang sama, Wahid Foundation melakukan survei kepada para siswa SLTA aktivis Unit Kerohanian Islam (Rohis), di mana 37 % sangat setuju dan 41 % setuju Indonesia menjadi khilafah Islam.¹⁴

Pada tahun 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Convey Indonesia melakukan survei tentang intoleransi dan terorisme di kalangan guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Penelitian tersebut melibatkan 1.859 siswa dan mahasiswa, serta 322 guru dan dosen di 34 provinsi dan 68 kota di Indonesia.¹⁵ Penelitian tersebut menunjukkan, 86% siswa dan mahasiswa, dan 87.89% guru dan dosen yang menjadi responden setuju pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok keagamaan minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.¹⁶ Dari seluruh responden, 91.23% di antaranya setuju bahwa syariat Islam harus diterapkan pada level negara, 37.71% setuju bahwa jihad bermakna “*qitâl*” atau mengangkat senjata berperang melawan non-muslim, 37.71% setuju bahwa bom bunuh diri adalah bagian dari ajaran jihad dalam Islam, dan 61.92% memahami bahwa sistem kekhilifahan merupakan sistem pemerintahan Islam.¹⁷

Inilah sebagian dari wajah kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini. Pemahaman, sikap, dan cara beragama yang eksklusif, intoleran, memuja kekerasan, dan menolak NKRI terus menerus dipasarkan. Cara beragama seperti ini akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang selama ini dibangun melalui tata kehidupan yang saling merangkul, menghargai, dan mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama. Karena itulah, perlu dibangun pemahaman keagamaan yang lebih moderat dengan mengedepankan sikap inklusif, dialogis, humanis, toleran, adil, dan damai.

Moderasi Beragama diyakini sebagai salah satu modal sosial penting dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan. Moderasi Beragama telah ditetapkan secara sah sebagai faktor penunjang pembangunan nasional

¹³ Infid dan Gusdurian, “Laporan Mapping Internet dan Sosial Media” (Jakarta, 2016).

¹⁴ Berita Satu, “Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah,”

www.beritasatu.com, 2017, https://www.beritasatu.com/megapolitan/414934/survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriah.

¹⁵ PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018).

¹⁶ PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z*.

¹⁷ PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z*.

dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (*leading sector*) dalam membangun kehidupan keagamaan moderat bangsa Indonesia.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, pelatihan penguatan moderasi beragama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI menjadi sangat signifikan untuk memastikan ASN memiliki pemahaman dan praktik beragama yang moderat. Modul ini disusun untuk memandu secara konseptual dan operasional pelaksanaan Pelatihan Moderasi Beragama bagi ASN di lingkungan Kemenag RI tersebut.

B. Tujuan Penyusun Modul

- 1.** Memandu Instruktur Nasional dalam mengelola forum Pelatihan Bagi Para Pelatih (*Training of Trainers*) Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama RI agar terstandarisasi secara nasional.
- 2.** Membantu Instruktur Nasional menemukan langkah dan metode yang tepat dan efektif dalam menyampaikan materi-materi pelatihan secara praktis dan mudah.
- 3.** Membantu Instruktur Nasional mendapatkan informasi-informasi pokok seputar pengetahuan dan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta beserta langkah-langkahnya.

C. Pengguna Modul

Pengguna modul ini adalah para Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Agama yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Untuk mengikuti pelatihan, calon peserta Pelatihan Instruktur Nasional yang dapat berasal dari dalam dan luar ASN Kementerian Agama RI harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi berikut:

1. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan institusi/lembaga.
2. Memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku beragama yang moderat.
3. Memiliki wawasan memadai dalam isu moderasi beragama.
4. Memiliki pengalaman cukup dalam memfasilitasi pelatihan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*).

D. Komposisi Modul

Modul ini disusun sebagai panduan bagi Instruktur Nasional dalam memandu proses pelatihan dalam pembelajaran yang holistik, terhubung antara satu bahasan dengan bahasan berikutnya dan akan berkelindan dalam pencapaian tujuan pelatihan.

Dalam setiap materi, modul ini menyediakan elemen-elemen pokok berikut:

1. **Pengantar**, yakni penjelasan ringkas materi dan hubungannya dengan materi sebelum dan/atau sesudahnya.
2. **Tujuan**, yaitu kompetensi yang harus dicapai pada akhir sesi.
3. **Pokok Bahasan**, berisi kisi-kisi materi yang harus disampaikan kepada peserta.
4. **Waktu**, yakni alokasi waktu yang disediakan untuk sesi tersebut.
5. **Peralatan dan Bahan**, yakni alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fasilitasi forum.
6. **Langkah-langkah** Fasilitasi, adalah tahapan praktis menjalankan sesi pelatihan secara runut.
7. **Lampiran Materi**, yakni bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan.
8. **Bahan Tayang**, yakni bahan presentasi yang akan ditayangkan fasilitator/trainer.

Penyesuaian dan improvisasi dalam penggunaan modul ini dapat terjadi pada pemilihan materi-materi dan teknik fasilitasi sesuai dengan karakteristik peserta pelatihan yang spesifik. Namun, isi modul ini harus menjadi acuan utama dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pelatihan Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama RI.

Instruktur Nasional juga memiliki keleluasaan untuk berkreasi menyajikan permainan, memilih metode, dan media sejauh masih sejalan dengan tujuan umum program dan target setiap materinya, dengan tetap mengedepankan pendekatan pendidikan orang dewasa.

E. Peran Instruktur Nasional

Instruktur Nasional memiliki tiga peran utama dalam menjalankan dan mengelola pelatihan berbasis modul ini:

1. Memastikan proses pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum pelatihan.
2. Memastikan substansi bahasan setiap materi tersampaikan secara lengkap dan tepat.
3. Memfasilitasi forum secara profesional sehingga seluruh peserta berproses secara aktif.

Dalam menunaikan peran di atas, Instruktur Nasional menjalankan dan mengelola pelatihan dalam bentuk Tim Instruktur Nasional terdiri dari 3-4 Instruktur Nasional. Pada beberapa materi tertentu bisa dihadirkan narasumber atau ahli di luar tim Instruktur Nasional.

F. Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas fasilitator/trainer dalam mengelola forum Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama RI agar memenuhi standar secara nasional.

Tujuan Khusus :

- 1) meningkatkan pemahaman peserta tentang Penguatan Moderasi Beragama
- 2) meningkatkan pemahaman dan penguatan peserta tentang modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kemenag RI
- 3) meningkatkan keterampilan peserta sebagai trainer/fasilitator dalam menjalankan langkah dan metode pelatihan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pelatihan.

G. Pelatihan yang Dikembangkan dalam Modul

1. Desain Pelatihan

Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama RI ini didesain dengan pendekatan “U Proses”. Pelatihan ini berangkat dari realitas kehidupan keagamaan di Indonesia yang muncul di permukaan saat ini. Dari sini, peserta diajak menyelam untuk menemukan pola, tren, struktur, dan cara pandang atau mental model yang melahirkan realitas tersebut.

Peserta kemudian diajak merekonstruksi realitas kehidupan keagamaan ideal (beragama secara moderat) melalui proses memikirkan dan menata ulang cara pandang yang melahirkan tindakan keagamaan di permukaan (*rethinking*), mendesain kembali struktur yang melahirkan realitas kehidupan keagamaan saat ini (*redesigning*), mengemasnya menjadi program yang

menjawab tantangan yang dihadapi (*reframing*), dan melakukan aksi-aksi nyata yang menjawab peristiwa yang muncul di lapangan (*reacting*).

2. Kompetensi Peserta

- 1) Memiliki kemampuan memadai sebagai fasilitator/trainer pelatihan Penguatan Moderasi beragama;
- 2) Memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan teknik-teknik memfasilitasi forum pelatihan Penguatan Moderasi beragama;
- 3) Memiliki sikap diri yang inklusif, egaliter, humanis, profesional, dan nondiskriminatif;
- 4) Memiliki wawasan keagaman yang moderat, toleran, nonkekerasan, dan ramah dengan tradisi;
- 5) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika;
- 6) Memiliki kesadaran bahwa keragaman bangsa Indonesia adalah ketetapan Tuhan dan melayani warga negara secara profesional, adil, dan nondiskriminatif adalah wujud dari kesadaran keagamaan dan kebangsaan.
- 7) Memiliki kecakapan dalam memahami dan menganalisis realitas kehidupan sosial-keagamaan melalui analisis sosial yang mumpuni.
- 8) Memiliki kecakapan kepemimpinan untuk mewujudkan Moderasi Beragama.
- 9) Memiliki kecakapan dalam merancang dan menjalankan program Moderasi Beragama berbasis analisis sosial.

3. Sasaran Pelatihan

Pelatihan Para Pelatih Penguatan Moderasi Beragama ini ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara Kemenag RI dan sumber daya manusia di luar Kemenag. Di Lingkungan ASN Kemenag, sasaran pelatihan adalah

- 1) Widya iswara
- 2) Dosen di Rumah Moderasi Beragama Perguruan Tingga Agama
- 3) Perwakilan Satuan Kerja Kemenag RI.

Sementara itu, sasaran peserta di uar SDM dari Kemenag RI adalah:

- 1) Perwakilan organisasi masyarakat sipil
- 2) Perwakilan ormas keagamaan.

Setiap calon peserta pelatihan, harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- 1) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan institusi/lembaga.
- 2) Memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku beragama yang moderat.
- 3) Memiliki pengalaman dasar menjadi fasilitator/trainer
- 4) Memiliki keterampilan dasar terkait teknik-teknik fasilitasi

4. Prinsip Pembelajaran

Modul ini didesain dengan paradigma empat pilar pembelajaran (*4 pillars of learning*): *learning to know, to do, to be, dan to live together*. Paradigma ini mendorong proses pembelajaran untuk memfasilitasi peserta dapat mengalami keempat proses tersebut.

1) Learning to know (belajar agar tahu)

Prinsip ini memosisikan pembelajaran sebagai usaha untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Untuk mengimplementasikan “*learning to know*”, fasilitator/trainer pelatihan menempatkan dirinya sebagai kawan berdialog bagi peserta untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan mereka. Pilar ini berfungsi membantu peserta mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sketsa kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini, nilai-nilai universal agama, konsep Moderasi Beragama Kemenag RI, dan ekosistem Moderasi Beragama. Proses pemahaman dilakukan dengan berbagai metode dan tidak hanya melalui metode ceramah (*lecture*).

2) Learning to do (belajar agar dapat melakukan)

Prinsip ini memandang pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespons peristiwa atau stimulus. Dalam pelatihan ini, peserta dimampukan untuk mengelola kehidupan keagamaan dalam fokus kerjanya. Berbagai instrumen seperti Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*), Proses U (*U Process*), membangun tim kerja dan jaringan, bina damai dan resolusi konflik.

3) Learning to be (belajar untuk mengembangkan diri)

Prinsip ini memosisikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian dari proses pengembangan diri (*learning to be*), yaitu proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Dalam prinsip ini, peserta diajak untuk berproses memahami dirinya dalam konteks keberagaman dan inklusi sosial, serta memperkuat nilai-nilai pribadi yang selaras seperti adil, respek, dan moderat. Ini dilakukan melalui aktivitas Sungai Kehidupan, Peta Bukanlah Wilayah, aktivitas mandiri, dan lain-lain.

4) Learning to live together (belajar untuk hidup bersama)

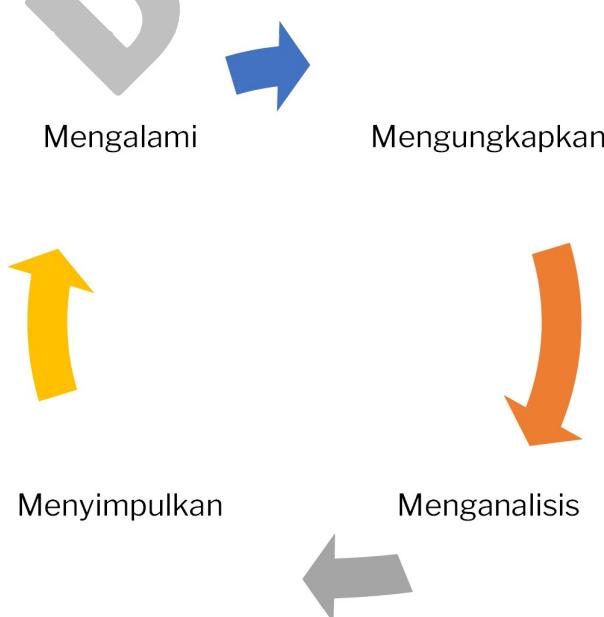
Prinsip ini meletakkan pendidikan sebagai proses yang akan melatih keterampilan untuk menjalani hidup bersama, saling menghargai, terbuka, saling memberi dan menerima. Nilai dan prinsip inilah yang akan menopang sikap toleransi antarras, etnis, dan agama dalam praktik kehidupan. Prinsip ini diterapkan melalui berbagai metode seperti *Social Presencing Theatre (4D Mapping)*, diskusi kelompok, tugas kelompok, aktivitas mandiri, dan lain-lain.

5. Pendekatan Pembelajaran

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan ini memosisikan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Pendekatan ini berangkat dari paradigma bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

- 1) dilibatkan secara aktif dalam proses belajar;
- 2) materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari;
- 3) materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka;
- 4) diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam proses belajar;
- 5) proses belajar mempertimbangkan pengalaman dan daya pikir.

Pelatihan ini akan mengikuti daur pendidikan orang dewasa, yaitu memfasilitasi proses mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengalami dengan penjabaran sebagai berikut:



- 1) **Mengungkapkan**, dilakukan dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut.
- 2) **Menganalisis**, dilakukan dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang menjadi akar persoalan.
- 3) **Menyimpulkan**, dengan cara mendorong peserta untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum.
- 4) **Mengalami**, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.

Peserta sebelum proses pelatihan berada dalam tahap “mengalami”, kemudian selama proses belajar dilatih untuk melewati proses “mengungkapkan”, “menganalisis”, dan “menyimpulkan”. Setelah selesai, peserta akan kembali masuk tahap “mengalami” dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama pelatihan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan sosial sehari-hari di lingkungannya masing-masing.

Dengan pendekatan ini, seluruh peserta diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses belajar bersama melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses pelatihan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subjek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, tanya-jawab, permainan, bermain peran (*role play*), maupun bentuk lainnya.

Konsekuensi utama dari pendekatan ini adalah dibutuhkan fasilitator dengan tingkat keahlian yang tinggi, baik dalam pemahaman isu moderasi beragana maupun dalam teknik fasilitasi forum itu sendiri. Hal ini untuk menghindari perangkap khas andragogi di mana pengalaman peserta dianggap sebagai realitas akhir.

Konsekuensi lainnya adalah kebutuhan terhadap media dan perlengkapan yang lebih beragam, sekalipun bisa disesuaikan dengan keterbatasan perlengkapan yang ada. Media dan perlengkapan yang diperlukan seperti LCD, laptop, papan tulis putih, kertas *flipchart*, spidol besar, spidol kecil, lakban atau perekat lainnya, gunting, kertas metaplan, kertas HVS, dan bolpoin. Beberapa materi memerlukan media khusus sesuai dengan keperluan masing-masing seperti instrumen diskusi, latihan, dan instrumen lain yang perlu digandakan sebelum proses kelas dimulai.

6. Kurikulum Pelatihan

Kurikulum pelatihan ini terdiri dari enam **Mata Pendidikan dan Pelatihan** (Mata Diklat) berikut ini:

1. **Pembukaan dan Perkenalan** berisi sesi Pembukaan dan Arahan dan Perkenalan dan Kontrak Belajar. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata Diklat ini, peserta dapat saling mengenal, mengetahui harapan, kekhawatiran, dan kesepakatan selama pelatihan. Selain itu, peserta memahami gambaran umum konteks pelatihan ini dalam program dan visi Kementerian Agama RI.
2. **Menalar Keragaman** berisi tiga sesi utama: Udara Asumsi, Membangun Perspektif; Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia; dan Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es. Mata Setelah menjalani sesi-sesi pada Mata Diklat ini peserta menyadari kekeliruan berpikir dalam memahami perbedaan dan isu-isu sosial keagamaan, mengenali lebih dalam peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia, dan memiliki kemampuan dalam menganalisis pola, struktur, dan cara pandang penyebab situasi keberagamaan saat ini.
3. **Nilai-Nilai Universal Agama dan Argumen Teologis Moderasi Beragama** berisi sesi Nilai-nilai Universal dalam Agama. Setelah mengikuti sesi pada Mata Diklat ini, peserta memahami nilai-nilai universal dan landasan teologis dalam agama terkait Moderasi Beragama. Selain itu, peserta juga dapat merumuskan dan mengenali isu-isu dan argumen-argumen teologis yang berkembang dan digunakan secara bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai moderasi beragama.
4. **Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah mengikuti Mata Diklat ini peserta** memahami konsep Moderasi Beragama yang dirumuskan Kementerian Agama RI beserta indikator-indikatornya, memahami Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan posisinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan menyadari makna pentingnya Moderasi Beragama, baik dalam konteks sosial, kebijakan negara, maupun kebutuhan masa depan Indonesia.
5. **Moderasi Kementerian Agama Republik Indonesia** berisi sesi Wawasan Kebangsaan, Sikap Diri ASN Kemenag RI, Ekosistem Moderasi Beragama. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata Diklat ini, peserta menyadari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai representasi negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. Peserta juga menyadari sikap diri ASN Kementerian Agama RI yang memperkuat gerakan Moderasi Beragama, dan memahami peran dan posisi yang harus mereka jalankan.
6. **Strategi Penguatan Moderasi Beragama** berisi sesi Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U dan Membangun Gerakan: Kepemimpinan dan Kepeloporan. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata Diklat ini, peserta memahami konsep Moderasi Beragama sebagai cara pandang baru dalam kehidupan bersama, mampu menyusun

rencana aksi mewujudkan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama dan masyarakat, dan memiliki kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.

DRAF

Kurikulum Pelatihan Bagi Para Pelatih (Training of Trainers)

Penguatan Moderasi Beragama

Kementerian Agama Republik Indonesia

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I : PEMBUKAAN DAN PERKENALAN					
I	Pembukaan dan Arahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan Moderasi Beragama • Visi, Misi, dan Nilai Dasar Kementerian Agama • Sistem Pelatihan Kementerian Agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami gambaran umum peta jalan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia • Menyegarkan pemahaman tentang visi, misi, dan nilai dasar Kementerian Agama • Memahami hubungan dan konteks pelatihan MB dalam sistem pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Tanya-jawab 	270 menit (6 jam pelatihan)
II	Perkenalan dan Kontrak Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan seluruh peserta, fasilitator, dan panitia (nama, lembaga, harapan, kekhawatiran) • Kesepakatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal satu sama lain seluruh komponen pelatihan • Merumuskan harapan dan kekhawatiran peserta • Merumuskan kesepakatan belajar selama pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Class Check in • Permainan • Tanya-jawab dengan Menti.com 	90 menit (2 jam pelatihan)
III	Kemampuan Fasilitator/Traininer	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik fasilitator yang baik dan buruk • Prinsip-prinsip menjadi fasilitator yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyadari dan mengenali perbedaan dan karakteristik dasar fasilitator yang baik dan buruk. • Meningkatkan kemampuan memfasilitasi pelatihan • 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Presentasi • Tanya-jawab • Curah perndapat 	180 menit (3 jam pelatihan)

MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN II: MENALAR KERAGAMAN

IV	Bina Suasana	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana, keakraban, dan semangat mengikuti materi dan tahapan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana akrab dan nyaman antar peserta dan fasilitator • Meningkatkan semangat peserta untuk mengikuti materi dan tahapan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan 	45 menit (1 jam pelatihan)
V	Udara Asumsi, Membangun Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Bukan Teritori (<i>Map is Not Territory</i>) • Tangga Kesimpulan (<i>Ladder of Inference</i>) • Tiga Suara Tiga Keterbukaan (<i>Three Voices; Three Opennes</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Membongkar kekeliruan berpikir dan asumsi subjektif atas keragaman dan perbedaan. • Membangun kesadaran peserta akan pentingnya pola pikir, sikap dan perilaku yang inklusif. • Meningkatkan pemahaman peserta tentang keberagaman sosial-keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas individu • Presentasi • Tanya-jawab 	90 menit (2 jam pelatihan)
VI	Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Situasi umum kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini. • Fenomena intoleransi dan ekstremisme keagamaan. • Dua arus paradigma praktik keberagamaan: substantif-inklusif versus eksklusif-legal formalistik. • Skenario masa depan Indonesia berdasarkan situasi kehidupan keberagamaan saat ini. • Pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman peserta tentang peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia. • Meningkatkan pemahaman peserta tentang kasus-kasus intoleransi, ekstremisme kekerasan dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. • Menyadari pentingnya Moderasi Beragama sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Tanya-jawab ▪ <i>Scenario thinking</i> melalui diskusi kelompok 	135 menit (3 jam pelatihan)

			<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran untuk merespons situasi keberagamaan di Indonesia saat ini. • Melakukan <i>positioning</i> atau kalibrasi diri dengan kebutuhan bangsa. 		
VII	Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Gunung Es (<i>Iceberg Analysis</i>) • Praktik analisis fenomena, pola, struktur dan paradigma/cara pandang (mental model) yang menjadi penyebab situasi keberagamaan saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami berbagai fenomena keagamaan saat ini: eksklusivisme beragama (<i>religious exclusivism</i>), eksklusivisme (<i>exclusivism</i>), ekstremisme kekerasan (<i>violent extremism</i>). • Mampu melakukan analisis pola, struktur, dan cara pandang yang menjadi penyebab situasi keberagamaan saat ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab dengan <i>menti.com</i> • Diskusi kelompok • Presentasi • Curah pendapat (<i>brainstorming</i>) • Praktik Analisis Gunung Es (<i>Iceberg Analysis</i>) 	185 menit (4 jam pelatihan)
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN III: NILAI-NILAI UNIVERSAL AGAMA DAN ARGUMEN TEOLOGIS MODERASI BERAGAMA					
VIII	Bina Suasana dan reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana, keakraban, dan semangat mengikuti materi dan tahapan pelatihan • Reviu harian 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana akrab dan nyaman antar peserta dan fasilitator • Meningkatkan semangat peserta untuk mengikuti materi dan tahapan pelatihan • Peserta memahami dan mengingat pokok-pokok materi pelatihan pada hari sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan • Curah pendapat • Presentasi 	45 menit (1 jam pelatihan)
IX	Nilai-nilai Universal dalam Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Moderasi dalam pandangan teologis agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami nilai-nilai universal agama yang sangat luhur, sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi kelompok 	180 menit (4 jam pelatihan)

		<ul style="list-style-type: none"> Nilai-nilai universal agama: kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan Relasi agama dan negara dalam pandangan agama 	<ul style="list-style-type: none"> yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia. Memahami relasi agama dan negara dalam pandangan keagamaan, khususnya negara Pancasila, yang memastikan bahwa Pancasila adalah manifestasi nilai-nilai luhur agama yang bersifat final. Menyadari bahwa Moderasi Beragama adalah esensi dan jantung nilai dari pokok-pokok ajaran agama. 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi 	
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IV: KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA					
X	Konsep Moderasi Beragama Kemenag RI	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Moderasi Beragama Indikator Moderasi Beragama Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami konsep Moderasi Beragama yang dirumuskan Kementerian Agama RI, beserta indikator-indikator perwujudannya. Memahami Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan posisinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menyadari makna pentingnya Moderasi Beragama, baik dalam konteks sosial, kebijakan negara, maupun kebutuhan masa depan Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya-jawab Tanya-jawab dengan menti.com 	180 menit (4 jam pelatihan)
MATA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN V: MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA					

XI	Bina Suasana dan reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana, keakraban, dan semangat mengikuti materi dan tahapan pelatihan • Reviu harian 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana akrab dan nyaman antar peserta dan fasilitator • Meningkatkan semangat peserta untuk mengikuti materi dan tahapan pelatihan • Peserta memahami dan mengingat pokok-pokok materi pelatihan pada hari sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan • Curah pendapat • Presentasi 	45 menit (1 jam pelatihan)
XII	Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis legalitas dan legitimasi Kementerian Agama RI ▪ Mandat Kementerian Agama RI sebagai penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama. ▪ Pancasila sebagai kesepakatan bangsa ▪ Jati Diri ASN Kementerian Agama RI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyadari bahwa Kementerian Agama RI sebagai bagian dari negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. ▪ Menyadari jati diri ASN Kemenag RI yang profesional, adil, demokratis, dan berpandangan, bersikap, dan berperilaku moderat dalam beragama. ▪ Memahami makna penting kedudukan Kementerian Agama RI dalam penciptaan kerukunan umat beragama, persatuan Indonesia, dan perwujudan negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Diskusi Kelompok 	90 menit (2 jam pelatihan)
XIII	Sikap Diri ASN Kemenag RI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi dan peran ASN Kemenag. ▪ Pandangan ASN Kemenag terhadap Indonesia yang berdasarkan Pancasila, relasi agama dan negara, perlindungan dan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kesadaran sebagai ASN Kemenag untuk menegakkan pilar kebangsaan berbasis narasi keagamaan. ▪ Menyadari citra diri ASN Kemenag RI yang kuat dalam pengarusutamaan moderasi 	Diskusi Kelompok dengan metode "Hot 7 Dots"	180 menit (4 jam pelatihan)

		agama-agama, dan regulasi-regulasi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beragama dalam kehidupan masyarakat. ▪ Menyadari sebagai aparatur negara harus bersikap adil, imparsial, dan profesional dalam melindungi dan melayani seluruh umat beragama di Indonesia. 		
XIV	Ekosistem Moderasi Beragama	Pemahaman aktor, posisi, dan jejaring Kementerian Agama di antara stakeholders lain dalam penerapan Moderasi Beragama di Indonesia (kondisi saat ini dan kondisi ideal)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami perannya sebagai aktor, posisinya, dan jejaringnya dalam penerapan Moderasi Beragama di wilayah di mana dia bekerja. ▪ Melihat dan memahami secara langsung tentang diri dan posisi sosial Kementerian Agama dalam aneka stakeholders yang ada. ▪ Melakukan praktik non-verbal yang membuka kesadaran pribadi dalam bersikap. ▪ Terbuka wawasan akan kondisi dan situasi saat ini yang signifikan dan dinamika yang tidak tampak untuk memosisikan Kementerian Agama secara tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan empat dimesi (<i>four D's mapping</i>) dengan Teater Pertunjukan Sosial (<i>Social Presencing Theatre</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Curah Pendapat • Refleksi 	90 menit (2 jam pelatihan)

MATA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN VI: STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

XV	Bina Suasana dan reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana, keakraban, dan semangat mengikuti materi dan tahapan pelatihan • Reviu harian 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun suasana akrab dan nyaman antar peserta dan fasilitator • Meningkatkan semangat peserta untuk mengikuti materi dan tahapan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan • Curah pendapat • Presentasi 	45 menit (1 jam pelatihan)
----	------------------------	---	--	---	-------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> Peserta memahami dan mengingat pokok-pokok materi pelatihan pada hari sebelumnya. 		
XVI	Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rethinking</i> <i>Redesigning</i> <i>Reframing</i> <i>Reacting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami konsep Moderasi Beragama sebagai cara pandang baru dalam kehidupan bersama Memahami secara mendalam tentang nilai-nilai dasar dan indikator-indikator Moderasi Beragama Mampu menyusun rencana aksi untuk mewujudkan Moderasi Beragama di kantor dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> <i>U Process</i> Tanya-jawab dengan Menti.com Diskusi kelompok <i>Gallery walk</i> 	255 menit (6 jam pelatihan)
XVII	Membangun Gerakan : Kepemimpinan dan Kepeloporan	<ul style="list-style-type: none"> Kepemimpinan Kepeloporan 	Memiliki kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Menonton film Studi kasus Diskusi 	180 menit (4 jam pelatihan)
XVIII	Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Refleksi diri Evaluasi pelatihan Rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengungkapkan perubahan paling penting yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Mampu merefleksikan hasil pelatihan dengan masalah kehidupan sosial keagamaan di masyarakat Mampu menyusun rencana aksi penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Curah pendapat Uji pascapelatihan (<i>post test</i>). 	90 menit (2 jam pelatihan)
XIX	Meneguhkan Komitmen Penggerak Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> Refleksi diri Peneguhan komitmen 	Berkomitmen untuk menjadi fasilitator pelatihan Moderasi Beragama dan para penggerak Moderasi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> Refleksi Doa bersama 	45 menit (1 jam pelatihan)

	Moderasi Beragama			
--	-------------------	--	--	--

**Kurikulum Tambahan
Pelatihan Bagi Para Pelatih (Training of Trainers)
Penguatan Moderasi Beragama
Kementerian Agama Republik Indonesia**

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
XX	Membangun Gerakan : Tim dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar dan karakteristik jejaring. ▪ Analisis stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami strategi membangun jejaring yang efektif untuk penguatan Moderasi Beragama. ▪ Mampu membangun tim dan jaringan yang kuat untuk penguatan Moderasi Beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi kelompok • Praktik • Bermain peran (<i>role play</i>) 	135 menit (3 jam pelatihan).
XXI	Membangun Gerakan : Bina Damai dan Resolusi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Damai • Resolusi konflik 	Memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam bina damai dan resolusi konflik untuk memperkuat Moderasi Beragama.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya-jawab • Studi kasus 	135 menit (3 jam pelatihan).

7. Durasi Waktu Pelatihan

Keseluruhan materi/paket pembahasan dalam pelatihan ini berdurasi **2.710 menit atau 60 jam pelatihan (JP)**. Berikut ini adalah sebaran sesi-sesi dengan alokasi waktunya:

JAM PELATIHAN (JP)	DURASI WAKTU (MENIT)	MATERI
6 JP	270 menit	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan Moderasi Beragama • Visi, Misi, dan Nilai Dasar Kementerian Agama • Sistem Pelatihan Kementerian Agama
1 JP	45 menit	Pre-test
1 JP	45 menit	Bina Suasana dan Reviu
2 JP	90 menit	Sesi 1: Perkenalan dan Kontrak Belajar
4 JP	180 menit	Sesi 2: Kemampuan Fasilitator/Trainer
2 JP	90 menit	Sesi 3: Membongkar Asumsi, Membangun Perspektif
4 JP	180 menit	Sesi 4 : Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia
1 JP	45 menit	Bina Suasana dan Reviu
4 JP	180 menit	Sesi 5: Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es
4 JP	180 menit	Sesi 6: Nilai-nilai Universal Keagamaan
4 JP	180 menit	Sesi 7: Konsep Moderasi Beragama Kemenag RI
2 JP	90 menit	Sesi 8: Wawasan Kebangsaan
1 JP	45 menit	Bina Suasana dan Reviu
4 JP	180 menit	Sesi 9: Sikap Diri ASN Kemenag RI
3 JP	145 menit	Sesi 10: Ekosistem Moderasi Beragama
3 JP	135 menit	Sesi 11: Strategi Penguatan Moderasi Beragama: <i>Rethinking, Redesigning, Reframing, Reacting</i>
2 JP	90 menit	Sesi 12: Membangun Gerakan : Kepemimpinan dan Kepeloporan
1 JP	45 menit	Bina Suasana dan Reviu
6 JP	270 menit	Sesi 13: Praktik Micro Teaching

2 JP	90 menit	Sesi 14: Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi
1 JP	45 menit	Sesi 15: Meneguhkan Komitmen Sebagai Penggerak PMB
1 JP	45 menit	Post-test
60 JP	2.710 menit	

Modul Tambahan

JAM PELATIHAN (JP)	DURASI WAKTU (MENIT)	MATERI
3 JP	135 menit	Sesi : Membangun Gerakan II: Tim dan Jaringan
3 JP	135 menit	Sesi : Membangun Gerakan III: Bina Damai dan Resolusi Konflik
6	270	

Fasilitator dapat menggunakan modul tambahan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan target peserta

8. Alur Proses Pelatihan



BAB II

PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR

A. Pengantar

Materi ini merupakan materi pertama dalam sesi pelatihan Moderasi Beragama. Materi perkenalan dan kontrak belajar perlu diberikan mengingat para peserta berasal dari berbagai latar belakang dan beberapa belum saling mengenal. Bukan saja perkenalan antarpeserta, sesi ini juga diharapkan menjadi ruang pertemuan awal untuk membangun keterlibatan dengan panitia dan trainer/fasilitator pelatihan.

Di samping perkenalan, sesi ini juga digunakan untuk membuat kontrak belajar. Kontrak belajar bertujuan untuk membangun persepsi dan kesepakatan yang sama tentang aturan-aturan selama pelatihan berlangsung. Beberapa aturan dirumuskan bersama dengan tujuan menciptakan kenyamanan, kedisiplinan dan kelancaran seluruh agenda kegiatan. Terkait dengan kelancaran selama pelatihan, peserta diajak untuk memilih satu orang yang menjadi koordinator.

Sekalipun sesi ini disebut “Perkenalan dan Kontrak Belajar”, di sesi ini, Instruktur Nasional juga bisa menjelaskan alur pelatihan. Dengan memahami alur pelatihan, peserta sejak awal dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keseluruhan tahap-tahap pelatihan hingga mencapai tujuan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Mengenal lebih dekat satu sama lain seluruh komponen pelatihan
2. Menyadari harapan dan kekhawatiran peserta
3. Memiliki kesepakatan apa yang harus dan tidak harus dilakukan selama pelatihan

C. Pokok Bahasan

- Perkenalan seluruh peserta, instruktur nasional, dan panitia (nama, lembaga, harapan, kekhawatiran)
- Kesepakatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama pelatihan

D. Metode

- *Class Check in*
- Permainan
- Tanya-jawab melalui www.menti.com

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Selotip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas
11. Jaringan internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar: Instruktur Nasional membuka kelas dan menjelaskan, sesi ini bertujuan untuk saling berkenalan dan membuat kesepakatan belajar.</p> <p>Sebelum sesi perkenalan dan kontrak belajar, peserta sudah mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (<i>pre-test</i>) yang telah disediakan.</p>
2	20 menit	<p>Perkenalan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instruktur Nasional meminta peserta berdiri secara melingkar.2. Instruktur Nasional meminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satu orang yang sudah dikenalnya.3. Instruktur Nasional meminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya.4. Begitu seterusnya.

3	30 menit	<p>Harapan dan kekhawatiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta peserta membuka Google Chrome, dan diminta menulis www.menti.com. 2. Instruktur Nasional meminta peserta memasukkan kode yang sudah tersedia. 3. Instruktur Nasional meminta peserta menjawab pertanyaan yang muncul dalam www.menti.com: “pernahkah Anda menjadi fasilitator/trainer pelatihan yang partisipatoris (sering, kadang-kadang, pernah)?” 4. Instruktur Nasional membaca jawaban-jawaban peserta dan memberi komentar singkat secara menarik. 5. Setelah selesai, Instruktur Nasional meminta peserta kembali menjawab melalui www.menti.com: “apa harapan utama Anda terhadap pelatihan ini?” 6. Setelah jawaban-jawaban peserta masuk, Instruktur Nasional membaca jawaban-jawaban dan mengomentarinya secara menarik. 7. Instruktur Nasional menuliskan harapan-harapan peserta di kertas plano 8. Setelah selesai, fasilitator peserta diminta kembali menjawab melalui www.menti.com pertanyaan: “apa yang paling Anda khawatirkan terhadap pelatihan ini?” 9. Setelah jawaban-jawaban peserta masuk, Instruktur Nasional membaca jawaban-jawaban dan mengomentarinya secara menarik. 10. Instruktur Nasional menuliskan kekhawatiran-kekhawatiran peserta di kertas plano.
4	15 menit	<p>Kontrak Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak peserta menyepakati apa saja yang tidak boleh dilakukan selama pelatihan berlangsung. 2. Instruktur Nasional menuliskan jawaban peserta pada kertas plano. 3. Instruktur Nasional membagikan potongan kertas kepada peserta dan meminta mereka menuliskan sanksi apa yang akan diberikan kepada para peserta yang melanggar kesepakatan. 4. Instruktur Nasional meminta peserta menggulung kertas yang sudah peserta tuliskan dan meletakkannya dalam tempat yang sudah disediakan. Gulungan kertas akan dibuka pada awal sesi jika waktu tersedia.
5	5 menit	<p>Memilih Ketua Kelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak setiap peserta memutar-mutur tangannya di atas kepala.

		<p>2. Dalam hitungan tertentu, Instruktur Nasional meminta setiap peserta menunjuk seseorang. Orang yang banyak ditunjuk, itulah yang menjadi ketua kelas.</p> <p>3. Instruktur Nasional mengajak setiap peserta merumuskan apa saja tugas ketua kelas.</p>
6	10 menit	<p>Alur Pelatihan:</p> <p>1. Instruktur Nasional menjelaskan tujuan dan alur pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut.</p> <p style="padding-left: 20px;">Instruktur Nasional menayangkan gambar Tujuan dan Alur Pelatihan.</p> <p>2. Instruktur Nasional memberi kesempatan peserta memberi tanggapan.</p> <p>3. Instruktur Nasional merespons balik secukupnya karena ini baru sesi perkenalan dan kontrak belajar.</p>
7	5 menit	<p>Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional menutup dengan memastikan bahwa peserta mematuhi kesepakatan yang sudah diputuskan.
	90 menit	

H. Bahan Tayang

1. Alur Pelatihan

BAB III

KEMAMPUAN FASILITATOR/TRAINER

A. Pengantar

Pelatihan ini didesain di antaranya untuk meningkatkan kompetensi peserta sebagai fasilitator/trainer pelatihan dan kemampuan menjalankan teknik-teknik memfasilitasi forum pelatihan Penguatan Moderasi beragama. Sesi ini akan mengajak peserta menggali berdasarkan pengalaman mereka selama ini mengenai prinsip-prinsip fasilitator/trainer yang baik seperti memfasilitasi peserta mengekspresikan dan menyampaikan gagasan dan pandangan peserta. Fasilitator/trainer yang baik bukan orang yang mendominasi forum. Sebaliknya, mereka lebih banyak mendengar dan mengarahkan forum agar lebih dinamis. Sesi ini berusaha membantu peserta mengenali lebih lanjut bagaimana karakteristik fasilitator yang baik dan buruk.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta: memiliki kesadaran dan kemampuan mengenali perbedaan dan karekteristik dasar fasilitator yang baik dan buruk.

C. Pokok Bahasan

- Karakteristik fasilitator yang baik dan buruk
- Prinsip-prinsip menjadi fasilitator yang baik

D. Metode

- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Tanya-jawab
- Curah perndapat

E. Waktu

180 menit (4 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Selotip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin

10. Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional membuka menjelaskan tujuan sesi, memiliki kedasaran dan kemampuan mengenali perbedaan dan karakteristik dasar fasilitator yang baik dan buruk.
2	40 menit	<p>Diskusi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional meminta dua-tiga peserta menceritakan pengalaman terkait hasil, proses, dan metode pelatihan yang pernah mereka fasilitasi. Instruktur Nasional membagi peserta menjadi empat kelompok. Instruktur Nasional meminta kelompok ganjil (Kelompok 1 dan 3) mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> Mengapa fasilitator penting untuk pelatihan? Ciri-ciri fasilitator yang baik? Apa paradigma yang seharusnya digunakan? Apa teknik-teknik yang seharusnya diterapkan oleh fasilitator? Instruktur Nasional meminta kelompok genap (Kelompok 2 dan 4) mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> Mengapa fasilitator/trainer penting dalam pelatihan Apa ciri-ciri karakteristik fasilitator yang tidak baik Apa paradigma yang biasa digunakan fasilitator yang tidak baik Apa teknik-teknik yang biasa diterapkan oleh fasilitator tidak baik Apa yang seharusnya dihindari oleh fasilitator yang tidak baik?
	30 menit	<p>Presentasi Diskusi</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tahap pertama terdiri dari kelompok ganjil, berikutnya kelompok genap.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Instruktur Nasional meminta anggota kelompok menambahkan informasi yang perlu ditambahkan dan mempersilakan peserta. 3. Instruktur Nasional mempersilakan peserta lain di luar kelompok bertanya, merespons, atau mengklarifikasi hasil presentasi. 4. Instruktur Nasional mencatat kata-kata kunci yang paling banyak disebut dan penting dalam presentasi serta menyampaikannya kepada peserta.
	30 menit	<p>Presentasi “Kemampuan Fasilitator”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Instruktur Nasional menyampaikan presentasi “Menjadi Fasilitator”. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang “On Beeing Facilitator” </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instruktur Nasional mempersilakan peserta bertanya atau mengklarifikasi 4. Instruktur Nasional mempersilakan Instruktur Nasional lain menyampaikan langkah berikutnya.
	70 menit	<p>Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta dua-tiga peserta menjelaskan apa itu pendidikan andragogi dan pedagogi. 2. Instruktur Nasional menjelaskan tentang prinsip dan pendekatan andragogi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Pendidikan Andragogi </div> <ol style="list-style-type: none"> 5. Instruktur Nasional memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, merespons, atau mengklarifikasi. 6. Instruktur Nasional meminta peserta bermain dengan mengikuti langkah-langkah berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Instruktur Nasional meminta peserta membentuk dua baris dua baris memanjang dan saling berhadapan. • Instruktur Nasional meminta peserta pada baris sebelah kanan Instruktur Nasional membuat gerakan menunjuk secara bebas (bisa berputar-putar atau atas-bawah) kepada peserta di depannya. Peserta yang ditunjuk mengikuti sesuai gerakan tersebut. Begitu sebaliknya. 7. Setelah selesai bermain, Instruktur Nasional meminta tiga-empat peserta berefleksi atas permainan tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Apa fakta yang Anda lihat? (Misalnya, seorang menunjuk, yang lain mengikuti tunjukan)

		<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang Anda rasakan ketika menunjuk teman di hadapannya? (Misalnya, merasa berkuasa, sungkan, bahagia) • Apa yang Anda rasakan ketika ditunjuk? (Misalnya merasa tidak berdaya, dendam, dan kesal). • Apa yang Anda simpulkan? (Misalnya, tidak boleh otoriter) • Jika tidak punya kesempatan dalam melampiaskan perasaan menjadi obyek? (Misalnya, melakukannya kepada orang lain)
	5 menit	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menutup sesi
	180 menit	

H. Bahan Tayang

1. Menjadi Fasilitator (*On Being Facilitator*)
2. Pendekatan Pendidikan Andragogi

DRAFT

BAB IV

UDAR ASUMSI MEMBANGUN PERSPEKTIF

A. Pengantar

Bagaimana cara kita memandang dan memaknai dunia? Cara kita memahami, menilai, bahkan meyakini tentang sesuatu di luar sana ditentukan dari apa yang ada di dalam kepala kita. Apa yang ada di dalam kepala kita dibangun dari proses yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Pertanyaannya adalah apakah yang kita pikirkan dan yakini tentang sesuatu sungguh-sungguh menggambarkan sesuatu itu atau ia berasal dari asumsi-asumsi subjektif kita?

Materi ini merupakan “ilmu alat” yang harus dimiliki peserta pelatihan sebelum memasuki materi-materi selanjutnya. Sebagaimana “ilmu alat”, materi ini membekali peserta dengan perangkat metodologis yang berguna untuk membongkar kekeliruan dalam bernalar karena asumsi-asumsi awal yang begitu saja dianggap sebagai kebenaran faktual. Materi ini membekali peserta untuk menyadari berbagai sikap dan tindakan negatif atas keragaman dan perbedaan yang lahir dari kekeliruan cara bernalar.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

- Menyadari kekeliruan berpikir dan asumsi subjektif atas realitas, keragaman, dan perbedaan.
- Menyadari pentingnya pola pikir, sikap, dan perilaku inklusif.
- Memiliki pemahaman yang meningkat tentang keberagaman sosial-keagamaan.

C. Pokok Bahasan

- Peta Bukan Teritori (*The Map is not The Territory*)
- Tangga Kesimpulan (*Ladder of Inference*)
- Bias Kognitif (*Cognitive Bias*)
- Tiga Suara Tiga Keterbukaan (*Three Voices; Three Openness*)

D. Metode

- Tugas individu
- Presentasi
- Tanya-jawab

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

11. LCD
12. Laptop/Komputer
13. Kertas plano
14. Kertas metaplan
15. Gunting
16. Selotip
17. Spidol besar warna-warni
18. Spidol kecil warna-warni
19. Bolpoin
20. Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	Pengantar: I. Instruktur Nasional membuka kelas dan memberi pengantar bahwa selama ini banyak di antara kita yang terjebak dalam perangkap asumsi-asumsi subjektif yang diyakini sebagai kebenaran faktual atas fenomena keragaman dan perbedaan.
2	20 menit	Peta Bukan Wilayah 1. Instruktur Nasional meminta masing-masing peserta untuk menggambar peta dari rumah ke lokasi pelatihan. 2. Setelah masing-masing peserta menggambar peta, Instruktur Nasional meminta setiap peserta menukar gambar petanya dengan kawan di samping/depan/belakangnya Catatan. Gambar peta harus ditukarkan kepada peserta yang belum tahu rumah pemilik gambar peta. 3. Instruktur Nasional bertanya kepada dua atau tiga orang peserta: " apakah dengan gambar peta tersebut, Anda bisa sampai ke tujuan? " 4. Instruktur Nasional kemudian mengajak peserta untuk melihat tampilan google map di LCD berdasarkan salah satu alamat rumah peserta. 5. Instruktur Nasional menjelaskan kepada peserta bahwa Peta Bukanlah Teritori (<i>map is not territory</i>). Peta adalah asumsi yang ada di kepala kita. Territory adalah fakta.
3	40 menit	Tangga Kesimpulan dan Bias Kognitif

		<p>1. Instruktur Nasional menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekeliruan dalam bernalar melalui teori <i>ladder of inference</i> (tangga penyimpulan) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyeleksi data (<i>selected data</i>), ○ Menambah makna (<i>added meaning</i>) ○ Membuat asumsi (<i>assumption</i>) ○ Membuat kesimpulan (<i>conclusion</i>) ○ Membentuk keyakinan (<i>beliefs</i>). <p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif tentang <i>Ladder of Inference</i></p> <p>2. Instruktur Nasional memberi berbagai contoh kasus.</p> <p>Misalnya, menjelaskan tahap-tahap kekeliruan penalaran yang membentuk kekeliruan keyakinan dalam teori <i>ladder of inference</i> dalam konflik komunitas Budha sebagai kelompok mayoritas dengan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.</p> <p>3. Instruktur Nasional menekankan bahwa yang paling penting dari mempelajari <i>ladder of inference</i> adalah membongkar asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan kita atas sesuatu, kemudian memugarnya kembali melalui <i>reflective learn</i> dan <i>reflective loop</i>.</p> <p>4. Instruktur Nasional melanjutkan dengan menjelaskan hal-hal yang membuat pengetahuan seseorang bias (<i>Cognitive Bias</i>): <i>Egocentric Memory</i>, <i>Egocentric Myopia</i>, <i>Egocentric Righteousness</i>, <i>Egocentric Hypocrisy</i>, <i>Egocentric Oversimplification</i>, <i>Egocentric Blindness</i></p> <p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif terkait Bias Kognitif.</p>
4	20 menit	<p>Tiga Suara, Tiga Keterbukaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruktur Nasional menjelaskan mengapa banyak orang diam terhadap maraknya fenomena intoleransi dan ekstremisme keagamaan dengan menggunakan kerangka Proses-n dan Proses-u. • Instruktur Nasional kemudian menjelaskan <i>Three Voices</i> (<i>voice of judgment</i>, <i>voice of cynicism</i> and <i>voice of fear</i>) dan <i>Three Openness</i> (<i>open mind</i>, <i>open heart</i> and <i>open will</i>).

		<p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif terkait Tiga Suara Tiga Keterbukaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator menutup bagian ini dengan mendorong peserta untuk membuka pikiran, hati, dan kehendak untuk semakin terlibat dan bersuara dalam melawan kecenderungan intoleransi dan ekstremisme.
5	5 menit	<p>Penutup:</p> <p>J. Instruktur Nasional menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.</p>
	90 menit	

H. Lampiran Materi

1. Peta Bukan Wilayah
2. Tangga Penyimpulan (*Ladder of Inference*)
3. Bias Kognitif
4. Tiga Suara, Tiga Keterbukaan

I. Bahan Tayang

1. Udar Asumsi Membangun Perspektif

Lampiran Materi 1.

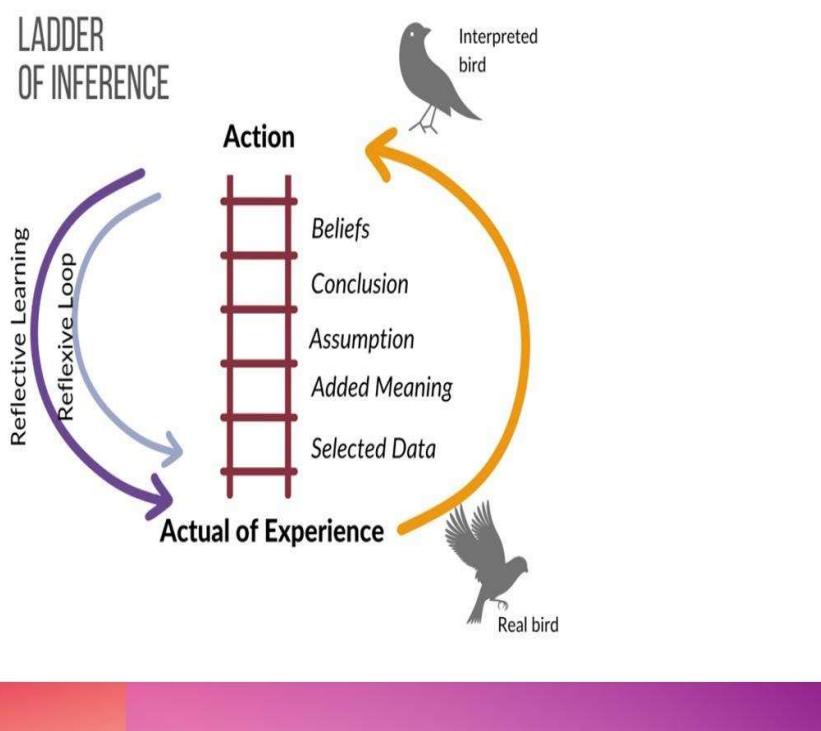
Peta Bukan Wilayah

- Konsep Peta Bukan Wilayah (*The Map is Not The Territory*) sebenarnya berasal dari seorang antropolog yang bernama Gregory Bateson. Peta (*map*) yang dimaksud adalah sebuah Realitas Internal (RI) yang mewakili “isi” kepala manusia. Sedangkan wilayah (*territory*) wilayah adalah Realitas Eksternal (RE) yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia dan bersifat faktual.
- “Apa yang terjadi di luar kepala kita tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita”. Artinya, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita bersifat faktual dan netral. Ia menjadi memiliki makna dan juga nilai setelah memasuki Realitas Internal manusia yang didahului dengan proses kognitif yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Itulah sebabnya satu informasi dapat memiliki banyak makna bila disampaikan ke beberapa orang. Segelas air teh dengan satu sendok teh gula pasir bisa dimaknai teh manis oleh seseorang, tetapi dimaknai teh yang kurang manis oleh orang lainnya.
- “Peta bukan wilayah sebenarnya” dapat dimaknai cara seseorang memandang dunia. Cara seseorang memandang tentu tidak sama dengan orang lain yang dipandang. Cara memandang hanya lah interpretasi saja, dan tidak akan sama dengan realitasnya.
- Seseorang terkadang lebih memilih menciptakan “peta” pikiran sendiri dibandingkan berhubungan langsung dengan realitasnya. Peta Indonesia bukanlah Indonesia itu sendiri, Indonesia bukanlah Indonesia yang digambarkan oleh peta Indonesia. Perhatikan cara orang memandang peta, dan perhatikan bagaimana orang tersebut merespons peta. Agar timbul kebijaksanaan dalam menyikapi peta tersebut, maka kita perlu mengamati dan menyadarinya.

Lampiran Materi 2

Ladder of Inference

- *Ladder of Inference* (Tangga Penyimpulan) diperkenalkan oleh Chris Argyris dan dikembangkan oleh Peter Senge, untuk membantu kita memahami bagaimana proses kognitif terjadi dalam pikiran kita, sehingga kita dapat mengisi celah dalam berpikir dan membuat keputusan berdasarkan kenyataan, juga membantu menguji pemikiran orang lain dan mencapai kesimpulan yang lebih baik secara bersama-sama.



Secara alamiah, Tangga Inferensi terdiri dari tujuh tangga yang mewakili proses mental atau berpikir kita, yaitu:

1. **Realitas**, kondisi nyata yang bisa diamati berupa data dan informasi yang telah dikumpulkan.
2. **Data**, dari data yang dikumpulkan, maka akan dipilih data apa saja yang akan digunakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kepercayaan yang dimiliki. Semua data tidak mungkin akan digunakan dalam proses ini, karena adanya keterbatasan dalam mengolah semua informasi dan membutuhkan kejelian dalam memilih data.
3. **Makna**, memahami makna dari kondisi fakta yang terjadi pada data yang dipilih dengan cara meneliti apa yang dilihat atau didengar.

4. **Asumsi**, membuat asumsi berdasarkan makna yang telah dipahami.
5. **Kesimpulan**, menarik kesimpulan dari asumsi yang dibuat.
6. **Keyakinan**, keyakinan atas kebenaran dikembangkan dari penarikan kesimpulan.
7. **Tindakan**, pengambilan tindakan yang berakar pada apa yang diyakini sebagai kebenaran.
 - Berdasarkan pemahaman terhadap Tangga Penyimpulan ini, kita dapat lebih awas (*mindful*) terhadap langkah-langkah berpikir kita. Pada setiap anak tangga, kita dapat melakukan deliberasi dengan *reflective learning* dan *reflexive loop*. Dengan demikian kita tidak terjebak dalam penyimpulan yang bias dan terbatas. Menerapkan tangga ini secara sadar membuat orang untuk mundur selangkah dan melihat ke mana ia akan melompat ke kesimpulan.

DRAFT

Lampiran Materi 3

Bias Kognitif

- Bias kognitif adalah bias sistematis dalam memandang dunia dan kehidupan pada sistem berpikir kita. Ia akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang muncul dari cara orang memproses informasi. Karena masalah atau kejadian tertentu lebih mudah dipahami daripada yang lain, individu cenderung menggunakan kejadian ini sebagai tolok ukur untuk pengambilan keputusan. Bias kognitif seringkali terkait dengan memori.
- Meskipun seringkali sangat akurat, memori seseorang juga dapat menyebabkan kesalahan dalam berpikir.
- Cara orang mengingat suatu peristiwa dapat menjadi bias karena sejumlah alasan, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang bias.
- Beberapa bias kognitif yang perlu kita perhatikan dan waspadai, antara lain:

- **Egocentric Memory**

Kecenderungan alamiah seseorang untuk ‘melupakan’ bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat dan ‘mengingat’ bukti dan informasi yang mendukung pendapatnya.

Cara mengoreksinya adalah dengan sengaja mencari bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapatnya dan secara eksplisit mengarahkan perhatian kepada bukti dan informasi ini. Ketika mencoba kemudian tidak menemukan bukti dan informasi tersebut, asumsikanlah bahwa proses mencarinya belum dilakukan secara benar.

- **Egocentric Myopia**

Kecenderungan alamiah seseorang untuk berpikir ‘absolutist’ dalam sudut pandang yang sangat sempit.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara rutin berpikir dengan sudut pandang yang berlawanan dengan sudut pandangnya. Misalnya, kalau Anda sebagai aktivis, coba berpikir sebagai pemerintah; kalau Anda sebagai wakil pemerintah, coba berpikir sebagai aktivis; kalau Anda sebagai pengusaha coba berpikir sebagai pekerja, begitu sebaliknya, dan seterusnya. Ketika Anda belum menemukan prasangka-prasangka pribadi dalam proses ini, tanyakanlah apakah Anda sudah jujur untuk mencobanya.

- **Egocentric Righteousness**

Kecenderungan alamiah seseorang untuk merasa lebih baik atau ‘superior’ karena yakin benar, padahal belum tentu benar.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara berkala mengingatkan diri betapa banyak hal yang belum kita ketahui. Cobalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang belum terjawab. Jika daftarnya terlalu pendek atau sedikit apalagi kosong, Anda perlu meragukan cara Anda bertanya.

- ***Egocentric Hypocrisy***

Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan inkonsistensi. Misalnya inkonsistensi antara kata dan perbuatan atau standar yang kita terapkan pada diri sendiri dan orang lain.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara berkala membandingkan standar yang kita terapkan pada diri sendiri dan orang lain. Jika tidak menemukan inkonsistensi dalam pikiran atau perbuatan Anda, bertanyalah apakah Anda sudah menggali lebih dalam atau tidak.

- ***Egocentric Oversimplification***

Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan memilih pandangan yang sederhana bila kompleksitas itu akan mengubah pendapat.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara rutin memfokuskan pikiran pada kompleksitas masalah dan secara eksplisit memformulasikannya dalam kata-kata. Jika Anda tidak menemukan bahwa Anda telah menyederhanakan banyak masalah penting, bertanyalah apakah Anda telah benar-benar mengonfrontasikan diri pada kompleksitas dalam masalah yang dihadapi.

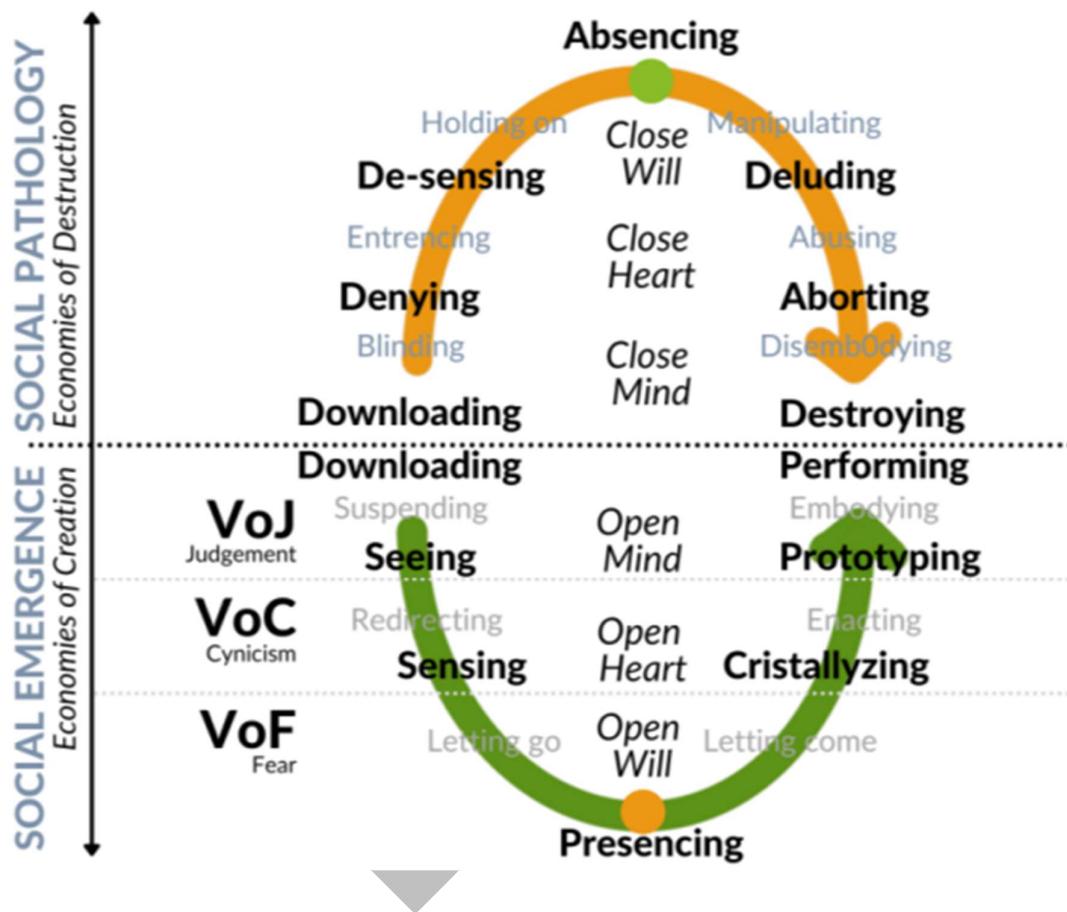
- ***Egocentric Blindness***

Kecenderungan alamiah untuk tidak memperhatikan fakta atau bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara eksplisit mencari fakta dan bukti tersebut. Bila Anda tidak mendapatkan diri Anda mengalami keresahan dalam mencari fakta dan bukti ini, maka Anda perlu bertanya apakah Anda telah secara serius menanggapi fakta dan bukti ini. Bila Anda dapat bahwa semua kepercayaan-kepercayaan Anda benar sejak awalnya, maka mungkin Anda telah secara canggih “mengelabui diri sendiri”.

Lampiran Materi 4

Tiga Suara, Tiga Keterbukaan



- Konsep Proses N dan Proses U diperkenalkan oleh profesor Otto Scharmer dari Presencing Institute – Massachusetts Institute of Technology, sebagai bagian dari U Theory dalam paradigma System Thinking. Konsep Proses U menggambarkan mekanisme optimal dalam mengelola pengalaman kehidupan kita, sedangkan Proses N menggambarkan mekanisme destruktif yang mempengaruhi kehidupan kita. Dalam sebuah sistem organisasi maupun sistem sosial politik yang lebih kompleks, Proses U dan proses N berdampak pada pengambilan keputusan dan tindakan dalam mengolah sebuah konteks persoalan, yang berujung pada kondisi sosial politik yang dihidupi.
- Scharmer meyakini bahwa sistem organisasi dan sistem sosial politik kita dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Karena itu, menjadi

sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan sistem memiliki kemampuan untuk memahami dan mengarahkan dirinya.

- Scharmer menyatakan, seringkali kita terjebak dalam sikap reaktif menghadapi sebuah situasi atau persoalan. Dari titik mengunduh (*downloading*) informasi terkait sebuah konteks, kita langsung menggunakan untuk mengambil keputusan, tanpa proses mengolah informasi dengan deliberatif dan mendalam. Proses ini tidaklah efektif karena proses pemaknaan kita atas informasi awal dapat terperangkap oleh bias kognitif dalam tangga penyimpulan (*ladder of inference*).
- Untuk melepaskan diri dari perangkap reaktif dan Proses N, kita memerlukan tiga instrumen yaitu *Open Mind* (membuka pikiran), *Open Heart* (membuka hati), dan *Open Will* (membuka tekad/ niatan). Namun ketiga hal ini tidaklah mudah karena ada 3 Suara (*3 Voices*) Resistensi yang menghambat, yaitu *Voice of Judgement*, *Voice of Cynicism*, dan *Voice of Fear*.
- Secara spontan, kita akan melakukan proses *downloading* (mengunduh) informasi pada saat menghadapi sebuah situasi atau persoalan. Seringkali, kita terjebak untuk langsung memaknainya sesuai dengan pengalaman yang membentuk Realita Internal kita. Kita mengunduh dan mendengar berdasarkan kebiasaan lama. Untuk mencegahnya, kita perlu *Open Mind* untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini, kita dapat memperluas wawasan kita dan mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai konteks tersebut. Pada tahap ini, seseorang biasanya menghadapi penghambat berupa *Voice of Judgment* (VOJ) atau suara penghakiman, di mana pikiran kita dipenuhi oleh prasangka terhadap persoalan dan pihak-pihak yang terlibat. *Voice of Judgement* membuat kita terjebak dalam wawasan yang sempit, memaksakan sudut pandang kita sendiri, dan lalu terjebak dalam sikap menilai bahkan merendahkan orang lain. Sebagai contoh, kita masih kerap menjumpai pandangan yang menganggap perempuan tidak bisa menjadi CEO perusahaan karena kejumudan proses berpikir, terjebak pada penghakiman seperti perempuan lebih emosional daripada laki-laki, perempuan tidak mampu memimpin, dan seterusnya. Tetapi bila kita berhasil membangun kebiasaan untuk membuka pikiran, maka kita akan mampu memetakan konteks dengan lebih jernih dan siap masuk ke tahap selanjutnya yaitu *Membuka Hati* (*Open Heart*).
- *Open Heart* adalah kapasitas kita untuk berempati dan menempatkan diri kita pada posisi pihak-pihak lain dalam konteks yang sedang kita garap. Kita mampu memandang dari sudut yang berbeda dengan ketulusan iktilad dan sikap welas asih untuk mencari titik temu. Untuk dapat mencapai titik ini, kita perlu melewati Hambatan Kedua yaitu *Voice of Cynicism*, yaitu suara-suara sinis dalam diri kita yang membuat kita terjebak dalam sentimen negatif terhadap pilihan dan pandangan kelompok atau orang yang berbeda.

Kita merasa kita yang paling benar, dan kesulitan untuk berempati pada posisi orang lain yang membuat mereka membuat pilihan yang berbeda. Bila kita mampu mengabaikannya, kita akan mampu melakukan dialog yang reflektif antara berbagai pihak. Melanjutkan contoh di atas, Open Heart membuat kita melihat hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang idealnya saling memberdayakan, bukan saling mengalahkan, karena kita mampu memandang dari posisi yang berbeda. Kemampuan untuk bersikap tulus memberikan ruang kesadaran bahwa sistem sosial kita masih perlu memberikan afirmasi kepada para perempuan untuk dapat menjadi pemimpin pada level tinggi.

- Dari dialog reflektif yang empatik dan tulus, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan beberapa titik temu dan dapat mulai menyusun langkah-langkah solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Namun kita harus dapat melawan suara resistensi terakhir yaitu *Voice of Fear*. Suara ini menghambat kita dengan keengganahan melepas cara-cara lama atau mengambil cara-cara baru. Ia memerlukan kita untuk membangun hubungan dan berinteraksi secara terbuka kepada orang atau kelompok lain. Kita merasa takut untuk memulai, takut untuk mencoba, takut gagal dan terluka, dan seterusnya. Kita bisa melawannya dengan mengelola *holding space* (ruang jeda) yang membantu kita mengikhlaskan hal-hal usang yang menghambat dan menyongsong hal baru yang lebih baik. Kita bisa menemukan prinsip ini dalam tradisi masyarakat pesantren, yaitu *al-muhafadzah ala al-qadim wa akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan tradisi lama yang baik dan menyerap hal-hal baru yang lebih baik). Tahap ini disebut sebagai tahap dialog generatif dan membutuhkan sikap *Open Will* atau kapasitas membuka tekad/ niatan yang besar. Dalam contoh CEO perempuan, *Voice of Fear* memunculkan sentimen takut bila organisasi mengalami kemunduran, dan ini dilawan dengan Tekad Kuat untuk bekerjasama secara sinergis.
- Dengan membangun kebiasaan baru untuk *Open Mind*, *Open Heart*, dan *Open Will*, kita akan dapat menjalani proses mengolah konteks kerja dan hidup kita dengan lebih baik dan efektif. Kita juga dapat membangun kehidupan sosial politik kita dengan nilai-nilai luhur yang kita butuhkan sebagai fondasi kemaslahatan bersama.

BAB V **SKETSA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA¹⁸**

A. Pengantar

Apakah Moderasi Beragama perlu? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan, bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tapi tidak jarang juga karena kesalahpahaman.

Untuk memahami urgensi Moderasi Beragama, kita perlu melihat dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini. Dengan melihat dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini, kita akan menemukan menguatnya fenomena eksklusivisme beragama (*religious exclusivism*), intoleransi dan ekstremisme kekerasan keagamaan (*religious violent extremism*), serta merebaknya narasi keagamaan yang menghadap-hadap antara kesetiaan terhadap agama dan kesetiaan terhadap negara.

B. Tujuan

- Meningkatkan pemahaman peserta tentang peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia.
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang kasus-kasus intoleransi, ekstremisme kekerasan dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- Menyadari pentingnya Moderasi Beragama sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Membangun kesadaran untuk merespons situasi keberagamaan di Indonesia saat ini.
- Melakukan *positioning* atau kalibrasi diri dengan kebutuhan bangsa.

C. Pokok Bahasan

- Situasi umum kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini.
- Fenomena eksklusivisme beragama, intoleransi dan ekstremisme keagamaan.
- Dua arus paradigma praktik keberagamaan: substantif-inklusif versus eksklusif-legal formalistik.
- Skenario masa depan Indonesia berdasarkan situasi kehidupan keberagamaan saat ini.
- Pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan.

¹⁸ Materi ini bisa disampaikan oleh ahli dari luar Tim Fasilitator/Trainer.

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Scenario thinking melalui Diskusi kelompok

E. Waktu

180 menit (4 jam pelatihan)

F. Pralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Solatip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	Pengantar: Instruktur Nasional membuka kelas dan menjelaskan bahwa sesi ini bertujuan untuk memahami dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini dan mengapa kita memerlukan Moderasi Beragama.
2	30 menit	Paparan Sketsa Kehidupan Keberagamaan: 1. Instruktur Nasional memaparkan Materi Sketsa Kehidupan Keberagaman. Instruktur Nasional menayangkan Bahan Tayang Sketsa Kehidupan Keberagaman
3	30 menit	Tanya Jawab: Instruktur Nasional mempersilakan peserta bertanya, merespons, atau mengklarifikasi materi presentasi. Terkait dengan definisi dan pengertian-pengertian yang biasanya sering ditanyakan seperti eksklusivisme beragama, radikalisme, atau

		ekstremisme, Instruktur Nasional dapat merujuk daftar istilah dalam Lampiran Materi ini.
3	70 menit	<p>Scenario (<i>If What</i>) Thinking:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membagi forum menjadi empat kelompok dengan aktivitas scenario (<i>what if</i>) thinking. 2. Instruktur Nasional memberi dua kasus: intoleran-eksklusif dan toleran-inklusif. <p>Instruktur Nasional memberi dua studi kasus seperti disediakan dalam Lampiran Materi. Instruktur dapat memilih dua kasus yang sejenis yang dianggap relevan dengan latar belakang peserta</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instruktur Nasional meminta setiap peserta mendiskusikan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bila fenomena tersebut dibiarkan tumbuh apa yang terjadi di masa depan (10 tahun ke depan)? • Jika tidak ada intervensi, apakah ada kemungkinan kondisi berubah? Tapi, bukan karena ada intervensi. Memikirkan gelembung (misalnya pemilihan presiden). <p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang Latihan Scenario Thinking</p> <p>Catatan. Peserta diminta menjawab pertanyaan di atas berdasarkan pandangan umum (<i>common sense</i>) semata. Tidak perlu menyusun kondisi ideal dan solusinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Instruktur Nasional meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 5. Instruktur Nasional memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi paparan hasil diskusi kelompok yang sedang dipaparkan.
4	40 menit	<p>Refleksi: Urgensi Moderasi Beragama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menegaskan bahwa sesi ini tidak akan membahas lebih dalam tentang substansi materi (kasus yang didiskusikan dalam kelompok), melainkan praktik berpikir. 2. Instruktur Nasional menjelaskan empat hal yang membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara:

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Kebijakan publik dan perilaku penyelenggara negara ○ Perilaku warga masyarakat ○ Kekuatan kelompok-kelompok masyarakat sipil. ○ Paham keagamaan <p>Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Sketsa Kehidupan Keberagaman “Mengapa Bisa Menghambat”.</p>
5	5 menit	<p>Penutup: Instruktur Nasional menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.</p>
180 menit		

H. Lampiran Materi

1. Hasanudin Ali, “Konteks Kehidupan Keberagamaan Umat Islam Indonesia” 2021
2. Daftar Istilah
3. Lembar Studi Kasus
4. Substantif-Inklusif versus Eksklusif-Legal Formalistik.

I. Bahan Tayang

1. Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia
2. Latihan Scenario Thinking

Lampiran 1



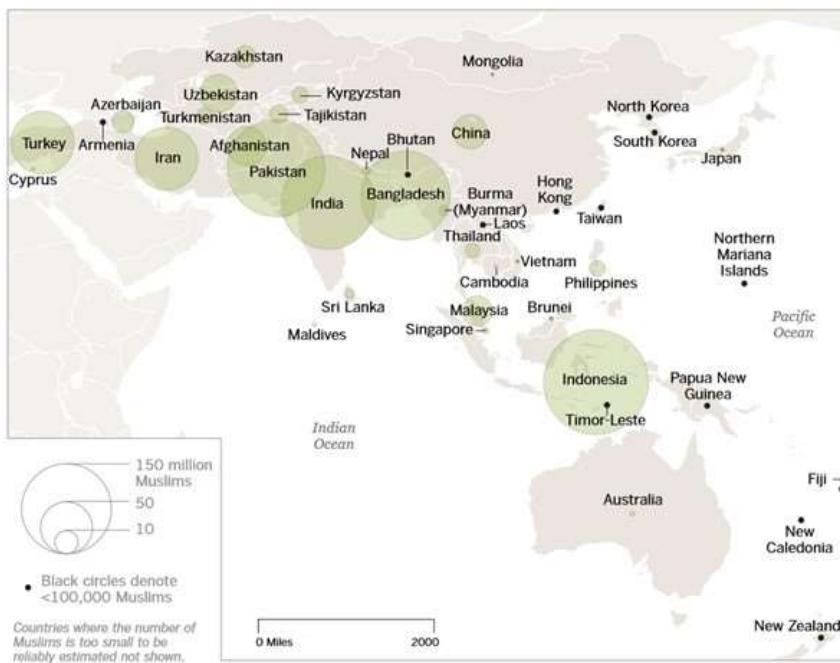
Konteks Kehidupan Keberagamaan Umat Islam Indonesia

Hasanuddin Ali

Jakarta, April 2021

Indonesia saat ini adalah penduduk dengan populasi umat Islam terbesar di dunia

POPULASI MUSLIM DUNIA

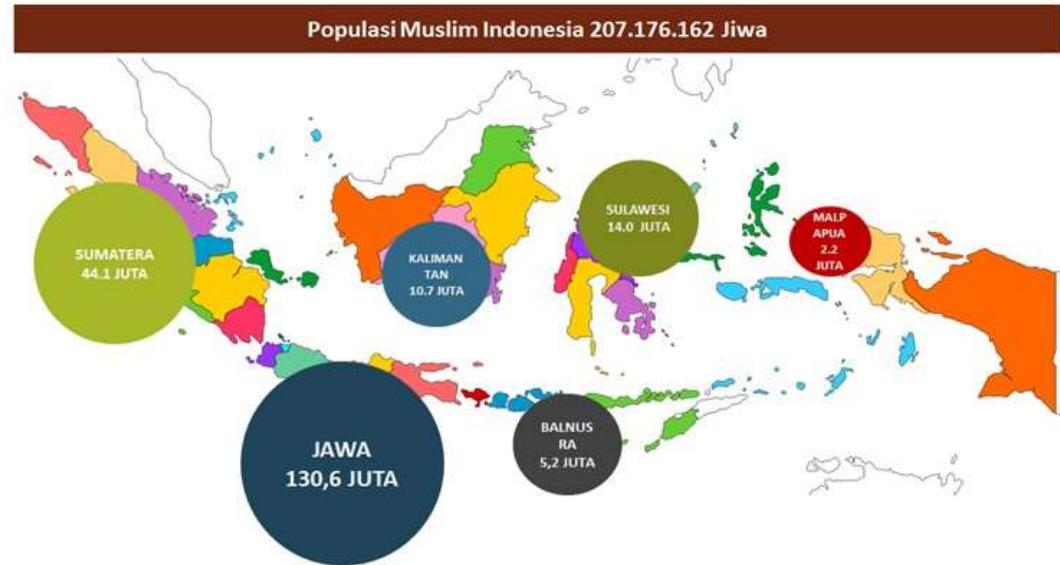
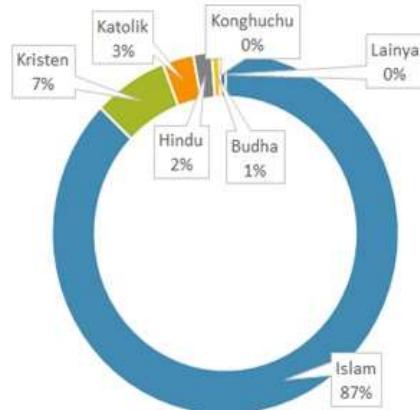


- Populasi penduduk dunia menurut *Pew Research Center* pada tahun 2010 mencapai 6,8 miliar jiwa Prediksi tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *World Bank*, yang menyatakan bahwa populasi penduduk dunia pada 2010 mencapai 6,9 miliar jiwa
- Indonesia saat ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pada tahun 2010 Indonesia menyumbang 13,07% penduduk Muslim dunia
- Populasi Muslim Indonesia saat ini, secara jumlah berada pada satu kluster dengan Pakistan, Bangladesh, dan India. Sedangkan negara dengan jumlah Muslim terbesar berikutnya ialah Turki dan Iran

Sumber, Pew Research Center, 2015

87% penduduk Indonesia beragama Islam, sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumanter

POPULASI MUSLIM INDONESIA

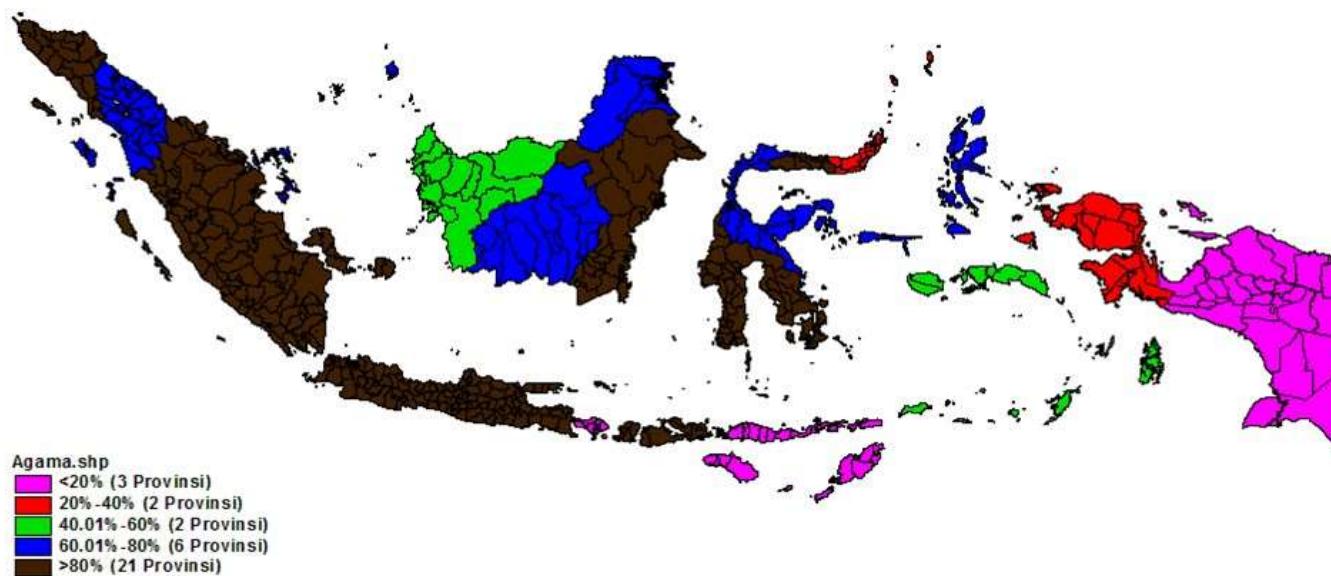


- Badan Pusat Statistik (BPS), dalam sebuah laporan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, menyatakan bahwa 87,18% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Sisanya adalah penganut agama lain seperti Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, dan Budha serta Konghuchu yang jumlahnya kurang dari 1%.
- Jika dihitung secara jumlah, maka populasi pemeluk Islam di Indonesia tahun 2010 mencapai 207,176 juta jiwa, kemudian pemeluk Kristen 16,528 juta jiwa, pemeluk Katolik 6,907 juta jiwa, pemeluk Hindu 4,012 juta jiwa, pemeluk Budha 1,703 juta jiwa, dan pemeluk Konghuchu 117.091 jiwa.

Sumber, BPS, Sensus Nasional, 20110

Penduduk muslim yang besar berasal dari provinsi-provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

POPULASI MUSLIM INDONESIA TIAP PROVINSI



Sumber : BPS 2015

Sumber, BPS, Sensus Nasional, 2010

Indonesia masa depan akan didominasi oleh tiga entitas, masyarakat urban, kelas menengah, dan milenial

STRUKTUR DEMOGRAFI INDONESIA YANG BERUBAH

PERUBAHAN STRUKTUR DEMOGRAFI INDONESIA (3)

Dari berbagai gejala tersebut, dapat disimpulkan kondisi demografi penduduk Indonesia akan didominasi oleh

- (1) **kelompok urban**, yakni mereka yang tinggal di daerah perkotaan.
- (2) **Kelompok middle-class**, yakni mereka yang memiliki pengeluaran \$5-\$10 per hari.
- (3) **Kelompok millennials**, yakni mereka yang saat ini berusia 17-34 tahun.

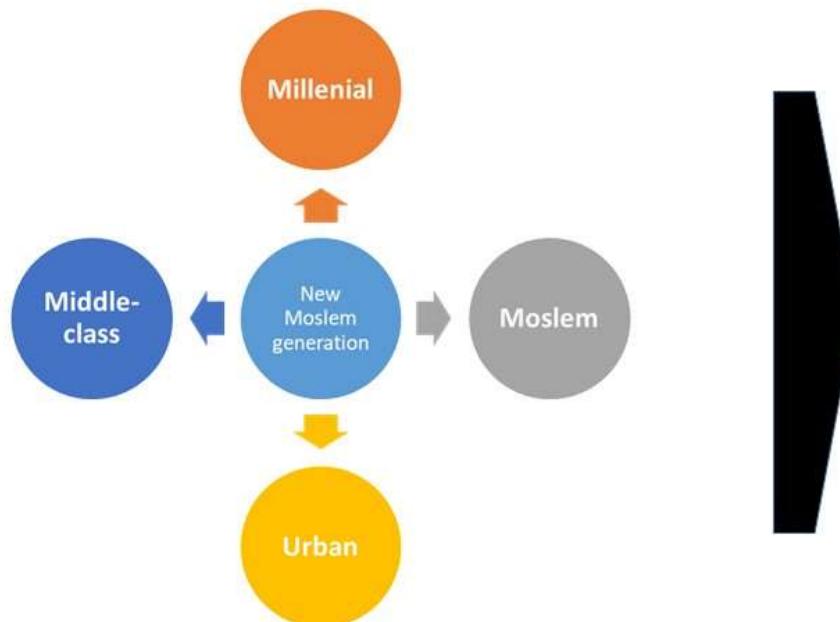
Oleh karena itu, pemimpin Indonesia ke depan harus memahami perubahan 3 karakter penduduk Indonesia tersebut.

TREN PENDUDUK INDONESIA DI MASA DEPAN



Muslim Indonesia juga akan menghadapi tumbuhnya generasi baru muslim yang jumlahnya mencapai 30 juta ditahun 2020

URBAN MIDDLE-CLASS MILLENNIAL MOSLEM



Estimasi populasi generasi muslim baru



Jumlah generasi muslim baru di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 35 juta jiwa dengan asumsi penduduk muslim mencapai 87%.

6

Mereka memiliki karakter tech savvy, religious, modern, dan memiliki daya beli yang tinggi

KARAKTER URBAN MIDDLE-CLASS MILLENNIAL MOSLEM



Merupakan generasi millenial muslim kelas menengah urban: Mereka berusia 18-35 tahun



Sumber: Gen M, Yuswohady, Iryan H, Hasanuddin Ali, 2017

RITUAL KEAGAMAAN DAN KEORMASAN

8

Secara umum, mayoritas umat Islam Indonesia berpendapat bahwa agama sangat penting bagi kehidupan mereka sehari-hari

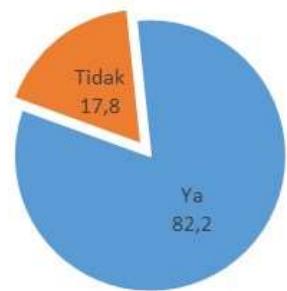
TINGKAT KEPENTINGAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN [%]

	80,2	AREA						GENERASI				
		Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Malpapua	Sulawesi	GenZ	Younger Millennial	Older Millennial	Younger GenX	Older GenX
Sangat Penting	80,2	85,6	78,0	54,5	90,7	80,0	86,4	77,4	80,9	82,2	81,6	81,8
Penting	19,1	13,7	21,6	38,6	9,3	15,0	12,6	21,8	18,2	17,4	17,5	17,7
Tidak Penting	0,4	0,7	0,4	0,4	0,3	0,4	0,9	.
Sangat Tidak Penting	0,3	.	.	6,8	.	5,0	1,0	0,4	0,6	.	.	0,5

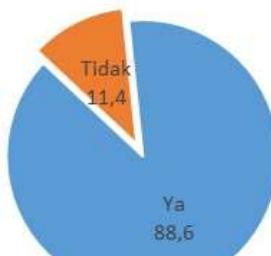
Mayoritas responden melakukan tahlilan, qunut subuh, ziarah kubur, Maulid Nabi, Tarawih dengan 11 rakaat dan penentuan hari besar Islam dengan Rukyatul Hilal.

RITUAL KEAGAMAAN [%]

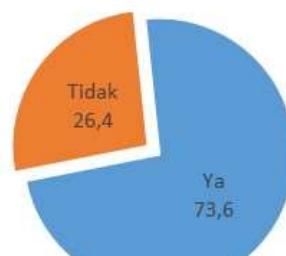
TAHLILAN ?



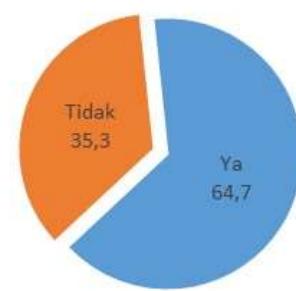
MAULID NABI ?



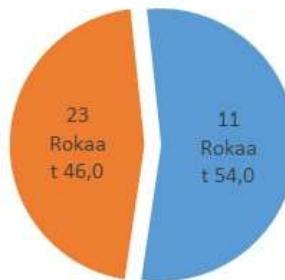
QUNUT SUBUH?



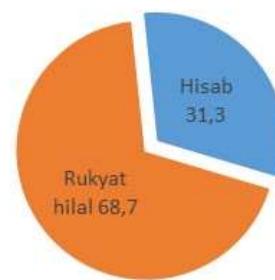
ZIARAH KUBUR ?



SHOLAT TARAWIH ?



PENENTUAN HARI BESAR ISLAM?

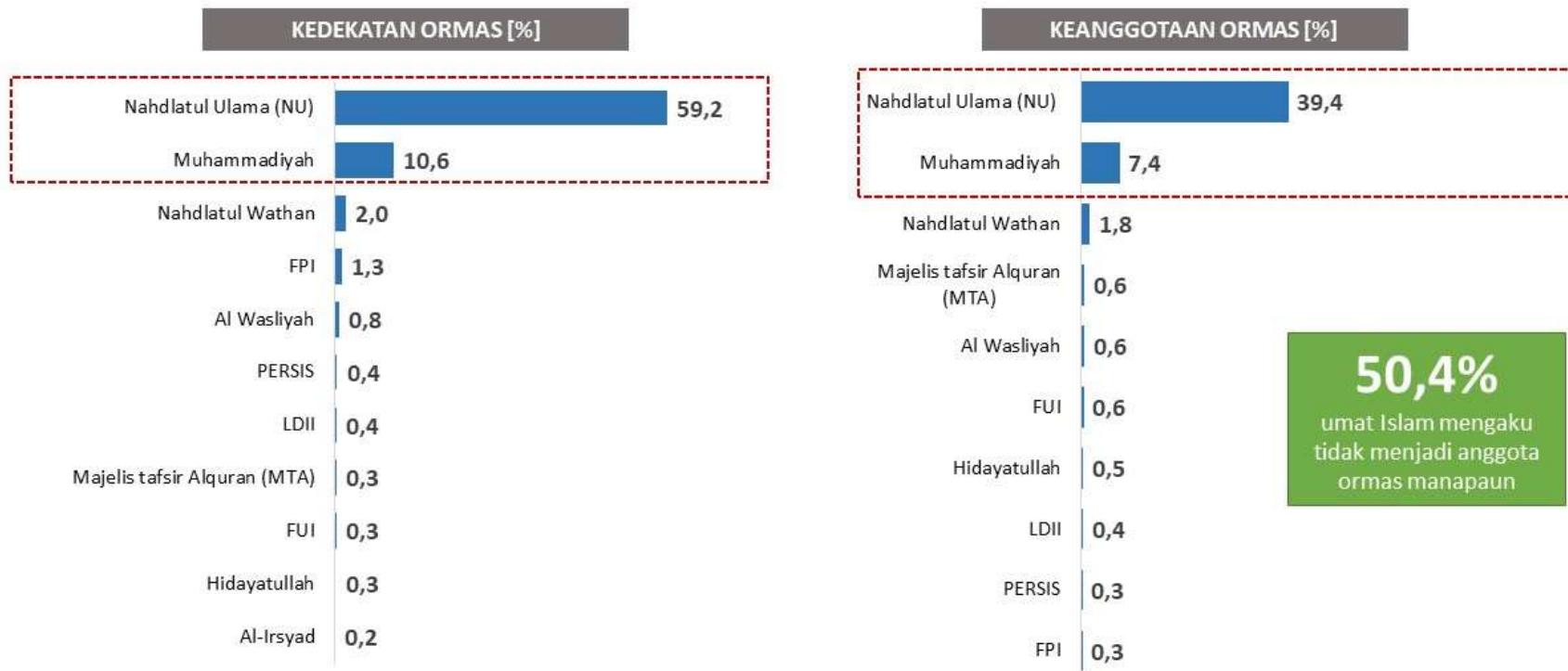


N: 1401

F5. Terkait ritual keagamaan, ritual keagamaan apa yang biasa anda lakukan? (%)

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua ormas yang paling dekat serta paling banyak menjadi anggotanya dibanding ormas yang lain.

KEDEKATAN DAN KEANGGOTAAN ORMAS [%]



- F1. d. Di antara ormas tersebut, manakah yang paling dekat dengan Anda ? (S)
e. . Manakah Ormas Islam yang Anda menjadi anggotanya? (S/M)

Sumber informasi keagamaan sebagian besar diperoleh dari ustaz dan keluarga, namun bagi generasi yang lebih muda sumber informasi yang berbasis internet juga tinggi

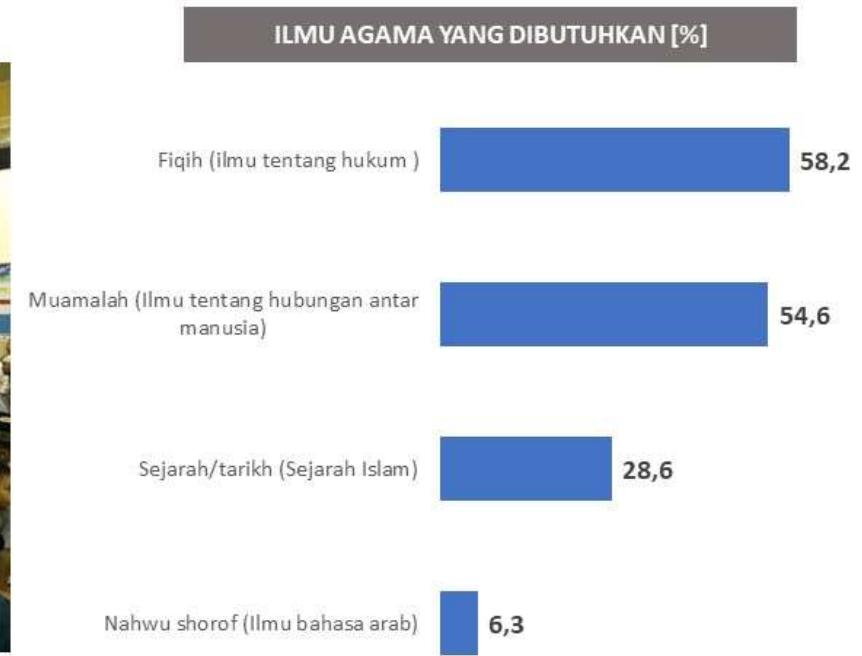
SUMBER INFORMASI KEAGAMAAN [%]



12

Ilmu Fiqih (58,2%) dan Muamalah (54,6%) banyak dibutuhkan oleh mayoritas responden, diikuti Ilmu Sejarah Islam (28,6%).

ILMU AGAMA YANG DIBUTUHKAN



N: 1567

F10. Ilmu keagamaan apakah yang saat ini Anda butuhkan? (S/M)

13

Kompetensi penguasaan ilmu agama merupakan faktor terpenting dalam memilih ustaz rujukan

FAKTOR PERTIMBANGAN UTAMA MEMILIH USTADZ



SIKAP TOLERANSI BERAGAMA

15

Secara Generasi, Gen Milennial meskipun banyak yang menerima dengan terbuka, namun prosentase yang membatasi pergaulan dengan tetangga beda agama lebih besar dibandingkan dengan generasi yang lain .

TETANGGA BEDA AGAMA – by GENERASI

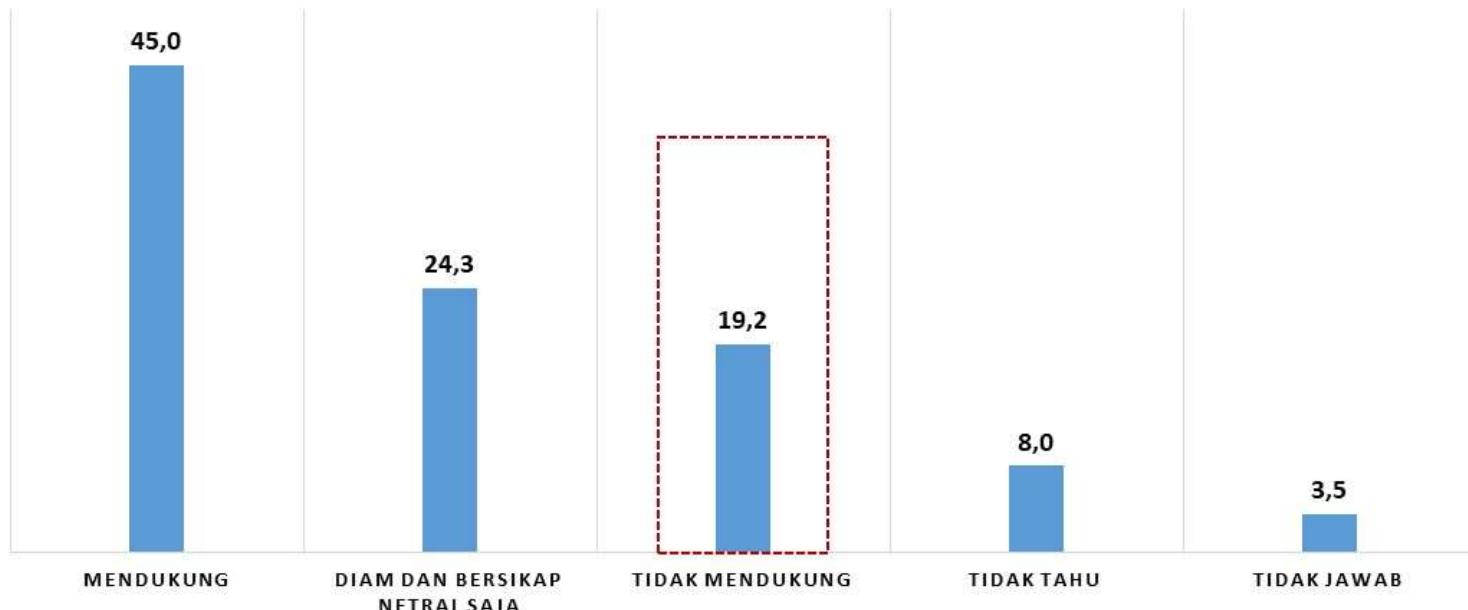


E7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana menurut anda apabila bertetangga yang berbeda agama dengan anda? (5)

16

Mayoritas responden mendukung apabila ada pembangunan tempat ibadah agama lain, untuk yang tidak mendukung hanya 19,2%.

PERSEPSI TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH AGAMA LAIN [%]



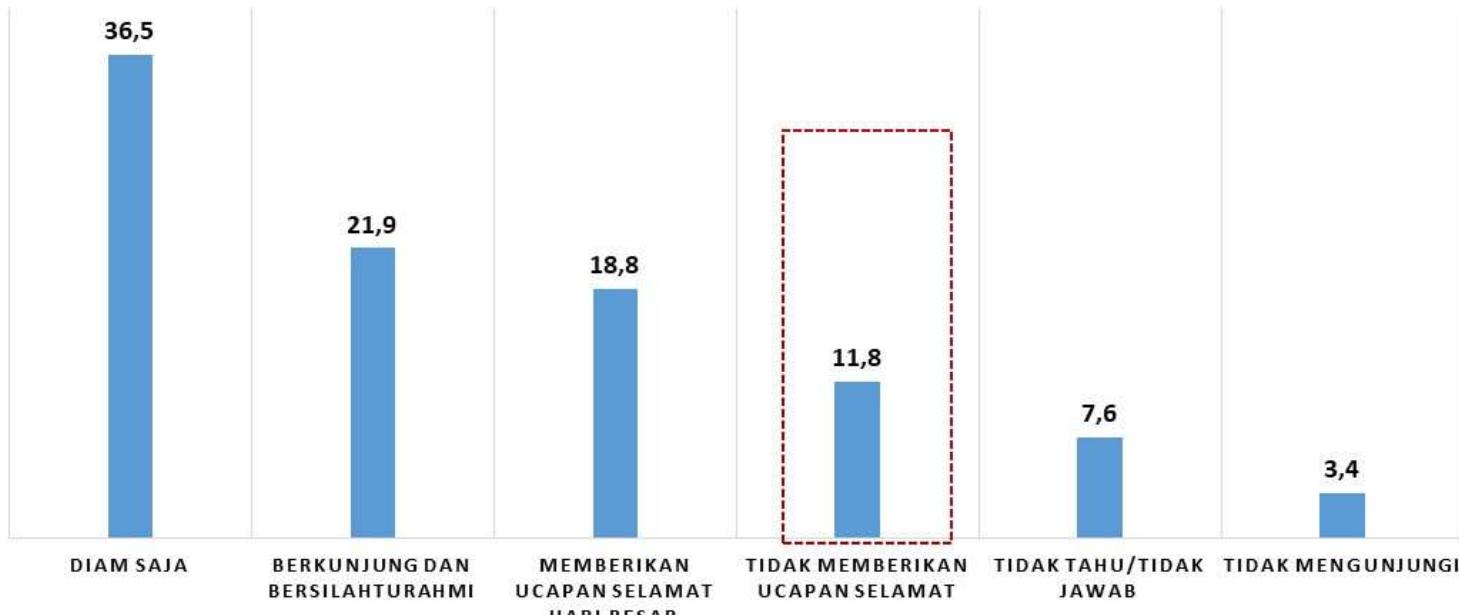
N: 1566

F17. Apakah Anda mendukung bila daerah ini didirikan rumah ibadah agama lain, yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah ?(S)

17

Secara umum, respon 36,5% muslim Indonesia terhadap tetangga yang merayakan hari besar agamanya akan memilih diam saja, dan bahkan yang tidak mengucapkan selamat ada 11,8%.

PERSEPSI TERHADAP TETANGGA MERAYAKAN HARI BESAR AGAMANYA [%]



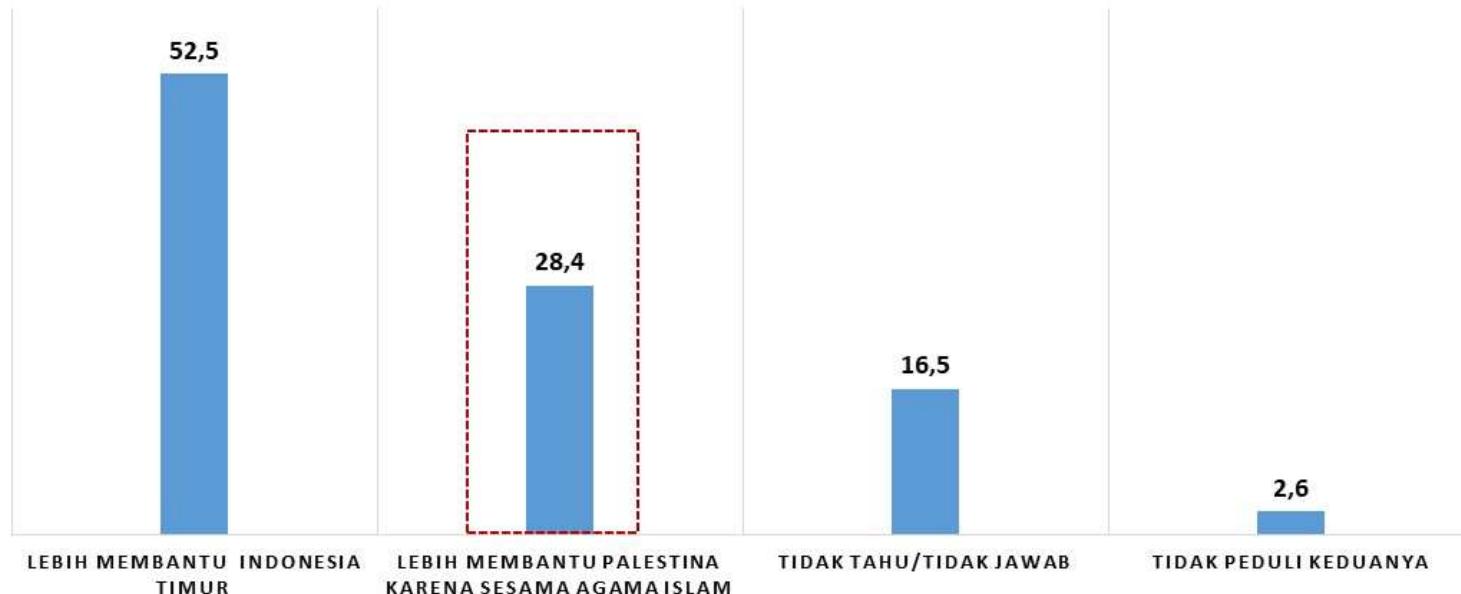
N: 1566

F18. Apa yang Anda lakukan bila adatetangga yang berbeda agama merayakan hari besar agamanya? (S)

18

Jika muslim Indonesia diberi pilihan membantu bencana alam di Palestina atau di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non muslim, terdapat 28,4% lebih memilih membantu Palestina dan 16,5% yang tidak menjawab.

INDONESIA TIMUR VS PALESTINA [%]



N: 1566

F15. Bila ada bencana alam di Palestina dan bencana alam di Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam, siapapun akan Anda bantu? (S)

19

Mayoritas responden melihat bahwa Ahmadiyah (36,7%), Syiah (31%) dan HTI (22,2%) adalah tiga aliran teratas yang dianggap menyimpang.

ALIRAN MENYIMPANG [%]



ALIRAN MENYIMPANG [%]



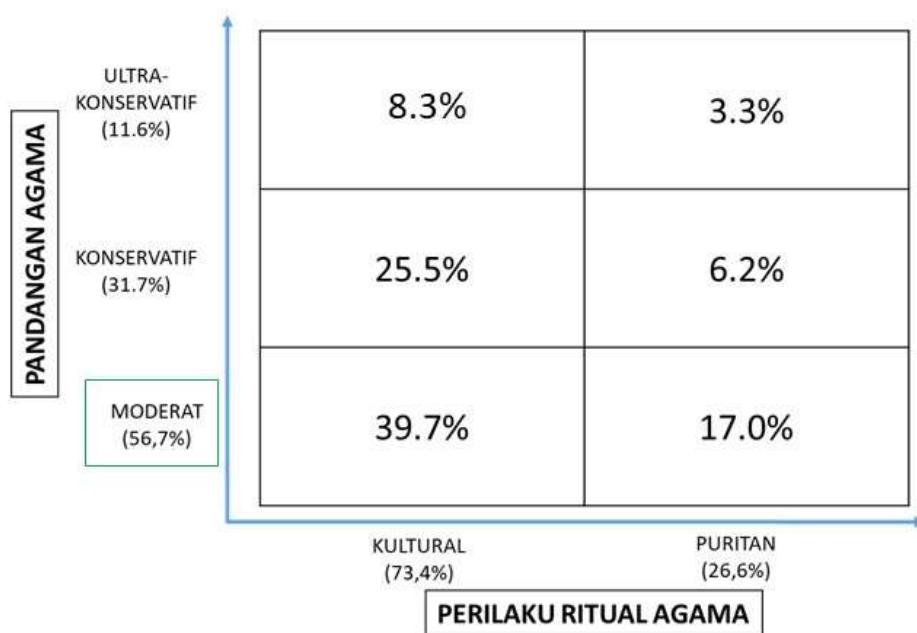
F24. [SWOCARD] Manakah yang menurut Bapak/Ibu/Saudara aliran yang menyimpang? (S/M)

N: 1566

20

Mayoritas umat Islam Indonesia masih Moderat (56,7%), namun perlu juga diwaspadai adanya 11,6% muslim yang berada pada kategori Ultra-konsertatif.

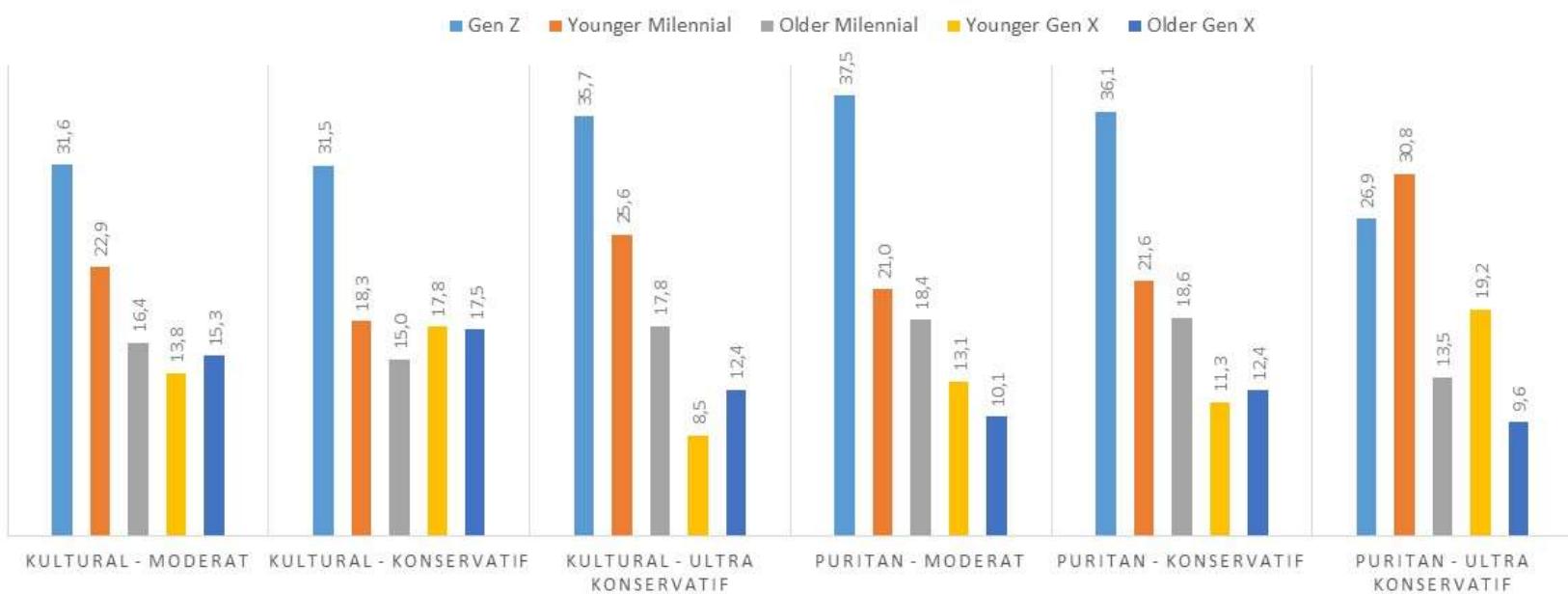
TIPOLOGI KEAGAMAAN(PANDANGAN & PERILAKU AGAMA)



- Tipologi Kultural-Moderat, secara generasi 45,6% adalah Gen Older Milenial dan Gen X dan 64.3% berasal dari Jawa.
- Tipologi Puritan-Moderat, secara generasi 58.4% adalah GenZ dan Younger Milenial X dan 68.2% berasal dari Jawa.
- Tipologi Puritan-Ultra Konservatif, secara generasi 57.7% adalah GenZ dan Younger Milenial dan 40.0% berasal dari Sumatera.

Pada kategori Ultra Konservatif yang perlu diwaspadai ini, Tipologi Puritan – Ultra Konservatif paling besar berasal dari generasi milenial muda

PROFIL TIPOLOGI KEAGAMAAN BERDASARKAN GENERASI





KEY-INSIGHT

- Agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim Indonesia, baik kehidupan yang bersifat *duniawi mapun ukhrowi*. Semangat keagamaan yang tinggi ini tidak hanya terjadi kalangan muslim dewasa dan tua tapi juga dikalangan muslim muda. Ini kemudian melandasi semangat “hijrah” yang sedang menjadi trend saat ini.
- Semangat keagamaan yang tinggi ini pula tercermin juga dari semangat mereka dalam menjalankan perintah agama baik ibadah yang bersifat wajib maupun sunnah. Ritual keagamaan yang dijalankan umat Islam Indonesia mayoritas adalah ritual keagamaan tradisi yang sudah dijalankan turun temurun yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu.
- Islam Moderat masih menjadi *mainstream* ormas-ormas Islam di Indonesia. Hal ini tercermin dari NU dan Muhammadiyah yang merupakan dua ormas yang paling banyak dikenal oleh mayoritas responden baik secara area maupun generasi. Secara kedekatan dan keanggotaan, mayoritas responden lebih dekat dan mengaku sebagai anggota dari NU serta Muhammadiyah, begitu juga dilihat secara area, keanggotaan NU banyak terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Maluku, sedangkan Muhammadiyah banyak terdapat di Sulawesi.
- Tingkat toleransi umat Islam Indonesia terbilang masih cukup baik, meskipun terdapat resistensi yang cukup tinggi terhadap penerimaan terhadap pemimpin non-muslim di kepemimpinan publik di berbagai tingkatan.
- Secara tipologi keagamaan di Indonesia masih banyak umat Islam Indonesia yang masuk kategori kultural-moderat namun kita perlu mewaspada mereka yang masuk kategori Puritan-Ultra Konservatif, hal ini banyak terdapat di wilayah Sumatera dan Sulawesi serta banyak terdapat di Gen Z dan Milennial muda.

23

Lampiran Materi 2

Daftar Istilah

Eksklusivisme beragama: Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan.

Intoleransi: Pandangan dan sikap yang tidak menyukai, memusuhi, dan secara sengaja mengganggu kelompok lain yang berbeda suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, jenis kelamin, dan disabilitas.

Ekstremisme beragama: keyakinan dan/atau praktik beragama ultra-konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan.

Ekstremisme kekerasan: Keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan politik, agama, sosial, maupun ekonomi.

Terorisme: Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Radikalisme: pandangan dan/atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan/atau melawan hukum.

Radikalisme Beragama: Keyakinan dan/atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan/atau melawan hukum.

Lembar Studi Kasus

Perumahan Eksklusif



Saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama.

Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, Sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya: tak ada musik; shalat harus berjemaah; mengaji harus di masjid perumahan; perempuan tidak boleh keluar malam; dsb.

Lembar Studi Kasus

Persahabatan Gereja-Masjid Magelang



Di beberapa daerah, ada beberapa bangunan rumah ibadah yang berdiri secara berdekatan, bahkan di atas lokasi yang sama dan berbagi halaman. Dalam situasi kehidupan keagamaan yang harmonis antar-kelompok agama, perhelatan di satu rumah ibadah dilaksanakan dalam situasi damai dan saling dukung.

Misalnya, Gereja Katolik Keuskupan Semarang menyelenggarakan kegiatan Pentakosta di Sawangan Muntilan. Kegiatan ini seperti panggung budaya dengan mengundang tokoh-tokoh agama lain. Karena dilakukan saat Bulan Ramadhan dan lokasi gereja berdampingan dengan masjid, pihak gereja “meminta ijin” ke pihak masjid, dan pihak masjid mempersilikannya.

Panitia gereja menyediakan takjil berbuka puasa bagi kaum Muslim di masjid. Tapi takjil terlambat diantarkan karena pihak masjid sengaja tidak menggunakan pengeras suara saat azan Maghrib. Mereka mengajak Jaringan Gusdurian terlibat. Semula panitia ragu untuk menyelenggarakan. Panitia Pentakosta mendatangi masjid dan menanyakan mengapa azan tak berkumandang. Pengelola masjid mengatakan mereka sengaja tidak menyalakan pelantang suara luar, tapi hanya untuk dalam masjid. Alasan mereka karena gereja sedang ada acara.

Lampiran 4

SUBSTANTIF-INKLUSIF VERSUS LEGAL EKSKLUSIF

Dalam paradigma pemikiran politik Islam yang substantif-inklusif, secara umum ditandai dengan keyakinan bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada pemikiran substantif-inklusif ada empat. Pertama, adanya kepercayaan yang tinggi bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detil-detil pembahasan terhadap setiap obyek permasalahan kehidupan.

Argumen utama dari pendukung paradigma ini adalah, bahwa tak ada satu pun dari ayat Al Qur'an yang menekankan bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an memang memuat kandungan etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, termasuk bagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain-lain.

Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara. Tetapi seperti halnya para nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebijakan Dengan demikian misi Nabi Muhammad tidak perlu diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau sistem pemerintahan tertentu.

Meminjam ungkapan pemikir Mesir Husain Fawzi al-Najjar, concern utama Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam (*al-wihda al-ijtimai*) daripada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan. Kenyataan kemudian terbukti bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, diperlukan waktu beberapa hari untuk melakukan musyawarah dan memutuskan siapa penggantinya, yang kemudian terpilih Abu Bakar. Sementara pergantian kepemimpinan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya melalui sistem dan mekanisme yang berbeda.

Ketiga, para proponen paradigma substantif-inklusif berpendapat bahwa syari'at tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula syari'at tidak berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem politik. Karena Islam dipandang semata-mata sebagai agama dan bukan hanya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara, syari'at seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam. Menurut Al-Ashmawi, mantan hakim agung Mesir yang juga dikenal sebagai pemikir progresif Islam terkemuka, bahkan Al-Qur'an sendiri menetapkan bahwa syari'at adalah sumber dari orientasi etika Islam dan tidak berhubungan dengan ajaran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara.

Syari'at adalah sebuah jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis dan membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi etis yang mulia.

Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantif-inklusif dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (*Islamic injunctions*) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam

penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam yang intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanyalah satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar supaya Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya politisasi.

Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, paradigma legal-eksklusif dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia. Para pendukung paradigma legal-eksklusif sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari “tiga d”: *din* (agama), *daulah* (negara), dan *dunya* (dunia). Konsekuensinya, seperti dikemukakan oleh Nazih Ayubi, paradigma ini didisain untuk mengaplikasikan semua aspek kehidupan, mulai dari soal remeh temeh masalah keluarga hingga menjangkau semua permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Kedua, dalam realitas politik, pendukung paradigma legal-eksklusif mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mendirikan negara Islam. Paradigma ini menghendaki agar umat Islam selalu menjadikan kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*khulafa ar-rasyidun*) dalam mengatur tatanan kemasyarakatan, dijadikan sebagai referensi utama dan modal untuk mewujudkan “negara Islam yang ideal”, dan menganjurkan penolakan sistemik terhadap konsep-konsep politik Barat. Akibatnya, paradigma ini mendorong umat Islam untuk memperkuat identitas dan ideologi mereka sebagai “alternatif” terhadap sistem-sistem yang dipandang sebagai bertentangan dengan Islam.

Ketiga, para pendukung paradigma ini meyakini bahwa syari’at harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama, negara, dan dunia tersebut. Syari’at dengan demikian diinterpretasikan sebagai Hukum Tuhan (*Divine Law*), dan harus dijadikan sebagai dasar dari negara dan konstitusinya, serta diformalisasikan ke dalam seluruh proses pemerintahan, dan menjadi pedoman bagi perilaku politik penguasa. Selanjutnya, paradigma ini juga menegaskan adanya kedaulatan rakyat, tetapi lebih yakin terhadap kedaulatan Tuhan, yang implementasinya harus didukung oleh syari’at. Konsekuensinya, paradigma ini menerapkan visi dan misi yang menegaskan dan mewajibkan setiap Muslim untuk menegakkan syari’at, apa pun yang akan terjadi, sebagai alternatif terhadap sistem-sistem dunia yang berlaku.

Keempat, dalam konteks politik paradigma legal-eksklusif menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (*imagined Islam polity*); seperti mewujudkan suatu “sistem politik Islam,” munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendukung

paradigma legal-eksklusif sangat menekankan ideologis atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal.

Sumber: M. Syafi'i Anwar, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid," dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Wahid Institute, 2006), xix-xxii.

DRAF

BAB VI

ANALISIS SOSIAL DENGAN PERANGKAT ANALISIS GUNUNG ES

A. Pengantar

Ketika memahami fenomena sosial, sebagian besar kita cenderung terjebak pada apa yang tampak di permukaan. Kecenderungan seperti ini membuat kita gagal memahami struktur dan mental model yang menjadi sumber lahirnya fenomena tersebut.

Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis sosial-keagamaan dengan menggunakan instrumen Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*). Peserta diajak menyelam ke dalam untuk memahami pola-pola di balik sebuah peristiwa untuk menemukan apa saja polanya, struktur sosial-budaya-politik yang melahirkannya, dan mental model yang menjadi sumbernya.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

- Memahami berbagai fenomena keagamaan saat ini: eksklusivisme beragama (*religious exclusivism*), eksklusivisme (*exclusivism*), ekstremisme kekerasan (*violent extremism*).
- Mampu melakukan analisis pola, struktur, dan cara pandang yang menjadi penyebab situasi keberagamaan saat ini.

C. Pokok Bahasan

- Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)
- Praktik analisis fenomena, pola, struktur dan paradigma/cara pandang (mental model) yang menjadi penyebab situasi keberagamaan saat ini

D. Metode

- Ceramah
- Tanya jawab dengan mentimeter
- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Curah pendapat (*brainstorming*)
- Praktik Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)

E. Waktu

180 menit (4 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Komputer/Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan

- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menjelaskan kembali urgensi Moderasi Beragama disertai dengan contoh-contoh kasus. 2. Instruktur Nasional menekankan bahwa Moderasi Agama tidak merujuk pada agama, kelompok atau aliran tertentu, tetapi pada watak dan sikap. 3. Instruktur Nasional mengajak peserta untuk tidak melakukan pengadilan pada kelompok tertentu berdasarkan asumsi, tapi atas praktik keberagamaan yang tidak sesuai dengan indikator Moderasi Beragama. 4. Instruktur Nasional mengajak peserta mempelajari cara menganalisis fenomena keberagamaan dengan menggunakan instrumen Analisis Gunung Es (<i>Iceberg Analysis</i>).
2	20 menit	<p>Analisis Gunung Es</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menjelaskan Analisis Gunung Es disertai dengan contoh. 2. Instruktur Nasional mempersilakan peserta bertanya, merespons, atau mengklarifikasi materi presentasi. <p style="margin-left: 40px;">Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Analisis Gunung Es dan Proses U</p>
4	60 menit	<p>Praktik Analisis Sosial Menggunakan Analisis Gunung Es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri antara 3-5 orang. 2. Fasilitator/trainer meminta setiap kelompok:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Membaca lembar kasus kasus intoleransi dan/atau ekstremisme dan/atau eksklusivisme keagamaan yang disiapkan b. Menemukan pola, struktur penyebab, dan mental model yang melahirkan kasus tersebut. c. Setelah selesai, fasilitator/trainer meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. d. Fasilitator/trainer memberi kesempatan kelompok lain untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi. e. Fasilitator/trainer membaca dan membahas jawaban-jawaban yang muncul. Di sini, fasilitator juga membenahi jawaban-jawaban peserta yang tidak sesuai berdasarkan analisis Gunung Es.
5	20	<p>Landasan Moral (<i>Moral Foundation</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer menyampaikan materi Landasan Moral (<i>Moral Foundation</i>). <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Fasilitator menayangkan bahan tayang Sistem Berpikir dan Moral Foundation Jonathan Haidt dalam Lampiran Materi</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator/trainer mempersilakan peserta menanggapi, bertanya, atau mengklarifikasi materi yang disampaikan.
6	10	<p>Refleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer melontarkan pertanyaan: hal baru apa yang Anda dapat dengan melakukan analisis keberagamaan dengan menggunakan Analisis Gunung Es? 2. Fasilitator/trainer meminta peserta menulis jawabannya di kertas metaplan dan kemudian ditempel pada kertas plano yang tersedia. 3. Fasilitator/trainer mengulas secara singkat jawaban peserta.
7	5 menit	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan, merefleksikannya dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.
180 menit		

H. Lampiran Materi

1. Model Analisis Gunung Es (*The Iceberg Analysis Model*)
2. Lembar Studi Kasus
 - a. Penolakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor
 - b. Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura Tolak Renovasi Masjid
 - c. Siswa Tolak Hormat Bendera
 - d. Pancasila Adalah *Thoghut*
 - e. Penyerangan Terhadap Pengikut Syiah Sampang Madura

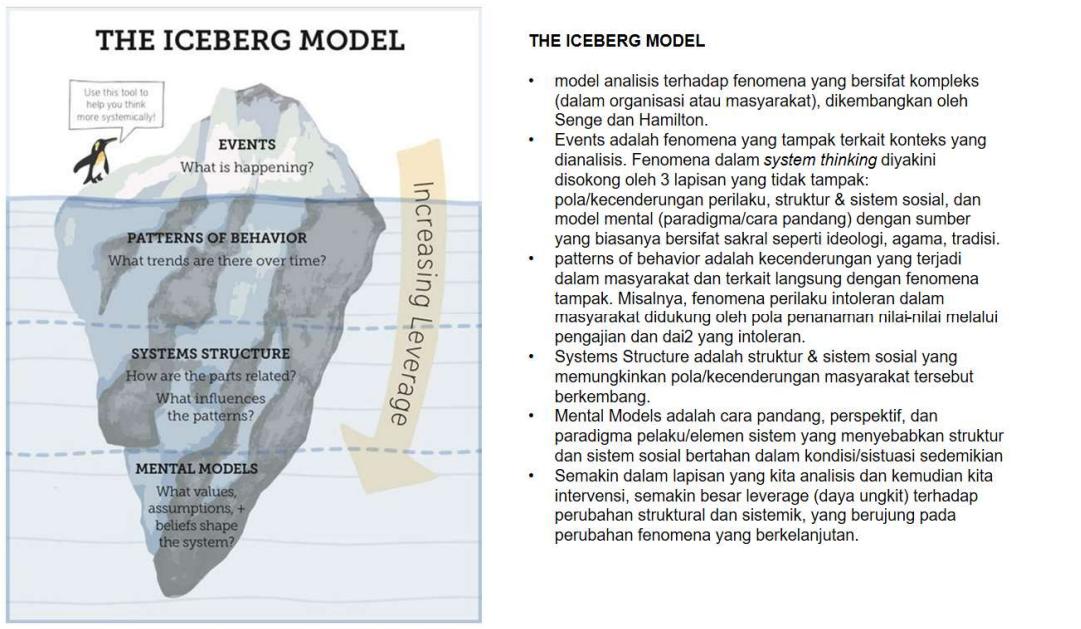
I. Bahan Tayang

1. Analisis Gunung Es dan Proses U
2. Sistem Berpikir dan Landasan Moral

DRAF

Lampiran Materi 1

Model Analisis Gunung Es (*The Iceberg Analysis Model*)



- Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks (dalam organisasi atau masyarakat), dikembangkan oleh Senge dan Hamilton.
- Permasalahan yang tampak** adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam *system thinking* diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi.
- Pola dan tren** adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola menanaman nilai-nilai melalui pengajian dan dai-dai yang intoleran.
- Struktur penyebab** adalah struktur & sistem sosial yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang.
- Mental model/paradigma** adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/element sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian.
- Semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, semakin besar daya ungkit (*leverage*) terhadap perubahan struktural dan sistemik, yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2 a

Penolakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor

Spanduk penolakan itu terpampang di tembok pinggir Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kompleks IPB Baranangsiang IV. Isinya, pernyataan warga plus tokoh masyarakat Bogor Utara yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di wilayah mereka di Kelurahan Tanah Baru. Alasannya, pihak masjid tidak melakukan sosialisasi atas rencana renovasi masjid itu. Setidaknya ada empat spanduk penolakan di dekat pembangunan masjid.

Di balik penolakan, ada sentimen keyakinan yang menyinggung warga ketika masjid itu menyiarluarkan dakwah. Warga kerap dinyatakan bid'ah karena melakukan kegiatan maulid Nabi, salawat, dan tawasul. "Menolak dengan tegas pembangunan dan keberadaan masjid Imam Ahmad bin Hanbal" tulis warga. "Sampai Kapan pun". Muara penolakan bermula dari dakwah masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Warga yang kebanyakan kaum Nahdliyin merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama ini dijalani warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan termasuk ziarah kubur dan tawasulan.

Alasan kebanyakan warga menolak masjid karena tidak menerima akidah mereka dinyatakan bid'ah. Dakwah salafi dari masjid tersebut bikin banyak warga tersinggung lantaran tradisi keagamaan warga kerap dianggap tidak sesuai dengan Alquran dan hadis. Menyimpan masalah sejak awal, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sudah 16 tahun berdiri di wilayah lingkungan RT 05/ RW 10 itu.

Ketika pertama berdiri, warga juga sempat menyuarakan penolakan. Namun, belakangan sikap warga menjadi cair. Warga dan tokoh masyarakat memberikan izin berdirinya masjid tersebut atas dasar kesepakatan. Salah satu poin kesepakatan itu: dakwah masjid tidak menyenggol akidah yang selama ini dijalani warga, yakni tahlilan, ziarah kubur termasuk juga maulid nabi—tradisi keagamaan yang melekat pada kalangan Nahdlatul Ulama.

Masalah menjadi sensitif ketika ada rencana renovasi masjid pada Maret 2016. Masjid lama, yang dibangun pada 2001, dirobohkan untuk dibangun empat lantai. Momentum ini menjadi pengungkit warga yang sudah gelisah dengan isi ajaran dakwah dari masjid tersebut, mendorong warga melakukan penolakan dan akhirnya memasang sejumlah spanduk di lokasi pembangunan masjid.

Warga yang tinggal di lingkungan paling dekat masjid sama sekali tak dimintai persetujuan. Penolakan warga sampai ke meja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, politikus dari Partai Amanat Nasional. Pada Desember lalu warga beserta tokoh masyarakat Bogor Utara melakukan pertemuan di kantor Wali Kota bersama jemaah masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Hasilnya adalah pembangunan masjid "dihentikan sambil melengkapi aspek teknis dan non-teknis."

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2b

Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura Tolak Renovasi Masjid

Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua. Di antara alasannya, menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan Raya Abepura. Penolakan itu termuat dalam sebuah surat pernyataan mengatasnamakan PGGJ dan merinci delapan poin keberatan. Selain soal menara masjid, tujuh poin lain: pelantang suara harus diarahkan ke masjid; membatasi dakwah Islam di Jayapura; melarang anak sekolah memakai seragam "bernuansa agama tertentu"; melarang "ruang khusus seperti mushalla" pada fasilitas umum; melarang pembangunan masjid dan musala di area perumahan KPR BTN; pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak ulayat sesuai peraturan pemerintah; serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura menyusun Raperda tentang "kerukunan umat beragama" di Jayapura.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017, pemeluk Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85 persen. Sementara umat Islam berjumlah 15,12 persen dari total penduduk. Di Kabupaten Jayapura, umat Kristen berjumlah 59 persen dari total penduduk, baik Protestan maupun Katolik. Sementara umat Islam mencapai 41 persen.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2c

Siswa Tolak Hormat Bendera

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Aluran menyebut, dua siswa SMP 21 Negeri yang tidak mau memberi hormat kepada bendera merah putih diduga terpapar aliran ajaran Yehuwa.

“Kami tak permasalahkan keyakinan, persoalan pada mereka tertanam kurangnya sikap nasionalisme, kalau dibiarkan menular ke siswa lainnya,” kata Hendri di Kantor DPRD Batam, Rabu (27/11/2019).

Atas dasar itu Hendri memberikan skorsing selama satu tahun, bahkan dirinya menyarankan kepada orang tua wali murid untuk memindahkan anaknya ke sekolah nonformal.

Menurut Hendri, kedua siswa tersebut terpengaruh paham menyimpang di lingkungan keluarga, sehingga terbawa ke lingkungan sekolah, dengan bersikap tidak mau menyanyikan Indonesia Raya dan memberi hormat pada merah putih.

Orang tua mengakui anaknya tidak mau memberi hormat ke bendera merah putih lantaran bersikukuh dengan keyakinan yang dipegangnya.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2d

Pancasila Adalah *Thoghut*

Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir menolak membuat pernyataan tertulis setia pada ideologi Pancasila. Penolakan itu dikatakan penasihat hukum Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra.

Ba'asyir hanya mau setia kepada Tuhan, Allah SWT, dan tidak akan mematuhi aturan ataupun ideologi lain.

"Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu," ucap Yusril menirukan ucapan Ba'asyir saat ditemuinya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (18/1) silam.

Ba'asyir, yang dalam catatan sejumlah sumber pernah menjadi aktivis pemuda Islam di masa mudanya, kali pertama ditangkap dan divonis penjara pada 1983.

Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar--rekannya dalam mendirikan Ponpes di Ngruki--ditangkap dengan tuduhan menghasut dan menolak Pancasila, serta menolak hormat pada Merah Putih. Mereka lalu divonis 9 tahun penjara, namun melarikan diri ke Malaysia.

Bagi Ba'asyir Pancasila adalah *thaghut*. Umat Islam dalam pandangannya hanya boleh patuh pada Alquran dan hadis.

"Islam harus sebagai dasar negara, bukan Pancasila. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam dinilainya sebagai penguasa *thaghut* yang harus diingkari," kata Zaki kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/1).

Ba'asyir memegang teguh konsep *hakimiyyah* hingga saat ini. Itu artinya, Allah lah sebagai pemegang kuasa, bukannya manusia lewat produk undang-undangnya.

"Jadi bahwa Ba'asyir sampai hari ini tidak mau tanda tangan kesetiaan pada Pancasila memang ideologinya semacam itu. Dia memegang teguh konsep *hakimiyyah*," ucapnya.

Ba'asyir pun memandang bahwa ideologi yang dipatuhi harus bersifat Islam yang kaffah atau total, tidak setengah-setengah atau sekadar model penerapan syariat Islam terbatas.

Ba'asyir pernah menyatakan bahwa model pemerintahan yang ideal adalah kekuasaan Islam ala kelompok Taliban di Afghanistan.

Sebelumnya, Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011 silam. Pimpinan dan pengasuh Pondok

Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

DRAF

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2e

Penyerangan Terhadap Pengikut Syiah Sampang Madura

Perayaan lebaran ketupat warga Syiah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berubah menjadi horor. Peristiwa berdarah di Pulau Madura yang menewaskan satu penganut Syiah itu terjadi pada 26 Agustus 2012.

Kepolisian menyebut, insiden itu terjadi ketika 20 anak warga Syiah di Desa Karang Gayam dan Bluuran, kecamatan Omben hendak kembali mondok di luar Sampang dengan mencarter minibus. Namun di tengah jalan, sekira pukul 10.00 WIB, rombongan santri itu dihadang puluhan orang mengaku warga Sunni dengan menaiki sekitar 30 sepeda motor.

Rombongan anak-anak warga Syiah yang baru saja menghabiskan libur lebaran Idul Fitri di kampung halamannya itu dipaksa kembali ke rumahnya. Mereka dilarang kembali belajar ke pesantren berhaluan Syiah yang ada di luar sampang. Keributan dan perkelahian pecah hingga menimbulkan satu korban meninggal bernama Hamama. Pertikaian meluas hingga menyebabkan puluhan orang terluka dari kedua kelompok. Sekitar 45 rumah warga Syiah Desa Karang Gayam dirusak dan dibakar.

Pelaku melakukan sweeping terhadap warga Syiah yang akan keluar kampung, termasuk anak-anak yang hendak kembali ke pondok pesantren di luar Kota Sampang. Kejadian ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian, namun tidak ada tindak lanjut.

Sekitar 500 orang membawa senjata tajam berupa celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov berkumpul di Dusun Nangkernang, Karang Gayam. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, Iklil Almilal kakak pertama Tajul Muluk (pimpinan Syiah Sampang) menelepon polisi. Kepolisian menanggapi laporan Iklil dengan mengirim lima orang personil ke lokasi.

Pelaku yang telah berkumpul mulai mengadang anak-anak warga Syiah yang mau kembali ke pesantren. Para laki-laki dewasa kelompok Syiah berusaha melindungi anak-anak dan istri mereka. Namun pelaku terus menyerang dengan lemparan batu, bom molotov, dan menikam dengan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, satu orang bernama Muhammad Khosyim alias Hamama tewas, tujuh orang kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka.

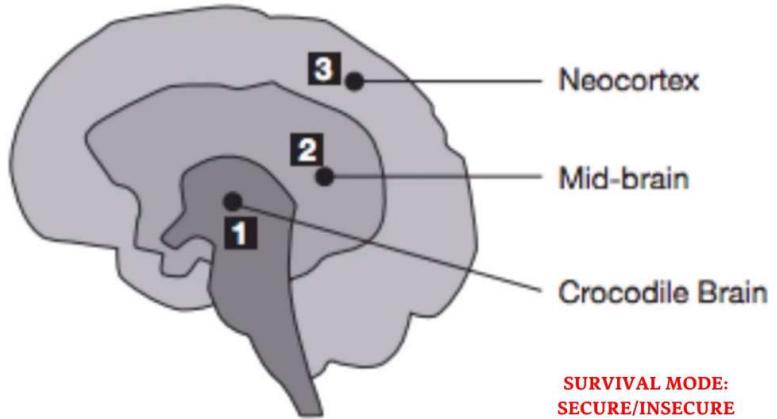
Anak-anak Syiah dan keluarganya yang hendak mengantar ke pesantren sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlarian masuk ke rumahnya masing-masing. Namun massa tetap menyerang dengan merusak dan membakar rumah mereka.

Jamaah Syiah kemudian dievakuasi ke gelanggang olahraga (GOR) Sampang. Namun tidak semua warga Syiah berhasil dievakuasi karena sedikit yang bersembunyi dan keberadaannya tidak diketahui.

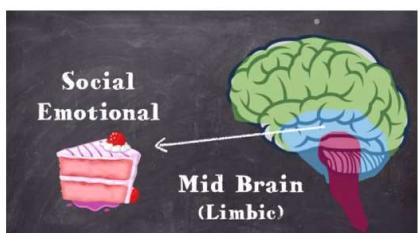
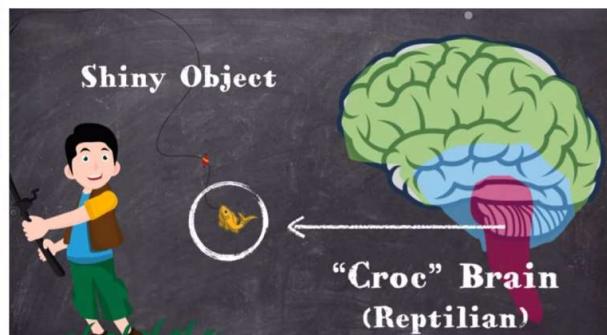
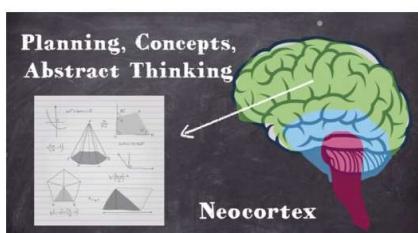
DRAF

Lampiran Materi 3

Sistem Berpikir



SURVIVAL MODE:
SECURE/INSECURE
FIGHT OR FLIGHT



Lampiran Materi 3 Moral Foundation



Jonathan Haidt dalam bukunya, *The Righteous Mind: Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama*, menyatakan ada beberapa landasan moral sebagai berikut:

- Landasan mengayomi/membahayakan. Landasan ini membuat kita cenderung lebih suka mengurusi orang-orang yang menderita dibandingkan mengurus orang yang penuh kebencian atau kekejaman. Landasan ini membuat orang lebih peka terhadap tanda-tanda penderitaan dan kebutuhan karena semangatnya adalah mengayomi kelompok-kelompok yang rentan.
- Landasan ketidakcurangan/kecurangan. Landasan ini memberikan semangat untuk berkolaborasi sehingga peka terhadap indikasi-indikasi orang yang berpotensi untuk menjadi mitra yang baik untuk bekerja sama tanpa dieksplorasi. Orang yang memegang landasan ini akan cenderung menjauhi atau menghukum pelaku kecurangan.

- Landasan kesetiaan/pengkhianatan. Landasan ini tidak menghendaki adanya pengkhianatan terhadap pribadi ataupun kelompok. Apabila terjadi pengkhianatan tindakan yang akan diambil adalah pengucilan hingga melukai. Orang yang memiliki landasan ini membuat peka mengetahui tanda-tanda tim yang baik atau tidak.
- Landasan kewenangan/pembangkangan. Landasan ini membuat orang lebih peka terhadap tanda-tanda sikap yang sepantasnya atau tidak. Orang yang memiliki landasan ini akan cenderung menggantungkan kita karena hierarki sosial.
- Landasan kesakralan/penodaan. Landasan ini menginginkan orang untuk memberi nilai terhadap objek-objek baik positif ataupun negatif untuk menjaga kesatuan kelompok. Sehingga ketika ada ancaman simbolik ataupun beraneka ragam objek sudah memiliki sistem kekebalan perilaku.
- Landasan kemerdekaan/penindasan. Landasan ini mendorong orang untuk bersatu guna melawan tiran. Sehingga egalitarianisme dan antitoritarianisme tercipta ketika memakai landasan ini karena kita cenderung jengkel terhadap upaya-upaya dominasi.

BAB VII

NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM AGAMA¹⁹

A. Pengantar

Ada tuduhan yang tak berdasar bahwa “Moderasi Beragama” adalah sebuah proyek untuk mendangkalkan agama. Sebagai contoh, di kalangan Islam tertentu, Islam moderat dituduh sebagai proyek untuk melemahkan Islam yang lahir dari mental *Islamophobic*, ketakutan terhadap Islam. Di kalangan ini juga berkembang narasi yang memerhadapkan antara Islam moderat dengan Islam *kaffah* yang mengusung khilafah. Narasi-narasi ini perlu direspon dengan tepat dengan cara menggali akar-akar teologi moderasi dalam ajaran agama.

Sesi ini bertujuan untuk menggali akar teologis Moderasi Agama dalam ajaran agama yang dianut. Dengan cara ini, moderasi mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama, sekaligus merespons berbagai tuduhan dan kesalahpahaman tentang Moderasi Beragama.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami nilai-nilai universal agama yang sangat luhur, sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia.
2. Memahami relasi agama dan negara dalam pandangan keagamaan, khususnya negara Pancasila, yang memastikan bahwa Pancasila adalah manifestasi nilai-nilai luhur agama yang bersifat final.
3. Menyadari bahwa Moderasi Beragama adalah esensi dan jantung nilai dari pokok-pokok ajaran agama.

C. Pokok Bahasan

1. Konsep moderasi dalam pandangan ajaran agama
2. Nilai-nilai universal agama: kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan
3. Relasi agama dan negara dalam pandangan agama

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Ceramah

E. Waktu

180 (4 Jam Pelatihan)

¹⁹ Sesi ini bisa disampaikan oleh narasumber atau ahli di luar tim fasilitator/trainer.

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ul style="list-style-type: none">● Instruktur Nasional membuka sesi dengan menjelaskan bahwa tujuan sesi ini adalah untuk menggali konsep Moderasi Beragama dalam nilai-nilai universal agama.
2	70	<p>Nilai-Nilai Universal Agama (Antaragama)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instruktur Nasional membagi peserta dalam beberapa kelompok untuk merumuskan:<ul style="list-style-type: none">● Apa nilai-nilai universal yang ada dalam setiap agama terkait Moderasi Beragama?● Apa landasan teologis di masing-masing agama terkait nilai-nilai universal tersebut?● Apa saja penafsiran dan pandangan keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut?Instruktur Nasional membagi kelompok berdasarkan agama.2. Instruktur Nasional meminta peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok.3. Instruktur Nasional meminta anggota kelompok yang melakukan presentasi menambahkan informasi dan memberi kesempatan peserta dari kelompok lain merespons, bertanya atau mengklarifikasi.4. Instruktur Nasional mencatat poin-poin diskusi pada kertas plano. <p>Metode Alternatif</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membagi peserta menjadi 4-5 kelompok. 2. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok membaca buku Moderasi Beragama halaman 23-41 dan menuliskan intisari hasil bacaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa nilai-nilai universal dari setiap agama yang bisa memperkuat MB? b. Apa saja praktik baik masing-masing agama terkait MB? c. Bagaimana pandangan agama terhadap negara Pancasila dan orang lain yang berbeda keyakinan? 3. Instruktur Nasional meminta masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 4. Instruktur Nasional meminta peserta di luar kelompok untuk menanggapi. 5. Instruktur Nasional merangkum hasil diskusi. <p>Catatan: Seluruh tahapan fasilitasi di atas memiliki alokasi waktu 70 menit.</p>
3	100 menit	<p>Pendalaman Argumen Teologis Moderasi Beragama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menjelaskan tujuan materi pendalaman, yaitu mendalami dan mendiskusikan argumen-argumen teologis Moderasi Beragama dan belum cukup terjawab dalam materi “Nilai-Nilai Universal Agama (Antaragama)”. Materi ini juga bertujuan agar peserta mendapat pengayaan dari narasumber bagaimana memahami landasan teologis yang digunakan untuk menentang nilai-nilai moderasi beragama. 2. Instruktur Nasional menjelaskan metode dan materi yang akan dibicarakan dan dilakukan dalam materi pendalaman, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok akan berdiskusi dengan seorang narasumber. Dapat dilakukan melalui daring atau luring. • Narasumber menyampaikan dan mendiskusikan materi-materi berikut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengumpulkan landasan teologis (ayat-ayat dalam kitab suci atau sejarah dalam tradisi agama) yang digunakan secara bertentangan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Metode praktis memahami dan merespons landasan teologis yang digunakan secara bertentangan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama <p>Agar dapat merekam dinamika yang terjadi dalam diskusi pendalaman, Instruktur Nasional berkeliling ke masing-masing lokasi diskusi kelompok dan mencatat apa yang berlangsung.</p>
6	5 menit	<p>Penutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menutup sesi dengan menghubungkan sesi materi ini dengan materi berikutnya.
	180 menit	

H. Lampiran Materi

1. “Landasan Moderasi Berbagai Agama”, dalam Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019)

Lampiran Materi

Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata “*wasit*”. Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang

dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah “*wasatha*” berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, *istiqamah*, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, ‘*wasathiyat Islam*’, sering diterjemahkan sebagai ‘*justly - balanced Islam*’, ‘*the middle path*’ atau ‘*the middle way*’ *Islam*, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai ‘*a just people*’ atau ‘*a just community*’, yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah orang yang *wasath*”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (al-Baqarah, 2: 143)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut *wasathiyah* yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karenanya, jika kata *wasath* dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pemberian dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka

peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.

Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebarluasan agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkarannya, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemungkarannya dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami ‘penyesuaian’ dengan atmosfer kebangsaan kelIndonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk

dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satu pun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama.

Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah *Nostra Aetate*. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit *Nostra Aetate* menandaskan bahwa “Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci”.

Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekrit *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen. Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya

tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para pengikut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA.2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira” (GS.92). Oleh karena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG.8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan.

Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat".

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari *Satya Yuga*, *Treta Yuga*, *Dwapara Yuga* dan *Kali Yuga*. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*.

Dalam *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak

zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisadha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran agama di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Bertapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang *introvert* (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang *extrovert* (terbuka) sudah disediakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman *Satya Yuga*. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: *grand design* sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi.

Tentu saja, moderasi yang digagas dalam *grand design* lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi menyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh

Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat *prasetya*, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu *Tathagatagarba* versi aliran Mahayana, *Thian* versi aliran Tridarma, *Nam-myoho-renge-kyo* versi aliran Nichiren, dan *Sang Hyang Adi Buddha* versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi (Tim Penyusun *Ensiklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, 2018: 40).

Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, “*Iso Jobutsu dan kosenrufu*, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. *Buddhadharma* merupakan ‘jalan tengah’ yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalusukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.

Jalan tengah *Buddhadharma* merupakan sebuah cara untuk melenyapkan *dukkha* yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati *Nirvana*. Konsep *ahimsa* yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang mengajarkan pada—seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948)—prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas

seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam dao (Sendana 2018: 129-132). Yin yang adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.

Tengah di sini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan (*ren*) dan keadilan – kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zhi*) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*).

Mengzi berkata, “Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, yang pandai menyia-nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun.” (Mengzi IVB: 7).

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebijakan, mengendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain.

“Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh Dao (Jalan Suci) di dunia.” (Zhong Yong Bab Utama: 4).

Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia tak dapat terlepas dari hukum yin yang, karena yin yang adalah hukum Tuhan.

Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling membangun. Maka kehendak untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita, itu melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita wajib

menjaga agar terus berada dalam batas Tengah, karena dengan tetap ada dalam batas Tengah, kita bisa Harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh Dao (Jalan Suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. “*Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.*” (Zhong Yong Bab Utama: 5).

Peperangan, penjajahan, *climate change*, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan megucasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, *hate speech*, menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu keburukan dari apa yang kita sukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauahkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan perdamaian dunia.

Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan dao. “*Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan dao (Jalan Suci).*” (Zhong Yong Bab Utama: 3). Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut.

Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalannya hubungan yang harmonis. Nabi Kongzi bersabda: “*Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh dao (Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham.*” (Lunyu. IX: 30)

Dalam tradisi Khonghucu, haroni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan -perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (proporsional). Zhong atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/ tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. Zhong juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya.

Jadi Zhong diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. Oleh karena itu Zhong sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan “di tengah waktu yang tepat.” Maka Zhong berfungsi untuk mencapai haroni, atau Zhong berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrat majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.]

Sumber: "Landasan Moderasi Berbagai Agama", dalam Kementerian Agama RI,
Moderasi Beragama (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019)

DRAF

BAB VIII

KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENAG RI²⁰

A. Pengantar

Sesi ini membicarakan konsep Moderasi Beragama, indikator, dan posisinya dalam rencana pembangunan nasional, hingga peta jalan (*road map*) yang telah ditetapkan. Materi ini diberikan setelah peserta diajak untuk membedah spirit moderasi yang terkandung dalam ajaran-ajaran universal setiap agama. Konsep Moderasi Beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI pada dasarnya adalah sebuah rumusan yang, di satu sisi berpijak pada inti ajaran setiap agama, dan di sisi lain memberi perspektif yang lebih operasional dalam melihat dan merespons dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami konsep Moderasi Beragama yang dirumuskan Kementerian Agama RI, beserta indikator-indikator perwujudannya.
2. Memahami Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan posisinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3. Menyadari makna pentingnya Moderasi Beragama, baik dalam konteks sosial, kebijakan negara, maupun kebutuhan masa depan Indonesia.

C. Pokok Bahasan

1. Konsep Moderasi Beragama
2. Indikator Moderasi Beragama
3. Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama
4. Posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN
5. Kata Kunci Moderasi Beragama

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Tanya-jawab dengan *menti.com*

E. Waktu

180 menit (4 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting

²⁰ Sesi ini bisa disampaikan oleh narasumber atau ekspert di luar tim fasilitator.

- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoint

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membuka sesi dengan menjelaskan bahwa tujuan sesi ini adalah untuk memahami konsep Moderasi Beragama sebagaimana telah dirumuskan Kemenag RI. Fasilitator juga mengaitkan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 2. Instruktur Nasional mempersilahkan narasumber untuk memaparkan materinya.
2	30 menit	<p>Paparan Materi:</p> <p>Alternatif 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta narasumber memaparkan materi yang menjelaskan empat pertanyaan kunci berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa saja miskonsepsi tentang Moderasi Beragama yang Anda dengar? b. Apa itu Moderasi Beragama? c. Apa saja indikator Moderasi Beragama? d. Bagaimana Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kemenag RI? e. Bagaimana posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN? <p>Alternatif 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menawarkan ke narasumber untuk meminta peserta menuliskan hal-hal yang perlu dikonfirmasi terkait Moderasi Beragama. Permasalahan tidak harus berasal dari pengalaman diri sendiri, tetapi juga pihak lain terkait Moderasi Beragama. 2. Setelah pertanyaan terkumpul, Instruktur Nasional atau narasumber membacakannya dan narasumber meresponsnya satu per satu. Narasumber dapat memaparkan materi

		<p>terkait tema-tema yang sesuai dengan pertanyaan peserta.</p> <p>Alternatif 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian materi dilakukan langsung oleh Instruktur Nasional, bukan oleh narasumber. Langkah-langkah Instruktur Nasional sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok, dengan jumlah anggota per kelompok maksimal 8 orang. Instruktur Nasional meminta setiap kelompok untuk membaca buku Moderasi Beragama terbitan Balitbang dan Diklat Kemenag RI. Instruktur Nasional meminta setiap kelompok menemukan jawaban dari pertanyaan berikut: <ol style="list-style-type: none"> Apa saja miskONSEPsi tentang Moderasi Beragama yang Anda dengar? Apa yang dimaksud dengan Moderasi Beragama? Apa indikator-indikator perwujudan Moderasi Beragama? Mengapa Moderasi Beragama penting dewasa ini? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan Moderasi Beragama? Apa strategi yang harus dilakukan untuk penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kita? Instruktur Nasional meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain untuk membahasnya.
3	40 menit	<p>Tanya Jawab:</p> <p>Alternatif 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitator/trainer membuka sesi tanya-jawab. Fasilitator/trainer meminta narasumber untuk merespons pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta. <p>Alternatif 2</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta narasumber merespons pertanyaan-pertanyaan peserta sebagai titik berangkat untuk menjelaskan konsep Moderasi Beragama yang dirumuskan Kemenag RI. 2. Instruktur Nasional meminta narasumber untuk memberi kesempatan peserta melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas penjelasan narasumber. Narasumber juga bisa mempersilahkan kepada peserta untuk melontarkan pertanyaan lain. 3. Instruktur Nasional memersilakan narasumber memberi respons balik atau menjawab pertanyaan peserta. <p>Alternatif 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta dua sampai tiga orang peserta untuk memberikan tanggapan atas presentasi hasil diskusi kelompok. 2. Instruktur Nasional mengajak peserta mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut.
3	100 menit	<p>Membedah Kata Kunci Moderasi Beragama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengingatkan peserta tentang konsep Landasan Moral (<i>Moral Foundation</i>) untuk mengantarkan diskusi kelompok untuk merumuskan sembilan kata kunci Moderasi Beragama. <p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang Landasan Moral dan Sistem Berpikir.</p> 2. Fasilitator/trainer mengajak peserta merumuskan sembilan kata kunci Moderasi Beragama dengan mencatat pada kertas plano yang tersedia. <p>Fasilitator/trainer harus memastikan kata kunci tersebut merujuk pada Rumusan Definisi Moderasi Beragama dan Indikator Moderasi Beragama dalam <i>Peta Jalan Moderasi Beragama</i> yang disusun Kelompok Kerja Kemenag. Lihat gambar Rumusan dan Indikator Moderasi Beragam dalam Lampiran Materi</p>

		<p>Contoh Sembilan Kata Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanusiaan 2. Kemaslahatan Umum 3. Adil 4. Berimbang 5. Taat Konstitusi 6. Komitmen Kebangsaan 7. Toleransi 8. Anti Kekerasan 9. Penghormatan kepada Tradisi
		<p>3. Instruktur Nasional membagi peserta menjadi tiga kelompok sesuai pembagian sembilan kata kunci.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kelompok 1 (Kemanusiaan, kemaslahatan Umum, Adil)</p> <p>Kelompok 2 (Berimbang, Taat Konstitusi, Komitmen Kebangsaan)</p> <p>Kelompok 3 (Toleransi, Anti Kekerasan, Penghormatan kepada Tradisi)</p>
		<p>4. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menemukan dalil-dalil agama yang mendukung tiga kata kunci Moderasi Beragama • membuat narasi “gaul” atau merakyat untuk dipromosikan kepada masyarakat. <p>Catatan: dalil-dalil agama dalam teks agama disesuaikan dengan latar belakang agama peserta. Teks-teks tersebut misalnya merujuk al-Qur'an bagi komunitas muslim, Alkitab bagi Katolik dan Protestan, Weda bagi komunitas Hindu, Tripitaka bagi komunitas Buddha dan Si Shu atau Su Si bagi komunitas Khonghucu, dan teks utama pada agama/keyakinan lainnya.</p>
		<p>5. Instruktur Nasional meminta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Instruktur Nasional memberi kesempatan kepada anggota kelompok menambahkan informasi jika dibutuhkan. 7. Instruktur Nasional memberi kesempatan kepada peserta di luar kelompok merespons atau menanggapi hasil presentasi 8. Instruktur Nasional mencatat poin-poin penting yang berkembang.
4	5 menit	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menyampaikan catatan-catatan penting dalam sesi Konsep Moderasi Beragama Kemenag dan menutup sesi
180 menit		

H. Lampiran Materi

1. Moderasi Beragama

I. Bahan Tayang

1. Moderasi Beragama
2. Sembilan Kata Kunci Moderasi Beragama

Lampiran Materi

Moderasi Beragama

Dalam buku *Moderasi Beragama* dinyatakan, moderasi diperlukan karena tingginya konflik dan kekerasan dengan sentimen agama. Moderasi Beragama merupakan strategi kebudayaan merawat keindonesiaan di tengah keragaman agama di mana sikap radikal akan berakibat pada kehancuran.

Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku, yang mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam beragama. Posisi moderat juga merujuk pada keseimbangan antara komitmen terhadap agama yang diyakininya dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

Rumusan

Moderasi Beragama



MODERASI, menurut kamus bahasa:

- Bahasa Indonesia: 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman.
- Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).
- Bahasa Inggris: *core* (inti, esensi), *standard* (etika).
- Bahasa Arab: *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).

“

Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa

”

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.



Peta Jalan Moderasi Beragama

8



Moderasi Beragama memiliki empat indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Indikator

Moderasi Beragama

Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan:

1	Komitmen kebangsaan Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya	2	Toleransi Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.
3	Anti kekerasan Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan	4	Penerimaan terhadap tradisi Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama

Peta Jalan Moderasi Beragama

9

Moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024



Arah Kebijakan

Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma:

- Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
- Negara memposisikan diri "in between": tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan.
- Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.



Peta Jalan Moderasi Beragama

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DALAM RPJMN 2020-2024

Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, melalui:

- a. **Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup:**
- (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
 - (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
 - (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;
 - (d) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;
 - (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Strategi Penguatan dan Peta Jalan



Dalam Peta Jalan Moderasi Beragama dinyatakan, Penguatan Moderasi Beragama dalam lingkup Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- Tahun 2021:** Penguatan perspektif Moderasi Beragama dalam institusi. Tahap ini ditempuh melalui beberapa agenda sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan kerangka kerja tingkat direktorat;
 - 2) Penyiapan instrumen implementasi penguatan Moderasi Beragama;
 - 3) Pemenuhan anggaran;
 - 4) Program penguatan Moderasi Beragama berbasis tugas dan fungsi; dan
 - 5) Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.
- Tahun 2022:** Penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif Moderasi Beragama; dan
 - 2) Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Moderasi Beragama.
- Tahun 2023:** Penguatan peran masyarakat dalam penguatan Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
 - 1) Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi Moderasi Beragama; dan
 - 2) Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi.
- Tahun 2024:** Peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa berperspektif Moderasi Beragama. Capaian tahap ini ditandai dengan parameter sebagai berikut:
 - 1) Tercapainya indeks-indeks sesuai target;
 - 2) Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis Moderasi Beragama;
 - 3) Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama; dan

- 4) Apresiasi implementasi Moderasi Beragama.

Adapun Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020-2024 untuk lingkup nasional, adalah sebagai berikut :

- a. **Tahun 2021:** Pengembangan infrastruktur penguatan perspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama;
 - 2) Penguatan regulasi perspektif Moderasi Beragama; dan
 - 3) Penguatan dukungan kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai pemerintah daerah.
- b. **Tahun 2022:** Penguatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara dan lembaga keagamaan dalam penguatan perspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara;
 - 2) Pelibatan kelompok-kelompok kunci dalam penguatan Moderasi Beragama;
 - 3) Implementasi awal program penguatan Moderasi Beragama pada target utama RPJMN.
- c. **Tahun 2023:** Penguatan perspektif Moderasi Beragama dalam kehidupan keberagamaan Indonesia di semua lini. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
 - 1) Implementasi penguatan Moderasi Beragama oleh penyelenggara negara;
 - 2) Peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan Moderasi Beragama; dan
 - 3) Kebijakan afirmasi penguatan Moderasi Beragama.
- d. **Tahun 2024:** Peneguhan kerukunan umat beragama dan kehidupan keberagamaan berperspektif Moderasi Beragama. Capaian tahap ini ditandai dengan parameter sebagai berikut:
 - 1) Tercapainya indeks kerukunan umat beragama, indeks kesalehan umat beragama, dan indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya;
 - 2) Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama;
 - 3) Tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;
 - 4) Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan; dan
 - 5) Menguatnya peran media massa dalam program penguatan Moderasi Beragama.

BAB IX **WAWASAN KEBANGSAAN**

A. Pengantar

Munculnya tantangan Moderasi Beragama dan keberhasilan usaha-usaha mengatasinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun dalam praktik, masih dijumpai ASN yang belum bertindak tepat sebagai representasi negara dalam urusan keagamaan di Indonesia. Tidak sedikit dari ASN yang bersikap dan mengambil kebijakan atas masalah-masalah sosial keagamaan berdasarkan pada pandangan pribadi atau kelompok keagamaan yang dianut. Padahal posisi dan sikap sebagai “representasi negara” menuntut ASN bersikap dan bertindak adil dalam pelayanan keagamaan sebagaimana prinsip dan mandat dari Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Sesi ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali suatu kesadaran bahwa Kementerian Agama sebagai bagian dari negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memiliki mandat untuk melindungi dan melayani agama-agama di Indonesia tanpa diskriminasi. Kesadaran ini tentu saja menyarangkan kesadaran dan pemahaman yang utuh tentang kedudukan Kementerian Agama RI, baik dalam perspektif sejarah maupun dalam tata pemerintahan Indonesia hari ini.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Menyadari bahwa Kementerian Agama RI sebagai bagian dari negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi.
2. Menyadari jati diri ASN Kemenag RI yang profesional, adil, demokratis, dan berpandangan, bersikap, dan berperilaku moderat dalam beragama.
3. Memahami makna penting kedudukan Kementerian Agama RI dalam penciptaan kerukunan umat beragama, persatuan Indonesia, dan perwujudan negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Pokok Bahasan

1. Analisis legalitas dan legitimasi Kementerian Agama RI
2. Mandat Kementerian Agama RI sebagai penyelenggaran pemerintahan di bidang agama.
3. Pancasila sebagai kesepakatan bangsa
4. Jati Diri ASN Kementerian Agama RI

D. Metode

- Curah pendapat
- Diskusi Kelompok

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

21. LCD
22. Laptop
23. Spidol besar dan kecil
24. Kertas plano
25. Metaplan
26. Kertas bekas
27. Perekat kertas
28. Gunting

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membuka kelas dan menjelaskan tujuan sesi ini untuk merefleksikan kembali eksistensi dan filosofi mandat Kementerian Agama, makna pentingnya bagi keberlangsungan Indonesia. 2. Instruktur Nasional menjelaskan singkat hubungan sesi dengan pendekatan “Proses U”, yaitu tahap “berpikir ulang” (<i>rethinking</i>).
	30 menit	<p>Wawasan Kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak peserta mengeksplorasi mengapa sebuah bangsa bisa hancur atau bersatu. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Wawasan Kebangsaan</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Instruktur Nasional mengajak peserta menjawab pertanyaan berikut <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dengan Indonesia? Apa tantangan Indonesia dalam mempertahankan kebersatuhan dalam keberagaman Indonesia? Apa yang akan menghancurkan Indonesia? • Bagaimana peran Kemenag dalam menjaga Negara Bangsa Indonesia 3. Instruktur Nasional menjelaskan penjelasan dan diskusi yang dilakukan dengan sesi berikutnya, yaitu peran penting Kemenag menjaga Negara Bangsa Indonesia dan Sikap Diri ASN

2	20 menit	<p>Diskusi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membagi peserta dalam 3 atau 4 kelompok. 2. Instruktur Nasional meminta peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Persoalan sosial apa yang mengharuskan Kemenag ada? b. Kebijakan apa yang memperkuat keberadaan Kemenag? c. Apakah Kemenag masih relevan untuk situasi sekarang? d. Jika Kemenag tidak ada, apa yang akan terjadi? e. Bagaimana seharusnya ASN Kemenag bersikap dalam melayani masyarakat?
3	30 menit	<p>Presentasi Hasil Diskusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mempersilakan masing-masing juru bicara mempresentasikan hasil diskusi mereka, masing-masing selama 7 menit. 2. Instruktur Nasional mempersilakan anggota kelompok menambahkan informasi jika dibutuhkan. 3. Instruktur Nasional mempersilakan anggota kelompok lain bertanya atau mengklarifikasi materi presentasi. 4. Instruktur Nasional mencatat poin-poin penting dan membuka diskusi dengan peserta. 5. Instruktur Nasional mengakhiri diskusi dengan menegaskan bahwa sebagai representasi negara, ASN Kemenag harus berpandangan, berperilaku, dan bertindak dengan menggunakan paradigma dan regulasi negara. Sebagai representasi negara, ASN Kemenag harus profesional, adil, imparsial, dan tidak diskriminatif dalam melindungi dan melayani umat beragama. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Sikap Diri ASN </div>
4	10 menit	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menjelaskan poin-poin penting dari hasil diskusi kelompok dan menegaskan hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Kementerian Agama RI sebagai bagian dari negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. b. Jati diri ASN Kemenag RI adalah profesional, adil, demokratis, dan berpandangan, bersikap, dan berperilaku moderat dalam beragama.

		c. Kedudukan Kementerian Agama RI sangat vital dalam penciptaan kerukunan umat beragama, persatuan Indonesia, dan perwujudan negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Instruktur Nasional menutup sesi dengan tepuk tangan dan salam.
	90 menit	

H. Lampiran Materi

1. Sejarah Kemenag
2. Visi-Misi Kemenag
3. Tugas dan Fungsi Kemenag

I. Bahan Tayang

1. Wawasan Kebangsaan

DRAFT

Lampiran Materi 1

Sekilas tentang Kementerian Agama

Pendirian Kementerian Agama pertama kali disampaikan Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 11 Juli 1945. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Aspirasi itu tidak langsung bisa terwujud. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Ahda 19 Agustus 1945 yang salah satu agendanya membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan dibentuk Kementerian Agama belum disepakati.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam praktiknya berlainan."

Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam praktiknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri”.

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama."

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), "... dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler."

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa *portfolio* dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H. A. Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Perkembangan berikutnya

Tahun-tahun berikutnya merupakan masa konsolidasi dan pengembangan kementerian. Peralihan kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi kementerian. Pada tanggal 23 April 1946, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat yang isinya :

Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi dapat disebut "kementerian revolusi", karena ketika awal dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta.

Dalam Maklumat Kementerian Agama No. 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No. 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No. 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik tokoh

Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Semula hal itu berlaku di Jawa dan Madura, tetapi setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didorong oleh mosi integral Mohammad Natsir (periode berlakunya UUDS 1950) dan penyerahan urusan keagamaan dari bekas negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada Menteri Agama, maka secara *de jure* dan *de facto*, tugas dan wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab Menteri Agama

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga bahwa tiap-
tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya;
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin, menyokong serta mengamat-
amati pendidikan dan pengajaran di madrasah madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
8. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-
amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;
9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja, dll);
10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas menegaskan kembali politik keagamaan

dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, bahwa fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kondisi saat ini

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

BPJPH merupakan unit eselon I di bawah Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing struktur BPJPH mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I. Keputusan Menteri Agama RI No. 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal juga merupakan peraturan pelaksanaan UU JPH yang terkait dengan BPJPH.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

Pembahasan *draft RPP* secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar

Kementerian dilakukan pada bulan Agustus s.d. Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan.

Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ke depannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Sumber: Disarikan dari <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>

Lampiran Materi 2

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

VISI

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

MISI

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Sumber: <https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama>

Lampiran Materi 3

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Tugas :

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

BAB X **SIKAP DIRI ASN KEMENAG RI**

A. Pengantar

Penguatan Moderasi Beragama hanya berhasil manakala para aktor penggerak, seperti ASN Kemenag, meyakini dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku dan tindakan kesehariannya. Nilai-nilai itu bersumber dari citra diri ASN Kemenag yang bersumber dan didasarkan pada Konstitusi dan UUD 1945 dan diturunkan dalam visi-misi serta tugas dan fungsi Kemenag RI.

Sesi ini bertujuan untuk membangun citra diri ASN Kemenag RI yang kuat dalam pengarusutamaan Moderasi Beragama di masyarakat. Citra diri ini harus mencerminkan nilai-nilai yang menegaskan bahwa ASN Kemenag adalah aparatus negara yang bersikap adil, imparsial, dan profesional dalam mengemban mandat perlindungan dan pelayanan bagi umat beragama di Indonesia.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. memiliki kesadaran sebagai ASN Kemenag untuk menegakkan pilar kebangsaan berbasis narasi keagamaan.
2. menyadari citra diri ASN Kemenag RI yang kuat dalam pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat.
3. menyadari sebagai aparatus negara harus bersikap adil, imparsial, dan profesional dalam melindungi dan melayani seluruh umat beragama di Indonesia.

C. Pokok Bahasan

1. Fungsi dan peran ASN Kemenag.
2. Pandangan ASN Kemenag terhadap Indonesia yang berasaskan Pancasila, relasi agama dan negara, perlindungan dan pelayanan agama-agama, dan regulasi-regulasi terkait.

D. Metode

- Diskusi Kelompok dengan metode “Hot 7 Dots”
- Diskusi kelompok

E. Waktu

180 menit (4 jam pelatihan).

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting

- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoint
- Kertas
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membuka kelas dan menjelaskan tujuan sesi dengan singkat tentang pentingnya sikap diri ASN Kemenag dalam menegakkan pilar kebangsaan berbasis narasi keagamaan, dan mengarusutamakan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, serta bersikap adil, imparisial, dan profesional dalam perlindungan dan pelayanan agama. 2. Instruktur Nasional menjelaskan singkat hubungan sesi dengan pendekatan “Proses U”.
2	30 menit	<p>Menggambar Kelompok Moderat versus Tidak Moderat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membagi peserta menjadi enam kelompok dengan meminta peserta berhitung satu hingga enam. 2. Instruktur Nasional membagi enam kelompok menjadi dua: ganjil (kelompok satu, tiga, dan lima) dan genap (kelompok dua, empat, dan enam). 3. Instruktur Nasional meminta kelompok ganjil mengambil tempat sebelah kiri fasilitator dan genap sebelah kanan fasilitator. 4. Instruktur Nasional meminta panitia menyediakan satu kertas plano untuk masing-masing kelompok dan spidol untuk setiap anggota kelompok (1 orang, 1 spidol) sebagai alat untuk menggambar. 5. Instruktur Nasional meminta kelompok ganjil untuk menggambar ciri-ciri, karakter, dan sifat atau simbol moderat, dan kelompok genap menggambar ciri-ciri, karakter, dan sifat atau simbol tidak moderat, dengan langkah-langkah berikut (dipandu secara ketat): <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang pada setiap kelompok menempelkan alat tulis di kertas plano yang sudah disediakan dan secara bersama masing-masing membuat satu lingkaran di kertas plano tersebut.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan lingkaran-lingkaran tersebut, kelompok diminta untuk mulai menggambar dengan waktu 7 menit. <p>Catatan: ketentuan menggambar di masing-masing kelompok dibebaskan. Mereka dapat menggambar sendiri-sendiri atau berembuk bersama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Instruktur Nasional meminta peserta untuk mengangkat tangan mereka ke atas sebagai tanda berhenti menggambar ketika sudah 7 menit. 7. Setelah setiap kelompok selesai menggambar, Instruktur Nasional meminta hasil gambar kelompok ganjil ditukar dengan kelompok genap seberangnya (menukar gambar kelompok moderat dengan gambar kelompok tidak moderat). Misalnya antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, dan seterusnya. 8. Instruktur Nasional meminta setiap kelompok melanjutkan gambar yang ada dengan instruksi awal. Dengan gambar yang ada, kelompok ganjil untuk mengubah gambar tidak moderat menjadi gambar moderat, sementara kelompok genap mengubah gambar moderat menjadi gambar tidak moderat. Waktu perubahan gambar 7 menit. 9. Setelah 7 menit, Instruktur Nasional meminta peserta untuk mengangkat tangan mereka ke atas sebagai tanda berhenti menggambar.
3	30 menit	<p>Presentasi Gambar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah waktu yang disediakan selesai, Instruktur Nasional mempersilakan masing-masing juru bicara yang sudah mereka tunjuk menjelaskan gambar masing-masing. 2. Untuk menyemangati forum, Instruktur Nasional meminta peserta bermain “<i>camera, rolling, action!</i>” sebelum juru bicara menjelaskan gambar dengan langkah berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang peserta ditunjuk sebagai pembaca abab. Misalnya dengan berhitung satu-dua-tiga. b. Seluruh peserta, kecuali juru bicara, menekuk siku dan mengangkat siku dan mengarahkan pada juru bicara seolah-olah sedang memanggul kamera sembari berteriak “<i>camera, rolling, action!</i>” c. Instruktur Nasional mempersilakan setiap juru bicara menjelaskan gambar yang diterima dan ciri-

		<p>cirinya, serta bagaimana mengubahnya. Masing-masing selama 7 menit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instruktur Nasional mencatat karakteristik moderat dan tidak moderat di balik gambar atau pernyataan yang disampaikan juru bicara dalam presentasi dan anggota kelompok dalam sesi diskusi dan tanggapan. 4. Instruktur Nasional mengklarifikasi kepada peserta karakteristik tersebut. Misalnya berikut ini. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">MODERAT</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">TIDAK MODERAT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu orang lain, meskipun dalam pelaksanaan agama Inklusif (terbuka) Dalam konteks kebangsaan diorientasikan pada Pancasila </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> Mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama Bersaing antaragama Penyegelan rumah ibadah di luar hukum Saling mengganggu dalam beragama </td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 5. Instruktur Nasional meminta satu-dua peserta menanggapi atau bertanya tentang karakteristik yang sudah dituliskan tersebut. 	MODERAT	TIDAK MODERAT	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu orang lain, meskipun dalam pelaksanaan agama Inklusif (terbuka) Dalam konteks kebangsaan diorientasikan pada Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama Bersaing antaragama Penyegelan rumah ibadah di luar hukum Saling mengganggu dalam beragama
MODERAT	TIDAK MODERAT					
<ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu orang lain, meskipun dalam pelaksanaan agama Inklusif (terbuka) Dalam konteks kebangsaan diorientasikan pada Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama Bersaing antaragama Penyegelan rumah ibadah di luar hukum Saling mengganggu dalam beragama 					
4	30 menit	<p>Curah Pandangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah setiap kelompok selesai presentasi, Instruktur Nasional menanyakan kepada satu-dua peserta apa yang mereka alami atau rasakan saat menggambar atau memperbaiki gambar kelompok lain. 2. Instruktur Nasional menyimpulkan butir pembelajaran yang diambil dari menggambar. <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; border: 1px solid #80c0ff; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>Misalnya, fasilitator dapat mengatakan pekerjaan menggambar ini sepertinya ringan, tapi memberi pesan penting antara lain, pertama, kebanyakan orang melambangkan moderat tidak moderat dengan simbol tertentu seperti jenggot, celana cingkrang; kedua, kita sering menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan, tapi setiap orang punya potensi/kekuatan untuk mengubahnya.</p> </div>				

5	70 menit	<p>1. Instruktur Nasional menjelaskan relevansi metode menggambar untuk membantu peserta pelatihan dalam merumuskan citra diri ASN Kemenag RI.</p> <p>2. Instruktur Nasional menjelaskan Kapasitas yang harus dimiliki ASN dalam penguatan Moderasi Beragama.</p> <p>Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.</p> <p>3. Instruktur Nasional membagi peserta dalam lima kelompok berdasarkan tema</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok 1 Wawasan Keagamaan ● Kelompok 2 Wawasan Kebangsaan ● Kelompok 3 Kecakapan ● Kelompok 4 Sikap Diri ● Kelompok 5 Paham Konteks Persoalan kehidupan Keagamaan <p>4. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok mendiskusikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Praktik baik dan praktik buruk ● Apa yang wajib dilakukan? ● Apa yang dilarang dilakukan? <p>5. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</p> <p>6. Instruktur Nasional memberi kesempatan anggota kelompok menambahkan informasi dan peserta di luar kelompok yang mempresentasikan menanggapi.</p>
6	10 menit	<p>Penutup</p> <p>1. Instruktur Nasional mengulang kembali poin-poin penting yang sudah dibahas sambil mengaitkan dengan sikap yang seharusnya dilakukan oleh ASN Kemenag sebagai bagian dari citra diri seorang moderat dalam beragama, dan juga sikap ASN Kemenag dalam memandang negara ini dan menjalankan fungsinya.</p> <p>2. Instruktur Nasional menutup sesi.</p>
180 menit		

H. Lampiran Materi

1. Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

I. Bahan Tayang

1. Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

Lampiran Materi 1

Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

KAPASITAS ASN KEMENAG DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

PAHAM KONTEKS PERSOALAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN

- Memahami konteks yang membenturkan agama dan negara
- Memahami konteks benturan paham dan praktik keagamaan dalam ruang intra (internal) agama
- Memahami REEVE (*Religious, Exclusivism, Extremism, Violent Extremism*)



BAB XI **EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA**

A. Pengantar

Materi ini terkait dengan pemahaman peserta tentang peran aktor, posisi, dan jejaring dalam keberagamaan. Yakni, bagaimana menerapkan Moderasi Beragama ini dalam ekosistem tugas dan fungsi pekerjaan dan masyarakat. Sesi ini merupakan bagian dari sikap dan peran Kementerian Agama dalam penerapan Moderasi Beragama di antara stakeholder yang lain. Sesi ini juga mengajak peserta untuk memandang kondisi Moderasi Beragama di Indonesia saat ini dan seperti apa seharusnya kondisi ideal yang seharusnya ada.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami perannya sebagai aktor, posisinya, dan jejaringnya dalam penerapan Moderasi Beragama di wilayah di mana dia bekerja.
2. Melihat dan memahami secara langsung tentang diri dan posisi sosial Kementerian Agama dalam aneka stakeholders yang ada.
3. Melakukan praktik non-verbal yang membuka kesadaran pribadi dalam bersikap.
4. Terbuka wawasan akan kondisi dan situasi saat ini yang signifikan dan dinamika yang tidak tampak untuk memosisikan Kementerian Agama secara tepat.

C. Pokok Bahasan

Pemahaman aktor, posisi, dan jejaring Kementerian Agama di antara stakeholders lain dalam penerapan Moderasi Beragama di Indonesia (kondisi saat ini dan kondisi ideal)

D. Metode

- Pemetaan empat dimesi (*four D's mapping*) dengan Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theatre*)
- Curah Pendapat
- Refleksi

E. Waktu

145 menit (3 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- Laptop/komputer/gadget
- Kamera

- Spidol besar dan kecil
- Kertas plano
- Bolpoin
- Kertas
- Kertas ukuran 15X10 cm sebanyak 15-20 buah.
- Tali kalung sebanyak 15-20

Catatan: Jumlah kertas dan kalung disesuaikan dengan tema dan peran yang sudah ditetapkan

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta peserta duduk berhadapan (bentuk U) untuk memulai kegiatan. Fasilitator memastikan posisi tempat duduk peserta dimundurkan agar area tengah dapat lebih luas untuk lokasi dengan Teater Pertunjukan Sosial. 2. Instruktur Nasional menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu menggambarkan kondisi keagamaan aktual melalui sesi Teater Pertunjukan Sosial (<i>Social Presencing Theater</i>). Fasilitator juga menjelaskan hubungan sesi ini dengan sesi sebelumnya.
2	40 menit	<p>Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk uji coba, Instruktur Nasional meminta peserta berakting setotal mungkin ketika mengalami atau melihat situasi yang disebutkan fasilitator <ul style="list-style-type: none"> • Anda melihat jumlah uang rekening! • Anda dikunjungi Gus Menteri • Sedang memarahi staf • Anda diomeli istri. • Istri yang dipukuli oleh suami. 2. Instruktur Nasional menjelaskan tema yang akan dimainkan para aktor. Misalnya tema perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta. Banyak pelajar mulai terpapar paham ekstrem di daerah itu. 3. Instruktur Nasional menjelaskan apa yang harus dilakukan para aktor (<i>stakeholders</i>) dalam memperagakan masalah di atas. <ul style="list-style-type: none"> • Para aktor diminta melakukan sesuai peran yang sudah ditetapkan.

		<ul style="list-style-type: none"> ● Para aktor diminta memperhatikan empat hal dalam melakukan peran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pose. Gerakan apa yang dipilih? Misalnya menunjuk tangan atau bertolak pinggang. 2) Posisi. Posisi apa yang dipilih? Misalnya mengambil posisi yang dekat atau jauh dengan aktor-aktor lain. 3) Arah. Arah mana yang dipilih? Menghadap atau membelaangi aktor tertentu? 4) Tinggi-rendah. Mana yang dipilih aktor? Tinggi atau rendah. Pilihan relasi itu menunjukkan makna dan hubungan antar aktor. Aktor yang duduk di bawah, sementara aktor lain berdiri menunjukkan relasi yang berbeda. ● Peserta yang tidak mengambil peran aktor diminta menjadi pengamat teater dengan tugas mencatat posisi, arah, pose, dan tinggi-rendah. <p>4. Instruktur Nasional meminta peserta menjadi relawan untuk berperan sebagai aktor-aktor yang sudah disiapkan.</p> <p>Untuk tema perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta, berikut ini aktor-aktor yang dimainkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kemenag Pusat ● Kepala Kantor Kemenag ● Bupati ● Politisi ● Media sosial ● Media Massa ● Karim (organisasi yang terafiliasi dengan HTI) ● Ormas Islam ● Tokoh agama ● Remaja ● Guru ● Kepala sekolah ● Kepala Dinas Pendidikan ● Orang Tua ● Kapolres
3	65 menit	<p>Teater Pertunjukan Sosial (<i>Social Presencing Theater</i>).</p> <p>Babak Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menyebutkan satu per satu para peserta yang diminta berperan untuk menjadi aktor-aktor yang sudah ditetapkan maju ke lokasi teater. Para aktor yang dipanggil diminta langsung diminta mengambil posisi atau pose yang mereka

- pilih. Misalnya, orang tua mengambil posisi duduk dan memegang handphone seolah-seolah sedang mengikuti pertemuan daring. Ini merupakan **babak pertama** Teater Pertunjukan Sosial.
2. Setelah semua aktor sudah berpose dan mengambil posisi masing-masing, Instruktur Nasional meminta peserta lain (yang merepresentasikan masyarakat) yang tidak ikut berakting, memberikan pertanyaan atas peran yang mereka lihat. Peserta diminta **hanya bertanya** atas apa yang mereka lihat dan tidak memberi penilaian atau komentar bagaimana seharusnya.
 2. Instruktur Nasional memberikan kesempatan kepada peserta yang berperan untuk menjelaskan alasan kenapa ia memilih berada pada posisi dengan pose seperti itu. Fasilitator dapat memberi kesempatan kepada 5-6 aktor merespons. Fasilitator sekaligus merangkum tanggapan dari peserta secara lisan.
- Babak Kedua**
1. Instruktur Nasional mengajak para aktor memainkan teater **babak kedua**. Di babak ini, para aktor diminta mengubah posisi sesuai yang mereka pikirkan dan menggambarkan situasi saat ini terkait **perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta**. Peserta berakting tanpa ada komunikasi verbal.
 2. Setelah aktor semua pemeran berpindah atau mengubah posisi mereka, Instruktur Nasional menanyakan ke beberapa peserta: **mengapa mereka berpindah posisi? Mengapa posisinya mendekati aktor lain?**
 3. Instruktur Nasional memberi kesempatan kepada 4-5 orang peserta yang berperan untuk menjawab.
 3. Instruktur Nasional meminta peserta 3-4 peserta yang tidak berperan (masyarakat) memberikan tanggapan mereka apakah posisi dan peran yang dipilih para aktor menggambarkan situasi dan kondisi aktual.
 4. Instruktur Nasional merangkum komentar dan respons para aktor dan peserta lain (masyarakat) diberikan.
- Babak Ketiga**
1. Instruktur Nasional mengajak para aktor memainkan teater **babak Ketiga**. Di babak ini, para aktor diminta mengubah posisi sesuai yang mereka pikirkan dan menggambarkan situasi yang ideal

		<p>terkait perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta.</p> <p>Peserta berakting tanpa ada komunikasi verbal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Instruktur Nasional meminta 5-6 orang dari peserta (masyarakat) dan para pemeran mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah akting peran yang tampak di babak ketiga sudah ideal? b. Jika belum, bagaimana seharusnya? c. Apa yang akan terjadi jika gambaran ideal itu betul-betul terjadi? 3. Instruktur Nasional membuat rangkuman terhadap respons peserta.
4	30	<p>Refleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak 3-4 peserta menyampaikan tanggapan tentang apa yang dirasakan setelah mengikuti sesi ini dan apa yang ingin dilakukan.
5	5 menit	<p>Penutup</p> <p>Instruktur Nasional merangkum tanggapan peserta dan menutup sesi.</p>
145 menit		

H. Lampiran Materi

1. Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theater*).

Lampiran Materi 1

Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theater*).

Pendekatan ini dilakukan para aktor yang dipilih melakukan *pose non-verbal* (hanya dengan gerakan dan ekspresi) sesuai dengan peran-peran tertentu yang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Untuk itu, peserta diharapkan berperan atau berpose dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang menjiwai peran itu sesuai dengan persepsi mereka terhadap peran itu. Misalnya, seorang perempuan korban KDRT, melakukan pose dengan duduk, kaki ditekuk, dan menundukkan kepala. Peserta yang tidak ikut berperan dianggap sebagai masyarakat umum yang menjadi sasaran dari pelayanan tiap peran. Tugasnya memberikan pertanyaan atau komentar atau peran yang diperagakan para aktor.

DRAF

BAB XII

STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA: *RETHINKING, REDESIGNING, REFRAMING, REACTING*

A. Pengantar

Berdasarkan perundang-undangan, agama menjadi kewenangan pemerintah pusat di mana institusi yang mengurus agama adalah Kemenag. Di tengah banyaknya peristiwa intoleransi dan ekstremisme kekerasan berbasis sentimen agama, Kemenag menjadi tumpuan banyak pihak. Di banyak kasus intoleransi dan kekerasan agama, ada kecenderungan aparatus negara yang semestinya bertindak berdasarkan norma-norma konstitusi justru tunduk pada tuntutan kelompok intoleran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mengabaikan fakta-fakta yang dihadapi.

Sebelumnya, peserta sudah diajak untuk memikirkan kembali (*rethinking*) atas mental model yang sudah terbentuk. Peserta juga sudah diajak untuk melakukan pemetaan jaringan aktor melalui materi ekosistem Moderasi Beragama. Kali ini, peserta diajak untuk merespons masalah-masalah yang sudah ditemukan melalui Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*) sebelumnya dengan menggunakan Proses U.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. memahami konsep Moderasi Beragama sebagai cara pandang baru dalam kehidupan bersama
2. memahami secara mendalam tentang nilai-nilai dasar dan indikator-indikator Moderasi Beragama
3. mampu menyusun rencana aksi untuk mewujudkan Moderasi Beragama di kantor dan masyarakat

C. Pokok Bahasan

1. *Rethinking*
2. *Redesigning*
3. *Reframing*
4. *Reacting*

D. Metode

- *U Process*
- Tanya-jawab dengan Menti.com
- Diskusi kelompok
- *World Café*

E. Waktu

140 menit (3 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	Pengantar: 1. Instruktur Nasional membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi
2	30 menit	Proses U 1. Instruktur Nasional mengajak peserta membuka www.menti.com . 2. Instruktur Nasional meminta peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui <i>menti.com</i> . Konteks persoalan yang diangkat adalah: berkembangnya kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrem dan Kemenag belum optimal meresponsnya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab peserta adalah: 1. Apa tren/perkembangan yang menyebabkan Kemenag belum optimal menghadapi berkembangnya kelompok ekstremisme beragama? 2. Apa saja kondisi struktural dan sistemis yang menyebabkan tren tersebut? (Dimensi struktural, tradisi, organisasi masyarakat, kebijakan pemerintah dst). 3. Setelah peserta menjawab pertanyaan, Instruktur Nasional membacakannya dan mengajak peserta untuk mendiskusikannya. 4. Instruktur Nasional melanjutkan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok, dengan tugas membahas mental model yang berkembang di masing-masing dimensi sistem yang telah dibahas, yaitu:

		<ul style="list-style-type: none"> ● Dimensi ASN Kemenag ● Dimensi kelompok ekstrimis ● Dimensi stakeholder non-Kemenag <p>Secara khusus, Fasilitator/trainer meminta peserta membahas dalil-dalil agama yang digunakan kelompok ekstrimis</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Instruktur Nasional mempersilakan masing-masing menyampaikan hasil diskusi kelompok. 6. Dari diskusi, Instruktur Nasional mencatat mental model yang berkembang di kalangan ASN Kemenag, kelompok ekstremis, dan moderat. <p>Misalnya, mental model ASN Kemenag hasil diskusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MB dinilai belum urgensi; 2. Pelaksanaan kegiatan bersifat formalitas; 3. Sanksi belum efektif; 4. Masih fokus pada tugas dan fungsi masing-masing; 5. ASN Kemenag merasa belum memiliki kewenangan yang memadai; 6. Kemenag masih bergantung pada penguasa 7. Bersifat apatis. <ol style="list-style-type: none"> 7. Instruktur Nasional menutup sesi
3	50 menit	<p>Rethinking</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta peserta bergabung kembali dalam kelompok sesuai pembagian kelompok dalam sesi grup diskusi yang membahas mental model. 2. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok mendiskusikan dan merumuskan <i>Rethinking</i> Kemenag (baru) dan dalil-dalil atau keyakinan Moderat. 3. Instruktur Nasional meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 4. Instruktur Nasional mencatat mental model baru berdasarkan hasil diskusi kelompok. <p>Rumusan <i>rethinking</i> mental model baru Kemenag, misalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderasi Beragama menjadi program prioritas Kemenag • Militansi ASN adalah suatu kemutlakan • Sanksi yang tegas sangat dibutuhkan untuk kedisiplinan

		<ul style="list-style-type: none"> • Moderasi Beragama melekat pada jati diri ASN Kemenag • Program kemenag berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, termasuk Moderasi Beragama • ASN Kemenag memiliki kewenangan absolut di bidang agama • ASN Kemenag harus percaya diri dengan kewenangan absolutnya • Kemenag saling berkolaborasi dan bersinergi dengan penguasa wilayah • Otoritas Kemenag diperluas dalam bidang keagamaan • ASN Kemenag harus memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap NKRI • ASN Kemenag harus memiliki akses dan kewenangan terhadap praktik keagamaan lembaga/instansi lain <p>5. Fasilitator/trainer menutup diskusi.</p>
4	50 menit	<p>Diskusi Kelompok (World Cafe):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membagi peserta menjadi tiga kelompok berdasarkan tiga kelompok sasaran MB: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemenag b. Pemangku kepentingan (stakeholders) non-Kemenag, c. Masyarakat. 2. Setiap kelompok diminta menjawab pertanyaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa target yang ingin dicapai? b. Apa strategi mencapai target dan program? c. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk memperkuat Moderasi Beragama dalam rangka menghadapi ekstremisme? 3. Setelah selesai, masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok lain. Satu orang perwakilan kelompok tetap menjaga “cafe” untuk menerima kunjungan kelompok lain dan bertugas menjelaskan apa saja hasil diskusi kelompoknya. 4. Dalam kunjungan ini, pengunjung bisa memberikan pertanyaan, mengklarifikasi, atau mengonfirmasi, sehingga terjadi diskusi antara pengunjung dengan perwakilan kelompok yang dikunjungi.
5	5 menit	<p>Penutup Instruktur Nasional menutup sesi dengan menekankan kembali bahwa mengapa selama ini peran ideal Kemenag belum tercapai secara maksimal salah satunya adalah karena program-program disusun tidak berdasarkan analisis yang memadai.</p>
		140 menit

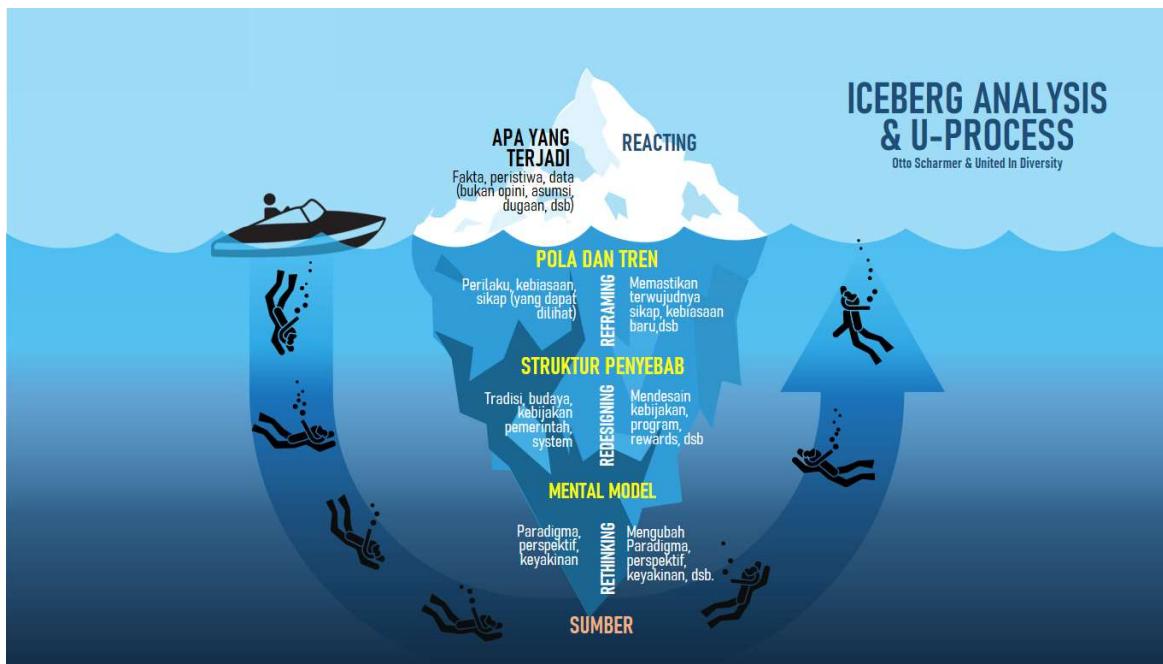
H. Lampiran Materi

1. Model Analisis Gunung Es dengan Proses U (*Iceberg Model with U-Process*)

DRAF

Lampiran Materi 1

Model Analisis Gunung Es dengan Proses U (*Iceberg Model with U-Process*)



- Dikembangkan oleh Otto Scharmer dengan kombinasi *Iceberg Model & Proses U*.
- Analisis dilakukan di sisi kiri dari lapisan teratas ke arah bawah:
 - Asesmen fenomena tampak
 - Analisis pola/kecenderungan
 - Analisis struktur & sistem sosial
 - Analisis mental model (paradigma)
 - Menemukan sumber model mental
- Intervensi dilakukan di sisi kanan dari lapisan terbawah ke atas.
 - *Rethinking* (mengembangkan paradigma baru) yang idealnya diambil dari sumber mental model yang akan diubah.
 - *Redesigning* (menata ulang struktur dan sistem, melakukan inovasi) yang akan digunakan untuk membangun mental model (paradigma) baru dalam masyarakat dan akan menjadi dasar perubahan fenomena.
 - *Reframing* (membingkai ulang pola/kecenderungan yang ada, termasuk mendorong pola/kecenderungan baru yang lebih ideal).
 - *Future reality* (mengimajinasikan, menginisiasi dan mengawal fenomena sosial baru yang akan diwujudkan).

BAB XIII

MEMBANGUN GERAKAN: KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN

A. Pengantar

Setelah peserta merumuskan mental model baru hingga menyusun program, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana program-program itu dijalankan? Bagaimanapun juga, program hanya akan berhenti sebatas program. Perubahan ditentukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang secara indah kita angangkan.

Sesi ini mengajak peserta untuk mulai membangun gerakan. Kepemimpinan dan kepelopor adalah salah satu kunci penting dalam membangun gerakan. Program bisa dijalankan melalui kepemimpinan yang mengarahkan dan kepelopor yang menginspirasi.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta memiliki kapasitas kepemimpinan dan kepelopor yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.

C. Pokok Bahasan

1. Kepemimpinan
2. Kepeloporan

D. Metode

- Menonton film
- Studi kasus
- Diskusi

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar: Instruktur Nasional membuka dan menjelaskan tujuan sesi, yaitu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.</p>
2	20 menit	<p>Menonton video:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak peserta menonton video yang berkisah tentang kepeloporan. <p>Catatan. Instruktur Nasional dapat memilih film Tree (lihat sinopsis film Tree dalam lampiran materi). Fasilitator dapat memilih film lain yang dinilai lebih cocok untuk tujuan materi dan karakteristik peserta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setelah menonton film, Instruktur Nasional mengajak peserta mendiskusikan film dengan melontarkan pertanyaan: apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? 3. Peserta dipersilakan memberi komentar dan mendiskusikannya. 4. Instruktur Nasional menulis jawaban-jawaban dari peserta. <p>Contoh. Kepemimpinan dan Kepeloporan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mudah menyerah • Keteladanan • Walau sendirian harus mulai • Harus memulai, meski awalnya tidak yakin berhasil. • Harapan • Dukungan • Kekuatan • Ketulusan • Tidak apatis terhadap masalah, tapi merespons dengan aktif. • Menginspirasi.
	20	<p>Presentasi Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional menjelaskan materi kepemimpinan dan kepeloporan.

		Instruktur Nasional menayangkan bahan tayang Kepemimpinan dan Kepeloporan
		2. Instruktur mempersilakan peserta bertanya atau mengkarifikasi.
3	40 menit	<p>Tanya Jawab:</p> <p>1. Instruktur Nasional membagi peserta dalam empat kelompok untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana membangun dorongan perubahan untuk Moderasi Beragama? (Kelompok 1) • Bagaiman membangun visi gerakan Moderasi Beragama? (Kelompok 2) • Bagaimana membangun kapasitas di lingkungan masyarakat dan Kemenag untuk gerakan Moderasi Beragama? (Kelompok 3) • Apa saja langkah nyata yang bisa diaplikasikan untuk gerakan Moderasi Beragama? (Kelompok 4) <p>2. Instruktur Nasional mempersilakan masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</p> <p>3. Instruktur nasional menanyakan kepada peserta apakah ketika semua hal yang disampaikan dalam diskusi kelompok akan menghasilkan perubahan yang diharapkan?</p>
4	5 menit	<p>Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruktur Nasional menutup sesi dengan merangkum poin-poin penting yang sudah dibahas, dan menghubungkannya dengan sesi selanjutnya.
90 menit		

H. Lampiran Materi

1. Sinopsis film

I. Bahan Tayang

1. Kepemimpinan dan Kepeloporan

Lampiran Materi 1
Sinopsis Film Tree.

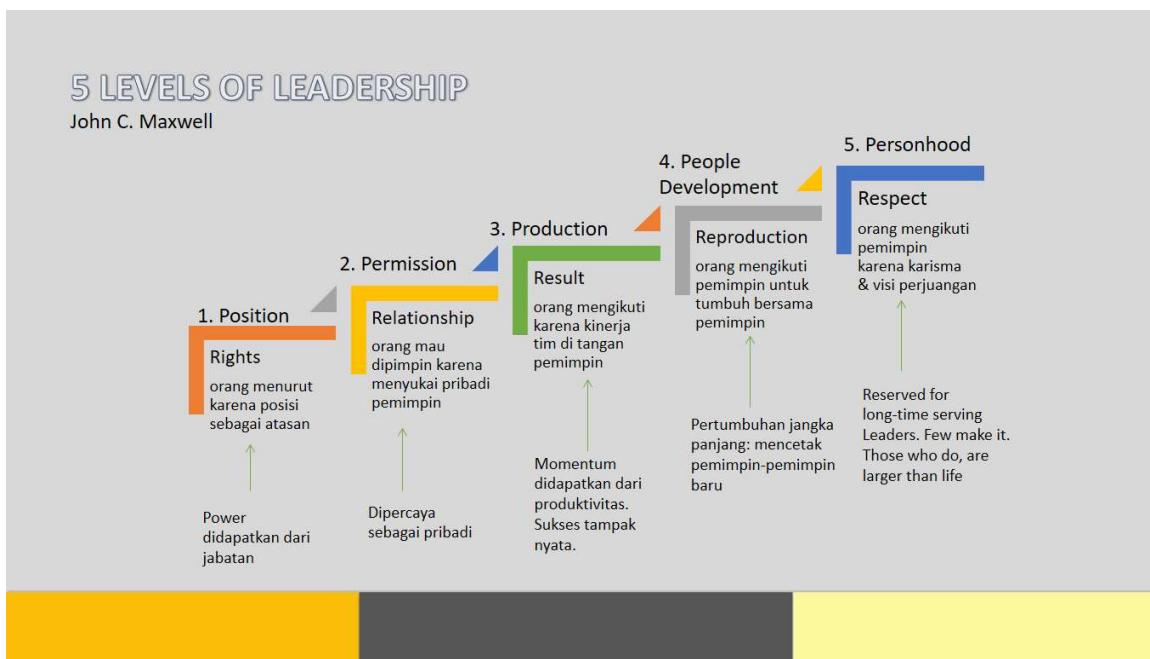
Film ini berkisah tentang kepeloporan. Seorang anak kecil mengambil inisiatif memindahkan batang pohon besar yang roboh dan melintang di tengah jalan saat hujan deras hingga membuat jalanan macet. Kendaraan terjebak dalam kemacetan total. Di saat orang-orang lain merasa kesal karena kemacetan parah yang tidak bisa diurai, saling menyalahkan, atau memilih memutar jalan dan meninggalkan batang pohon tetap ada di sana, si anak kecil itu memutuskan turun dari kereta, membiarkan tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan mulai mendorong batang pohon yang jelas tenaganya tak mungkin mampu menggesernya seinci pun. Tapi, kepeloporan ini akhirnya menggerakkan banyak orang. Satu per satu orang turun dari kendaraannya untuk turut memindahkan batang pohon. Dan, akhirnya berhasil!

Dapat dilihat melalui link ini <https://www.youtube.com/watch?v=wblstQNEm3Y>

DRAF

Lampiran Materi

KEPEMIMPINAN



- Lima Tingkat Kepemimpinan dari John C. Maxwell, yang menekankan pada pemahaman bahwa :
 - setiap anak tangga kepemimpinan dilandasi oleh kemampuan di tingkat bawahnya.
 - setiap tingkat kepemimpinan memiliki prakondisi dan karakteristik yang berbeda
 - seorang pemimpin di setiap tingkat tidak dapat mempengaruhi seorang pemimpin pada tingkat di atasnya.
- Lima tingkat kepemimpinan tersebut adalah :
 - Kepemimpinan tingkat 1 : karena Posisi
 - Kepemimpinan tingkat 2 : karena Hubungan
 - Kepemimpinan tingkat 3 : karena Produktivitas
 - Kepemimpinan tingkat 4 : karena Pengembangan SDM
 - Kepemimpinan tingkat 5 : karena Karisma
- Seorang penggerak jejaring setidaknya perlu memiliki modal kepemimpinan di tingkat dua, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan publik dan dengan anggota jejaring.
- Pemimpin yang bertumpu pada hubungan mensyaratkan kredibilitas yang tinggi. Stephen Covey, Jr. mengembangkan konsep kredibilitas pribadi dengan rumus seperti gambar berikut :



Karakter ditambah kompetensi seorang pemimpin akan menghasilkan kredibilitas. Dari kredibilitas itulah orang akan memberikan penilaian. Dari penilaian, pengaruh akan didapat. Tinggi rendahnya pengaruh bergantung pada tinggi-rendahnya penilaian. Tinggi rendahnya penilaian bergantung pada tinggi rendahnya kredibilitas. Tinggi rendahnya kredibilitas bergantung pada tinggi rendahnya karakter dan kompetensi seseorang. Artinya kunci kredibilitas seorang pemimpin ada pada kompetensi dan karakter. Hal-hal yang terkait dengan karakter dan kompetensi ada pada gambar berikut:



BAB XIV **PRAKTIK MICRO TEACHING**

A. Pengantar

Salah satu tujuan pelatihan bagi para pelatih adalah bagaimana peserta memiliki kemampuan menjalankan langkah-langkah fasilitasi berdasarkan modul. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar pelatihan berhasil mencapai tujuan pelatihan. Sesi ini mengajak setiap peserta untuk mempraktikkan sebagian sesi-sesi dalam modul. Di sesi ini, peserta juga akan mendapatkan tanggapan balik dari peserta lain mulai dari substansi yang dibawakan, metode, dan kemampuan peserta mengelola forum.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Menguasai informasi dasar tentang modul
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan komunikasi, dan penguasaan forum.

C. Pokok Bahasan

- Informasi dasar modul
- Materi dan langkah-langkah fasilitasi
- Penguasaan komunikasi dan forum

D. Metode

- Praktik
- Presentasi
- Curah pendapat
- Tanggapan balik

E. Waktu

270 menit (6 jam pelatihan).

F. Bahan dan Peralatan

- LCD
- Komputer/Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringan internet

- Modul

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	20 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi. 2. Instruktur Nasional menjelaskan tentang ketentuan dan mekanisme Micro Training, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Micro-Training</i> dilakukan semua peserta, yang dibagi dalam tiga kelas • Setiap kelas akan dibagi ke dalam tiga tim. • Setiap tim akan memperagakan diri sebagai fasilitator untuk 1 materi pelatihan. • Waktu micro-training secara keseluruhan selama 4,5 jam dan setiap team akan mempraktikkan 1 materi pelatihan: @ 60 menit. • Tim lain yang tidak praktik akan memberikan tanggapan balik kepada <i>micro-trainer</i> pada lembar yang sudah disediakan dan beberapa pemberi tanggapan menyampaikannya di forum. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px;"> <p>Instruktur Nasional menampilkan bahan tayang <i>Micro Taining</i></p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instruktur Nasional membagi kelas dan tim sesuai dengan ketentuan. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px;"> <p>Contoh: Kelas 1 : Komitmen Kebangsaan (Ruang Utama) <ol style="list-style-type: none"> 1. Membongkar Asumsi, Membangun Perspektif 2. Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia (Urgensi Moderasi Beragama) 3. Analisis Sosial Dengan Perangkat Analisis Gunung Es Kelas 2 : Toleransi (Sambisari 1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai Universal dalam Agama 2. Konsep Moderasi Beragama Kemenag RI 3. Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Kemenag RI Kelas 3 : Anti-Kekerasan (Sambisari 2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Diri ASN Kemenag RI 2. Ekosistem Moderasi Beragama </p></div>

			<p>3. Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U</p>
			<p>4. Instruktur Nasional dan panitia membagikan lembar tanggapan. Lembar Tanggapan tersedia dalam Lampiran Materi</p>
2	250 menit	Praktik Micro Teaching	<p>1. Instruktur Nasional mempersilakan masing-masing tim menjalankan praktik <i>Micro Teaching</i></p> <p>2. Tim Instruktur Nasional berbagi tugas untuk mendampingi dan mencatat dinamika forum di masing-masing kelas</p>
3	165 menit	Refleksi dan Pendalamaman	<p>1. Instruktur Nasional mengajak peserta melakukan refleksi untuk <i>Micro Training</i> yang telah mereka lakukan dengan melalui kerja kelompok.</p> <p>2. Instruktur Nasional menyeiapkan 9 kertas plano sesuai materi dalam <i>Micro Training</i> dan meminta masing-masing peserta mengisi hasil refleksi tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut:</p> <p>3. Apa materi yang perlu diperjelas dalam <i>Micro Training</i>?</p> <p>4. Pertanyaan terkait materi, proses, atau pendekatan dalam <i>Micro Training</i>.</p> <p>5. Pertanyaan atau tanggapan terkait modul.</p> <p>6. Instruktur Nasional meminta peserta menuliskan pada kertas plano di tiga materi yang mereka sampaikan dalam <i>Micro Training</i>.</p> <p>7. Instruktur Nasional membacakan masing-masing hasil refleksi peserta dan meresponsnya.</p> <p>8. Instruktur Nasional mencatat poin-poin diskusi dan membacakannya kepada peserta</p> <p>9. Instruktur Nasional menutup sesi.</p>
4	15 menit	Penutup	Instruktur Nasional menyampaikan poin-poin sesi dan menutup sesi
	270 menit		

H. Lampiran Materi

1. Modul

I. Bahan Tayang

1. Ketentuan dan Mekanisme *Micro-Training*

DRAF

Lampiran I

LEMBAR TANGGAPAN MICRO-TRAINING PELATIHAN BAGI PARA PELATIH (TOT) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI

Nama Micro-Trainer : _____
Materi : _____

PETUNJUK

Berilah penilaian terhadap praktik micro-training yang dilakukan oleh peserta, dengan ketentuan:

Angka 5 = Sangat Baik

Angka 4 = Baik

Angka 3 = Cukup

Angka 2 = Tidak Baik

Angka 1 = Sangat Tidak Baik

No	Aspek Penilaian	Kualitas Penilaian				
Penguasaan Materi						
1	Penguasaan substansi materi	5	4	3	2	1
2	Materi disampaikan secara sistematis	5	4	3	2	1
3	Susbtansi materi bisa dicerna peserta	5	4	3	2	1
Penguasaan Teknik						
4	Penerapan teknik sudah sesuai	5	4	3	2	1
5	Menerapkan beragam teknik	5	4	3	2	1
Kemampuan Komunikasi						
6	Komunikasi jelas dan mudah dipahami	5	4	3	2	1
7	Menggunakan bahasa yang baik dan santun	5	4	3	2	1
Penguasaan Forum						
8	Mengawali dan mengakhiri forum dengan ceria dan menyenangkan	5	4	3	2	1
9	Melibatkan peserta secara partisipatoris dalam proses pelatihan	5	4	3	2	1

TOTAL NILAI :

Penilaian Kualitatif :

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

Pemberi Feedback,

BAB XV

REFLEKSI, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI

A. Pengantar

Sesi terakhir dalam pelatihan ini berisi refleksi dan evaluasi para peserta terhadap keseluruhan proses pelatihan. Peserta diajak merefleksikan perubahan paling dirasakan sebelum dan sesudah pelatihan dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Sesi ini mengajak pula peserta mengevaluasi keseluruhan proses pelatihan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan pelatihan penguatan Moderasi Beragama selanjutnya. Hasil refleksi dan evaluasi sangat berguna untuk melihat apakah tujuan pelatihan tercapai atau belum tercapai, sekaligus rencana-rencana setelah pelatihan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Mampu mengungkapkan perubahan paling penting yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.
2. Mampu merefleksikan hasil pelatihan dengan masalah kehidupan sosial keagamaan di masyarakat
3. Mampu menyusun rencana aksi penguatan Moderasi Beragama

C. Pokok Bahasan

- Refleksi diri
- Evaluasi pelatihan
- Rencana aksi

D. Metode

- Curah pendapat
- Uji pascapelatihan (*post test*).

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur nasional menjelaskan tujuan sesi, yaitu refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelatihan.
	30	<p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional mengajak peserta menuliskan Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu sebagai tindak-lanjut pelatihan. Instruktur Nasional membagikan dokumen Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu dan menjelaskan apa yang harus diisi
2	40 menit	<p>Refleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Instruktur Nasional meminta setiap peserta untuk menyampaikan satu-dua kata sebagai refleksi dengan panduan berikut: <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Selama mengikuti pelatihan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saya mendengar ... (satu-dua kata. Contoh: “keresahan”) Saya melihat ... (satu-dua kata. Contoh: “semangat perubahan”) Maka saya akan melakukan ... satu-dua kata. Contoh: penguatan “Moderasi Beragama”) </div>
3	10 menit	<p>Evaluasi</p> <p>Instruktur Nasional meminta peserta mengisi Lembar elektronik Evaluasi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Panitia dapat membuat lembar evaluasi melalui platform google form</p> </div>
4	5 menit	<p>Penutup</p> <p>Instruktur Nasional menutup sesi dengan memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada peserta dan panitia yang terlibat.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Setelah sesi Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi, peserta mengisi lembar post-test yang telah disediakan</p> </div>

H. Lampiran Materi

1. Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu
2. Lembar Evaluasi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama

DRAF

LAMPIRAN

KANVAS KERJA PURWA-RUPA INDIVIDU (INDIVIDUAL PROTOTYPE WORKING CANVAS)

Nama : _____

Utusan : _____

PROBLEM SISTEMATIS (SYSTEMIC PROBLEM): Apa masalah sistemik di lingkungan Anda yang akan Anda fokuskan terkait moderasi beragama?	MASALAH-MSALAH (MATTERS) Mengapa masalah itu penting bagi Anda? Apa yang mungkin akan terjadi jika Anda tidak melakukan apa-apa?	TITIK AKUNPUNTUR (ACCUPUNCTURE POINT) Apa poin akupunktur yang ingin Anda jelajahi dengan prototipe ini?
---	--	--

**PERTANYAAN BAGAIMANA KITA BISA
(HMW (HOW MIGHT WE) QUESTIONS)**

Apa pertanyaan "Bagaimana Kita Bisa" yang ingin Anda jelajahi dengan prototipe ini?

**PURWA-RUPA
(PROTOTYPE)**

Apa prototipe Anda? Bagaimana gambaran singkat eksperimen tersebut?

DRAF

TIM PURWA-RUPA (PROTOTYPE TEAM) Siapa yang bisa Anda ajak menjadi tim? Siapa orang yang berkomitmen di lingkungan Anda untuk mengeksplorasi kemungkinan transformasi ini dan peran serta tanggung jawab apa yang dibutuhkan?	MITRA (PARTNERS) Siapa pemangku kepentingan utama yang Anda perlukan untuk berkolaborasi mewujudkan prototipe ini?	SUMBER DAYA & DUKUNGAN (REOURCES & SUPPORT) Sumber daya & dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengimplementasikan prototipe Anda?
--	--	---

APA? BAGAIMANA? BAGAIMANA**(WHAT? HOW? WHEN?)**

Secara kasar, apa yang akan Anda lakukan dalam 1-3 bulan ke depan? Bagaimana rencana implementasinya?

LANGKAH AWAL-KONKRET**(BABY STEPS)**

Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan dalam 7 hari ke depan untuk memulai ini?

DRAFT

**WAWASAN DAN PEMBELAJARAN KUNCI
(KEY INSIGHTS & LEARNINGS)**

(Diisi sepanjang proses prototyping).

Apa temuan yang mengejutkan Anda dari proses ini? Apa yang menarik?
Pembelajaran apa yang Anda petik dari prototipe ini dalam konteks moderasi
beragama?

**NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP
(VALUES & PRINCIPLES)**

Apa nilai dan prinsip yang akan Anda gunakan dalam memandu prototipe Anda?

Nilai:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Prinsip:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DRAFT

BAB XVI

MENEGUHKAN KOMITMEN PENGERAK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

A. Pengantar

Pelatihan ini tidak hanya didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, tetapi juga membangun ikatan emosional dan dorong untuk melakukan sesuatu, yakni penggerak Moderasi Beragama. Seperti Jati Diri ASN yang ditekankan dalam pelatihan ini, peserta didorong untuk tidak hanya menjadikan gerakan Moderasi Beragama sebagai “panggilan kerja”, melainkan juga panggilan jiwa dan bagian dari panggilan keagamaan. Di sesi ini, peserta diajak merenungi dan merefleksikan bahwa mereka adalah bagian dari gerakan bersama dan memiliki kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta berkomitmen untuk menjadi fasilitator pelatihan Moderasi Beragama dan para penggerak Moderasi Beragama

C. Pokok Bahasan

- Refleksi diri
- Peneguhan komitmen

D. Metode

- Refleksi

E. Waktu

45 menit (1 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
2	15 menit	Pengantar

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional meminta setiap peserta dan instruktur nasional dan panitia membentuk lingkaran besar. 2. Instruktur Nasional meminta beberapa peserta merefleksikan apa yang mereka rasakan selama pelatihan ini.
3	25 menit	<p>Refleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Nasional mengajak peserta merenungkan kehadiran mereka di forum pelatihan dengan segala tantangan dan kendalanya. 2. Instruktur Nasional berusaha menyentuh emosi peserta melalui pentingnya kehadiran mereka dalam pelatihan ini dan kontribusi mereka selanjutnya dalam penguatan moderasi beragama.
4	5 menit	<p>Penutup</p> <p>Instruktur Nasional meminta peserta berdoa agar pelatihan ini mendapat berkah tuhan dan bangsa ini berhasil mengatasi tantangan yang ada.</p>
45 menit		

DRAFT

MODUL TAMBAHAN

BAB XVII MEMBANGUN GERAKAN: TIM DAN JARINGAN

A. Pengantar

Membangun jejaring pada dasarnya membangun kepercayaan. Karena sekutu apa pun sebuah jaringan yang terjalin tanpa kepercayaan, ia laksana sarang laba-laba, rapuh tak memiliki kekuatan apa-apa. Dari seluruh orang yang dikenal coba kita perhatikan, berapa yang kita yakin dan percaya pada mereka. Artinya, semakin dekat dan kenal dengan baik, maka semakin yakin dan percayalah kita pada seseorang. Sebaliknya, semakin tidak punya informasi, semakin kesulitan kita mempercayainya.

Sesi ini mengajak peserta untuk mengenali dasar-dasar dan karakter dari jejaring. Jejaring berbeda karakternya dengan lembaga atau organisasi sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Selain itu, peserta akan diajak untuk melatih kemampuannya dalam memetakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan analisis *stakeholder* dan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis *stakeholder* sehingga menghasilkan *stakeholder* dalam berbagai kategori. Dari pemetaan tersebut, peserta akan memahami bagaimana pendekatan yang harus dilakukan terhadap *stakeholder* di masing-masing kategori agar lebih efektif dan efisien dalam membangun jejaring.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami strategi membangun jejaring yang efektif untuk penguatan Moderasi Beragama.
2. Mampu membangun tim dan jaringan yang kuat untuk penguatan Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

1. Dasar dan karakteristik jejaring.
2. Analisis *stakeholder*.

D. Metode

- Presentasi
- Diskusi kelompok
- Praktik
- Bermain peran (*role play*)

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan).

F. Bahan dan Peralatan

- LCD
- Komputer/Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringa internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	15 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer membuka sesi dan melakukan <i>check in</i> dengan meminta peserta untuk menuliskan di kertas metaplan terkait mimpi mereka tentang perubahan yang dibayangkan. 2. Fasilitator/trainer meminta peserta menempelkan kertas metaplan di kertas plano yang sudah tersedia. 3. Fasilitator/trainer secara acak meminta beberapa peserta untuk menjelaskan secara singkat apa yang mereka tulis.
2	25 menit	<p>Batik Puzzle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer mengajak peserta melakukan aktivitas teka-teki batik. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam jejaring. Teka-teki Batik ini dilakukan dengan langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyusun potongan-potongan (<i>puzzle</i>) gambar batik yang sudah dibagikan satu per satu menjadi satu kesatuan. b. Setelah menjadi satu kesatuan gambar, kelompok menebak bentuk gambar tersebut. c. Kelompok yang pertama kali menyelesaikan tugas, dia adalah pemenangnya. 2. Fasilitator/trainer meminta pandangan dari kelompok pemenang dengan pertanyaan: “apa yang membuat kelompoknya berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat?” Sedang kepada kelompok yang kalah, fasilitator/trainer menanyakan: “apa yang membuat kelompok Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat?”

		<p>3. Fasilitator meminta pandangan dari peserta terkait aktivitas ini dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang mempersatukan kelompok? b. Apa yang mendorong orang untuk berkumpul dan berjejaring?
3	20 menit	<p>Paparan Materi dan Tanya-Jawab:</p> <p>Fasilitator/trainer menyampaikan presentasi terkait dasar-dasar dan karakter jejaring, serta analisis <i>stakeholder</i>, disertai tanya-jawab.</p> <p>Catatan. Fasilitator/trainer menayangkan presentasi gambar Analisis Stakeholder dan How to Engage Stakeholder pada Lampiran Materi.</p>
4	30 menit	<p>Diskusi kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer membagi peserta menjadi empat kelompok untuk mendiskusikan tentang <i>stakeholder</i> dengan panduan pertanyaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Siapa saja <i>stakeholder</i>-nya? b. Apa potensi yang dimilikinya? c. Apa yang bisa disumbangkan untuk jejaring? d. Apa yang mungkin menghambatnya? e. Apa kerugiannya ikut jejaring? f. Apa keuntungannya ikut jejaring? 2. Fasilitator/trainer meminta masing-masing kelompok memetakan <i>stakeholder</i> menggunakan matrik analisis <i>stakeholder</i>.
5	30 menit	<p>Presentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya dan meminta peserta lain untuk menanggapinya.
6	15 menit	<p>Penutup</p> <p>Fasilitator mengulas hasil diskusi dan menutup sesi</p>

H. Lampiran Materi

1. Materi Dasar dan Karakteristik Jejaring

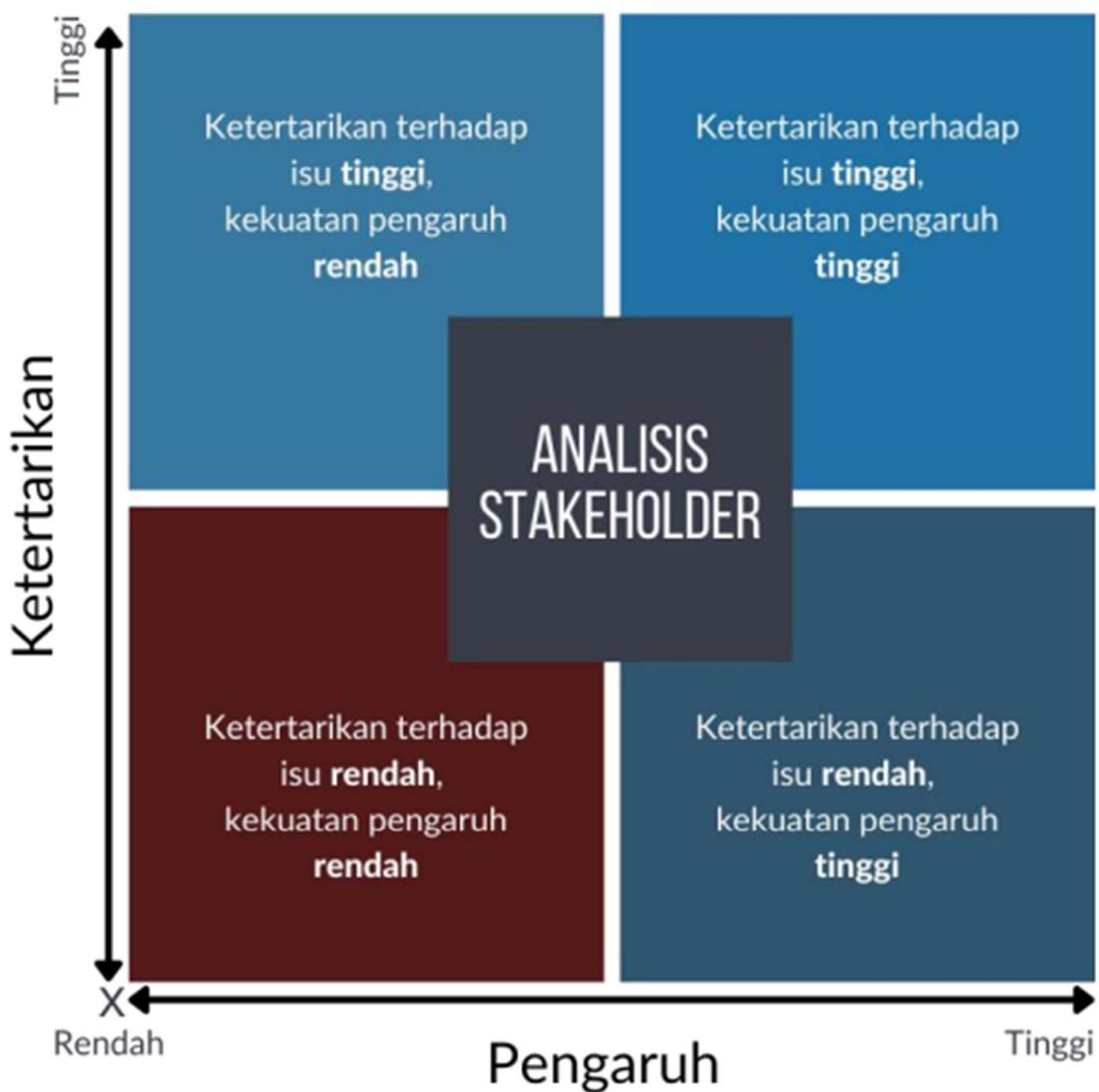
DRAF

Lampiran Materi

MATERI DASAR DAN KARAKTERISTIK JEJARING

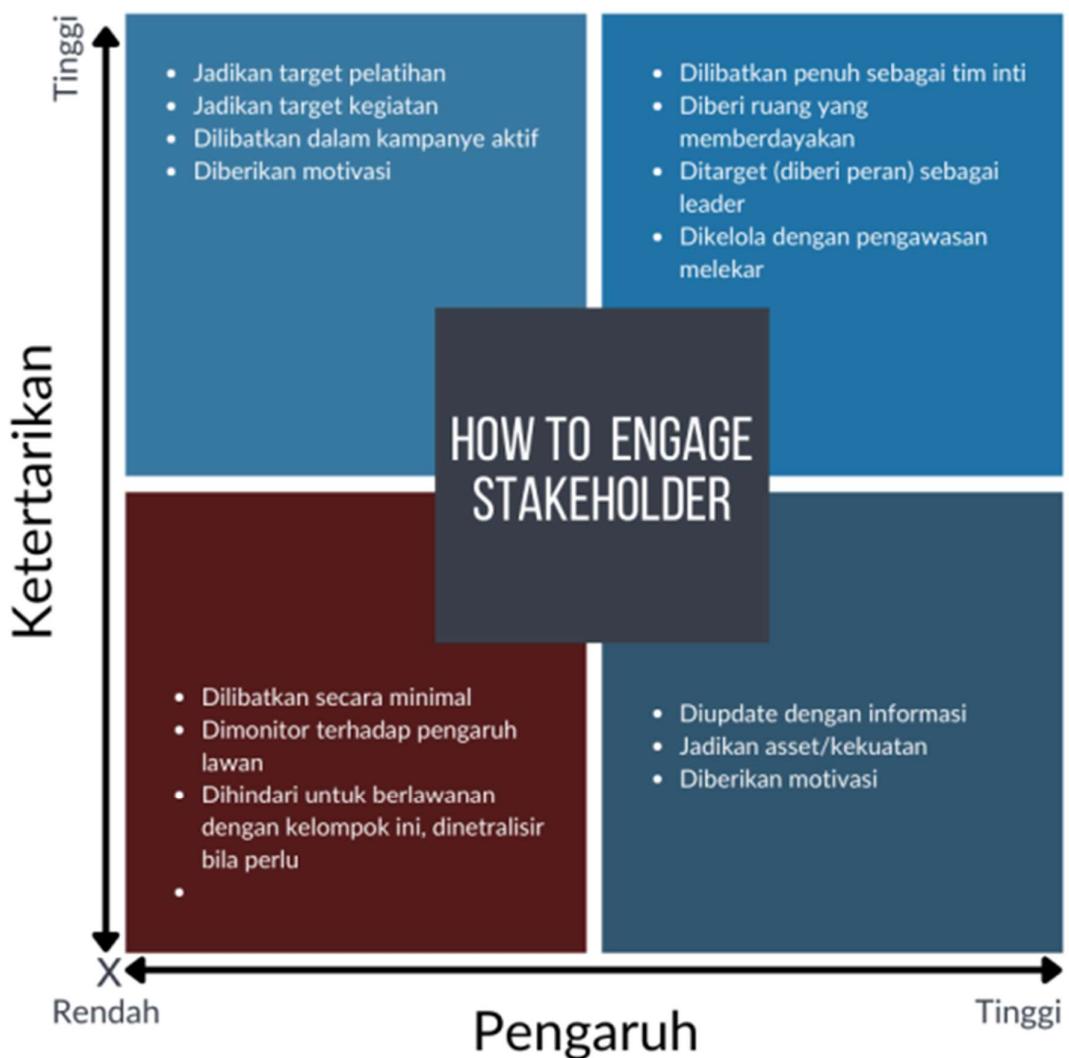
- Jejaring adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama secara lebih erat dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama.
 - Pengikat utama : kesamaan isu, nilai, atau minat
 - Anggota bukanlah bawahan, karena itu harus mampu menjawab pertanyaan “apa manfaatnya jejaring ini untuk saya?”
- Sangat bersifat *leadership-driven* (bergantung kepada kepemimpinan yang ada), yang menimbulkan tantangan khas yaitu terjebak pada pemimpin sehingga hilang nyawa saat ditinggal inisiator/pemimpin
- Sifat keterlibatan yang tidak dapat dipaksakan:
 - Jejaring bukan prioritas utama, komitmen bersifat tidak penuh
 - Anggota tidak bisa diikat dengan kewajiban, tetapi oleh apa yang ia dapat dari komunitas tersebut: gagasan/keluarga/aktualisasi diri.
 - Anggota cenderung datang dan pergi tanpa kejelasan komitmen, apabila tidak dibangun sistem keanggotaan yang optimal.
 - Sangat dinamis, karena kepentingan dan cara pandang anggota jejaring yang berbeda-beda.
 - Yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerja: tema yang dipilih, tujuan, nilai bersama, program, manajemen, dan *leadership*.
- Secara umum, jejaring kerja menunjukkan karakteristik sebagai berikut :
 - Jejaring kerja dibentuk oleh lembaga/kelompok atau anggota masyarakat yang punya minat atau tujuan yang sama terhadap sebuah isu/topik.
 - Jejaring kerja dibentuk karena kesadaran bahwa topik/isu tidak bisa dikelola sendiri dan ada keberagaman stakeholders dengan kekuatan yang berbeda-beda.
 - Jejaring kerja adalah pengorganisasian yang bersifat cair karena tidak ada keterikatan legal atau profesional
 - Jejaring kerja difungsikan sebagai ruang kolaborasi (kerja sama) antar stakeholders. Semakin banyak unsur yang terlibat, semakin kuat pengaruh jejaring tersebut dalam masyarakat.
 - Karena stakeholders cukup banyak, maka jejaring kerja bersifat dinamis. Anggota bisa datang dan pergi tanpa ada konsekuensi formal. Tarik-menarik antar kepentingan juga lebih sering terjadi.

ANALISIS STAKEHOLDER



- Stakeholder adalah orang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai pengaruh dan ketertarikan terhadap apa yang kita lakukan.
- Analisis stakeholder adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan memetakan orang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai pengaruh dan ketertarikan terhadap apa yang kita lakukan dengan menggunakan matrik stakeholder. Dengan matrik tersebut, kita bisa mengetahui empat kategori stakeholder:
 - Stakeholder I adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan tinggi tapi pengaruh yang dipunyai rendah.
 - Stakeholder II adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan tinggi juga pengaruh yang dipunyai tinggi.
 - Stakeholder III adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan rendah juga pengaruh yang dipunyai rendah.

- Stakeholder IV adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan rendah tapi pengaruh yang dipunyai tinggi.



- Tujuan dari analisis stakeholder adalah untuk mengetahui target prioritas dari agenda yang kita lakukan sehingga bisa lebih efektif. Selain itu, untuk menentukan pendekatan pendekatan apa yang harus kita lakukan di masing-masing kategori stakeholder agar tidak salah pendekatan yang menyebabkan agenda kita tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
- Empat kategori stakeholder dari hasil matrik memudahkan kita untuk melakukan pendekatan dan menentukan target prioritas dalam membangun hubungan dengan stakeholder tersebut. Pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan di masing-masing kategori stakeholder sangat menentukan keberhasilan sebuah agenda.
 - Stakeholder I, merupakan stakeholder yang berpotensi untuk menambah amunisi tim namun membutuhkan upaya meningkatkan kapasitas untuk memperbesar pengaruhnya. Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:

- Jadikan mereka sebagai target pelatihan dan kegiatan.
 - Libatkan mereka dalam kampanye secara aktif.
 - Berikan mereka motivasi untuk menjaga ketertarikan tetap tinggi
- Stakeholder II, merupakan *stakeholder* yang menjadi target utama sehingga perlu diberi ruang pelibatan secara penuh dalam tim.
Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:
 - Libatkan mereka secara penuh sebagai tim inti.
 - Berikan ruang yang memberdayakan kapasitas dan minat mereka.
 - Berikan ruang atau ditarget untuk menjadi *leader*.
 - Kelola secara pengawasan melekat agar mereka tetap menjadi bagian dari tim kita.
- Stakeholder III, merupakan *stakeholder* yang tidak menjadi target utama sehingga tidak diperlukan upaya khusus tetapi perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kelompok ini menentang atau menjadi lawan kita.
Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:
 - Libatkan mereka secara minimal.
 - Monitor mereka dari pengaruh lawan.
 - Hindari melakukan hal yang berlawanan dengan mereka.
- Stakeholder IV, merupakan *stakeholder* yang perlu kita waspadai karena mempunyai pengaruh yang tinggi. Dibutuhkan upaya khusus agar kelompok ini bisa tertarik dengan kita, minimal tidak menentang atau menjadi lawan kita.
 - Perbaharui mereka terkait informasi tentang apa yang sedang kita lakukan.
 - Jadikan mereka aset kekuatan karena punya pengaruh yang tinggi.
 - Berikan mereka motivasi dan urgensi dari isu yang sedang berkembang agar menambah ketertarikan terhadap apa yang sedang kita lakukan.

BAB XVIII

MEMBANGUN GERAKAN : BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK²¹

A. Pengantar

Terciptanya praktik Moderasi Beragama membutuhkan serangkaian upaya terencana membangun perdamaian, pencegahan, dan penanganan konflik. Langkah ini mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia dan aktor-aktor yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam membangun perdamaian dan nilai-nilai moderasi, namun juga kemampuan mencegah dan menangani konflik-konflik keagamaan.

Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam bina damai dan resolusi konflik. Setelah mengikuti sesi ini, peserta memiliki pengetahuan tentang kemampuan praktis mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah menyasar sumber-sumber konflik keagamaan; tips-tips praktis mencegah dan menangani konflik keagamaan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam bina damai dan resolusi konflik untuk memperkuat Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

- Bina damai
- Resolusi konflik

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Studi kasus

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan).

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop

²¹ Sesi ini bisa disampaikan oleh narasumber atau ahli di luar tim fasilitator/trainer.

- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	5 menit	<p>Pengantar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer membuka kelas dan menjelaskan tujuan sesi, yaitu memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam bina damai dan resolusi konflik untuk memperkuat Moderasi Beragama. 2. Fasilitator/trainer mengaitkan materi dalam sesi ini dengan materi-materi sebelumnya 3. Fasilitator/trainer memperkenalkan nara sumber dan materi pokok yang akan disampaikan.
2	30 menit	<p>Pemaparan Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber menyampaikan materi dengan kisi-kisi berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep bina damai dan resolusi konflik. b. Kapasitas minimal dalam bina damai dan resolusi konflik. c. Tips praktis bina damai dan resolusi konflik. d. Contoh kasus bina damai dan resolusi konflik terkait isu-isu keagamaan berdasarkan pengalaman narasumber.
3	45 menit	<p>Tanya-Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer mempersilakan peserta bertanya atau menanggapi presentasi narasumber. 2. Narasumber menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta.
4	50 menit	<p>Berbagi pengalaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer mengajak beberapa peserta berbagi cerita secara singkat pengalaman dalam mengatasi kasus-kasus konflik keagamaan. 2. Fasilitator/trainer meminta narasumber menanggapi pengalaman tersebut. 3. Narasumber menanggapi penjelasan tentang pengalaman peserta dengan memberi langkah-langkah alternatif yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah.

		<p>Jika sesi dilakukan bukan dengan menghadirkan narasumber, fasilitator/trainer melakukan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator/trainer menjelaskan konsep-konsep kunci bina dan resolusi konflik dan kapasitas minimal yang perlu dimiliki. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>Catatan. Fasilitator/trainer dapat menayangkan gambar Lengkungan Konflik dan menjelaskan istilah-istilah kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik pada Lampiran Materi.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator/trainer membagi peserta ke dalam tiga kelompok. 3. Fasilitator/trainer meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan pengalaman peserta dalam merespons atau mengatasi kasus-kasus konflik sosial-keagamaan, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsikan secara singkat kasus yang dipilih dalam diskusi kelompok (kasus, aktor yang terlibat, dan korban). b. Langkah-langkah apa yang ditempuh dalam merespons atau mengatasi kasus tersebut? c. Apa hasil dari langkah-langkah tersebut? Jika berhasil, mengapa? Jika gagal, mengapa? 4. Fasilitator/trainer meminta perwakilan peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 5. Fasilitator/trainer meminta tanggapan dari peserta di luar kelompok. 6. Fasilitator/trainer merangkum dan menggarisbawahi hasil diskusi kelompok dan menutup sesi. <p>Catatan. Langkah-langkah fasilitasi ini memiliki alokasi waktu 125 menit</p>
5	5 menit	<p>Penutup</p> <p>Fasilitator/trainer menyampaikan kembali poin-poin penting materi dan diskusi serta menutup sesi.</p>

H. Lampiran Materi

1. Istilah-Istilah Kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik
2. Kurva Konflik
3. Kompetensi Respons Dini dan Resolusi Konflik

DRAF

Lampiran Materi 1

Istilah-Istilah Kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik

Bina Damai: serangkaian usaha terencana dan komprehensif oleh berbagai pihak, dari individu, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan dengan cara-cara non-kekerasan. Bina dapat mencakup pencegahan konflik; manajemen konflik; resolusi konflik dan transformasi, dan rekonsiliasi pasca konflik.²²

Resolusi Konflik: serangkaian usaha menangani dan mengatasi sumber-sumber konflik dengan metodologi tertentu untuk mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah menyangsar sumber-sumber konflik.

Konflik Sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (UU No. 7 Tahun 2012).

Penanganan Konflik: serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik (UU No. 7 Tahun 2012).

Pencegahan Konflik: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (UU No. 7 Tahun 2012).

Penghentian Konflik: serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda (UU No. 7 Tahun 2012).

Pemulihan Pascakonflik: serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UU No. 7 Tahun 2012).

Respons Dini Konflik Keagamaan: tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya penyelesaian damai atas pertikaian yang terjadi menyangkut isu keagamaan tertentu serta mencegah pertikaian tersebut

²² USIP, "What is Strategic Peacebuilding?," www.usip.org, 2021 <<https://www.usip.org>/about-us/what-is-peace-studies/what-is-strategic-peacebuilding/ > [diakses 1 Oktober 2021].

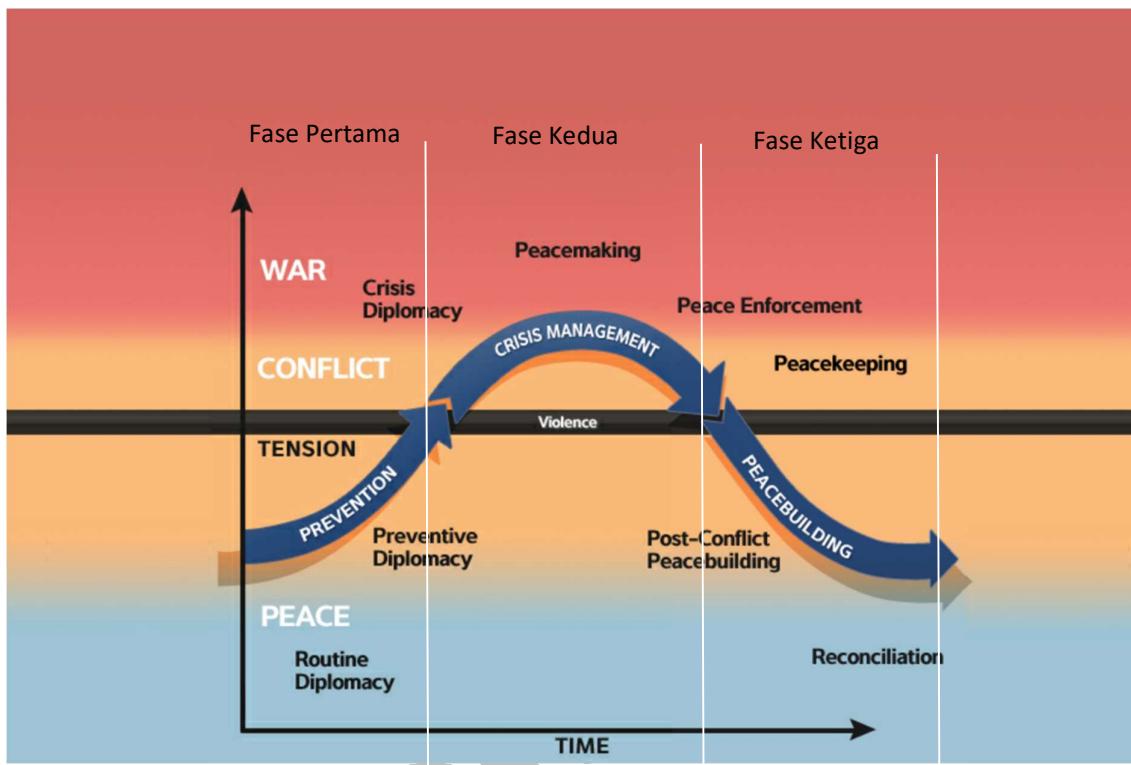
mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan.²³

DRAFT

²³ Rudy Harisyah Alam, *Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan* (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta; 2019)

Lampiran Materi 2

Lengkungan Konflik²⁴



- Konflik keagamaan, termasuk dalam bentuk kekerasan, tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok yang diduga sesat biasanya terjadi setelah terjadi serangkaian ujaran kebencian terhadap mereka dan aparat belum melakukan usaha maksimal untuk merespons ujaran kebencian. Konflik dapat dikenali melalui gejala dan pola-pola tertentu. Pengenalan, dan sebaliknya, pengabaian atas gejala-gejalanya akan mempengaruhi keberhasilan mencegah dan mengatasi konflik.
- Pola konflik dapat dilihat dalam tiga pola seperti terlihat dalam gambar di atas:
 - **Fase pertama**, memperlihat situasi eskalasi dari perdamaian yang stabil menjadi permusuhan yang meningkat, ketegangan yang meningkat, dan dapat berakhir dengan pecahnya kekerasan
 - **Fase kedua**, menunjukkan situasi konflik kekerasan yang memuncak dan kemudian mulai mereda
 - **Fase ketiga**, menampilkan situasi di mana terjadi de-eskalasi atau menurunnya konflik.
- Memahami di mana tahap konflik terjadi dalam siklus konflik sangat penting untuk mengembangkan strategi mana yang efektif untuk

²⁴ Dikembangkan dari USIP, "Curve of Conflict," www.usip.org, 2021
<<https://www.usip.org/public-education/students/curve-conflict>> [diakses 1 Oktober 2021].

mencegah atau mengatasi konflik. Misalnya, deteksi dini efektif dilakukan pada fase pertama ketika ketegangan mulai terjadi. Usaha ini belum tentu efektif ketika konflik telah meledak dalam bentuk kekerasan.

DRAF

Lampiran Materi 3

Kompetensi Respons Dini dan Resolusi Konflik

Sembilan Kompetensi dalam menjalankan respons dini konflik:²⁵

1. Memahami berbagai peraturan yang mengatur soal kehidupan beragama
2. Peka terhadap situasi konflik
3. Bertindak cepat merespons ketika mengetahui/menerima informasi tentang gelagat konflik
4. Menggali permasalahan yang terjadi dari para pihak yang berkonflik
5. Menempatkan diri pada posisi di tengah dan tidak memihak (imparsial) salah satu pihak yang berkonflik
6. Berusaha untuk tidak melakukan yang akan memperburuk situasi konflik
7. Selalu mengecek dan memvalidasi kebenaran informasi yang diterima
8. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
9. Menguasai teknik negosiasi dan mediasi

- Untuk memperkuat kompetensi **menjalankan respons dini dan resolusi konflik**, para aktor tidak hanya memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di tingkat lokal dan nasional, tapi juga berbagai instrumen internasional terkait.

Pada Pelatihan Fasilitator Moderasi Beragama bagi Pimpinan Angkatan V, 10-14 September 2021 di Semarang Jawa Tengah, Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam, mendorong para peserta yang umumnya para Kepala Kantor Kementerian Agama di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat, memahami Rabat *Plan of Action* dalam merespons dan menangani kasus-kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia. Anam menyebutkan, dokumen ini digunakan Komnas HAM dalam menangani para pelaku ujaran kebencian dan tindakan perusakan masjid JAI di Sintang Kalimantan Barat.

Rabat *Plan of Action* merupakan dokumen yang dikeluarkan Komisi Tinggi HAM PBB pada 2013. Dokumen ini dihasilkan dari empat workshop ahli di empat wilayah regional pada 2011 dan diadopsi para ahli dalam pertemuan di Rabat Maroko, 5 Oktober 2012. Dokumen Rabat ini menyebut jika kasus-kasus kebencian dan sinisme yang terjadi di masyarakat bahkan telah mengarah pada aksi-aksi kekerasan dan menimbulkan korban nyawa. Dokumen Rabat menjelaskan bagaimana seharusnya memidanakan siar kebencian dengan tanpa melanggar hak dasar lainnya.

²⁵ Rudy Harisyah Alam, *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik* (Jakarta: Litbang dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2020).

Rabat Plan of Action mengemukakan enam uji ambang rangsangan untuk melihat sebuah pernyataan dapat dianggap sebagai pelanggaran kriminal atau tidak:²⁶

1. Konteks.

Konteks amatlah penting ketika menilai apakah suatu pernyataan tertentu sangat mungkin menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dituju, dan mengandung sikap langsung baik dalam hal maksud dan/atau sebab.

2. Pengajar

Posisi atau status dari pengajar di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya kedudukan individual atau organisasi tersebut dalam konteks pihak penerima kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan

3. Maksud

Kelalaian dan keteledoran tidak cukup untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai pelanggaran, karena mengharuskan adanya “imbauan” dan “hasutan” ketimbang distribusi atau sirkulasi materi semata.

4. Isi dan bentuk

Analisis isi ujaran kebencian dapat mencakup sejauh mana tingkatan ujaran tersebut disebut provokatif dan langsung; menganalisis bentuk, gaya, dan dasar argumen yang dilontarkan dalam ujaran.

5. Batasan ujaran

Batasan termasuk unsur-unsur seperti jangkauan ujaran tersebut, apakah ujarannya bersifat publik, skala dan ukuran pendengarnya. Unsur-unsur lain untuk dipertimbangkan antara lain bagaimana cara penyebarannya, misalnya apakah dari sebuah selebaran atau disiarkan di media arus utama atau melalui Internet, frekuensi, kuantitas dan cakupan komunikasinya.

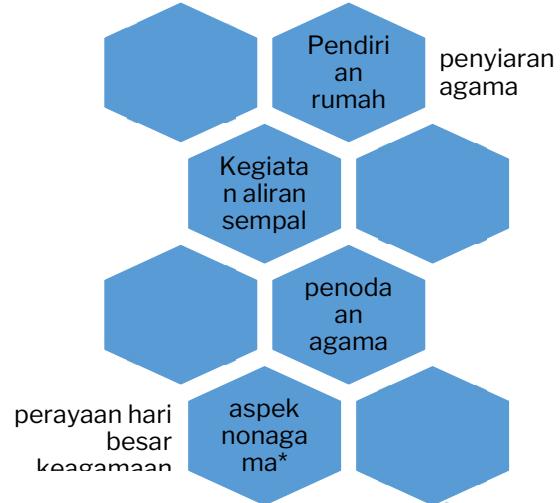
6. Kemungkinan, termasuk kecenderungan tinggi.

Tindakan yang dianjurkan oleh hasutan tidak harus dilakukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan. Meskipun demikian, risiko terjadinya kerugian pada tahap tertentu perlu diidentifikasi sejauh mana hasutan tersebut dapat memicu tindakan nyata terhadap kelompok target.

²⁶ Versi ringkasan dan penyederhanaan. Versi lengkap dapat dibaca dalam OHCHR “Jabaran satu halaman tentang ‘hasutan kebencian’

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Indonesian.pdf (diakses 5 Oktober 2021)

- **Peka terhadap situasi konflik** dapat diasah dengan kemampuan memahami isu-isu yang biasanya menjadi penyebab konflik keagamaan di Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain:²⁷



*Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain: kepadatan penduduk, kesenjangan sosial-ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan keagamaan.

²⁷ Rudy Harisyah Alam, *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik ...*

REFERENSI

- Abdullah, Irwan. "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13.
- Alam, Rudy Harisyah. *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik*. Jakarta: Litbang dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2020.
- Alam, Rudy Harisyah. *Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan* (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta; 2019).
- Anwar, M. Syafi'i, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid," dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, xix-xxii. Jakarta: Wahid Institute, 2006.
- B. Singh, "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68.
- Berita Satu, "Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah," www.beritasatu.com, 2017,
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/414934/survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriah>.
- BBC, "Survei: hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal," www.bbc.com, 2011, diakses 26 Oktober 2021
- Fenton, A. dan D. Price. "ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks," *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26.
- Galamas F. "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215.
- Hakim Saifuddin, Lukman. "Prolog," *Moderasi Beragama*, 2-3. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Infid dan Gusdurian, "Laporan Mapping Internet dan Sosial Media" (Jakarta, 2016).
- Intan, B.F. *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang, 2006.
- Irawan, I.A., "Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018," kumparan.com 17 Mei 2018, diakses 26 Oktober 2021.
<https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018> (Diakses 7 Juni 2019).
- K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003);
- Kelompok Kerja Moderasi Beragama. *Peta Jalan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag, 2021.
- Kemenag. "Sekilas Tentang Kementerian Agama" 25 Maret 2021, diakses 26 Oktober 2021 <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>
- Klinken, Gary van. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London; New York: Routledge, 2007.

- Kompas, "Toleransi Jadi Tantangan," 2012, diakses 26 Oktober 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/03234293/toleransi.jadi.tantangan?page=all>.
- Madjid, Nurcholish. "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994).
- Magouirk J., S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16.
- Mas'udi, Farid Masdar. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010.
- Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Oak, G.S. "Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.
- OHCHR "Jabaran satu halaman tentang 'hasutan kebencian,'" diakses 5 Oktober 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Indonesian.pdf
- PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018.
- Ramage ,D.E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance*. London; New York: Routledge, 2002.
- Rizal Sukma, "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution", dalam Kusuma Snitwongse dan W. Scott Thompson (eds.), *Ethnic Conflict in Southeast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), 1.
- Steenbrink, K.A. "The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions," *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998).
- Subhan, M. "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.
- Sukma Rizal, J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, "The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?," *Journal of Human Security*, Vol. 7, No. 1 (2001).
- Suparlan, Parsudi. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan?," *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003).
- Suratman Y.P. "The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156.
- Sundoko, H.F., R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo. "Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia," in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* (Singapore: Springer, 2018), 33-56.
- W. Hefner, Robert. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.

West B. "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353.

Zora, A.S. "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

DRAF

LAMPIRAN

LAMPIRAN MATERI 1 | LEMBAR EVALUASI PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Nama:

Email :

Tanggal pelatihan:

Instansi:

1. Setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang berubah dari pengetahuan (knowledge) Anda?
2. Setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang berubah dari sikap (attitude) Anda?
3. Setelah mengikuti Pelatihan ini, apa yang berubah dari keterampilan (skills) Anda?
4. Materi dan kurikulum pelatihan ini dengan kebutuhan tempat Anda bekerja:
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak sesuai
 - e. Sangat tidak sesuai
5. Materi yang menurut Anda paling menarik adalah ...
6. Materi yang paling kurang penting adalah ...
7. Materi yang paling kurang menarik adalah ...
8. Materi yang perlu ditambahkan adalah ...

LAMPIRAN 2 |

LEMBAR UJI PRA DAN PASCAPELATIHAN (PRE AND POST-TEST) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Penguatan Moderasi Beragama ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam Peta Jalan yang disusun Kementerian Agama menetapkan salah satu strategi mencapai tujuan penguatan moderasi beragama adalah dengan memberikan pelatihan kepada ASN Kementerian Agama RI.

Pelatihan Bagi Para Pelatih Penguatan Moderasi Beragama ini menjadi bagian dari implementasi program tersebut. Dalam pelatihan ini, setiap peserta akan diminta untuk mengikuti uji pra dan pascapelatihan.

Silakan Anda mengisi formulir di bawah ini dengan sebenar-benarnya. Lembar Uji ini bukan bagian dari penilaian terhadap kompetensi atau kinerja.

Nama : _____

Email : _____

Unit Kerja : _____

Jabatan : _____

Usia : _____ tahun

Moderasi Beragama:

1. Tuliskan Moderasi Beragama yang Anda pahami:

2. Tuliskan ekstremisme beragama yang Anda pahami:

3. Sebutkan indikator-indikator Moderasi Beragama yang Anda tahu:

4. Sebutkan nilai-nilai dalam Moderasi Beragama yang Anda tahu:

5. Pancasila sebagai dasar negara, menurut saya:

- a. masih dapat diubah bila dikehendaki mayoritas warga negara.
- b. sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran agama tetapi saya terima sebagai kesepakatan berbangsa.
- c. karena ada janji sejarah, masih harus memperjuangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta.
- d. tidak dapat diubah sama sekali, kecuali dilakukan referendum.
- e. bagi saya sudah final dan tidak bertentangan dengan ajaran agama saya.

6. Tidak setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar:

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

7. Pandangan kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif agama:

- a. Semua umat beragama setara, namun sebagai mayoritas umat beragama seharusnya memiliki hak khusus

- b. Umat beragama tidak setara. Umat beragama menurut agamanya adalah paling mulia. Oleh karena itu, Perda berbasis agama di Indonesia diperlukan untuk menjamin kepentingan agamanya.
- c. Kewajiban kita di Indonesia adalah menjaga umat agamanya agar tidak dimanipulasi oleh umat agama lain.
- d. Umat beragama memiliki prioritas berdasarkan jumlahnya, mayoritas atau minoritas.
- f. Semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia
8. Ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari presiden hingga kepala desa di Indonesia:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
9. Umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
10. Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
11. Dalam pandangan keagamaan saya yang murni, toleransi dan membantu agama lain tidak diperbolehkan, karena berarti menyetujuinya:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju

12. Dalam pandangan keagamaan saya, negara berdasar agama seharusnya diterapkan untuk Indonesia karena bangsa Indonesia sejak dulu sangat religius:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
13. Pemerintah Indonesia adalah bukan aparat keagamaan yang otoritatif, karena itu dalam pandangan keagamaan saya tidak wajib ditaati:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
14. "Setiap umat beragama wajib memperjuangkan ajaran agamanya untuk menjadi ideologi negara. Jika tidak, maka dia bukan umat beragama yang loyal terhadap agamanya."
- adalah doktrin yang harus kita ikuti, tetapi tidak boleh terlalu menampakkannya di Indonesia.
 - adalah doktrin yang harus kita ikuti, umat beragama tidak boleh memberi ruang kepada umat agama lain di Indonesia.
 - penting untuk diamalkan oleh setiap umat agama di Indonesia, karena pada dasarnya suatu umat agama akan selalu tidak menyukai umat agama lain.
 - Doktrin ini benar dan penting untuk Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Ini bukan pandangan yang tepat untuk hubungan antar umat beragama di Indonesia
15. Jika ada peluang demokrasi seperti referendum untuk memilih suatu bentuk negara Indonesia, maka saya tentu akan memilih negara berdasar agama sebagai panggilan keimanan saya:
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
16. Beragama seharusnya berbasis pada tradisi masyarakat di mana agama pertama lahir, tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu

- d. Tidak setuju
 - b. Sangat tidak setuju
17. Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama.
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

Kemenag dan Penguatan Moderasi Beragama

18. Sebutkan alasan mengapa Pemerintah membuat program Penguatan Moderasi Beragama

19. Bila terjadi dinamika kehidupan keberagamaan di lingkungan Anda, apa peran yang akan Anda ambil?

20. Jika banyak warga negara yang tidak moderat dalam beragama, maka itu bukan tanggungjawab Kementerian Agama.
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak setuju
 - b. Sangat tidak setuju

21. Sebagai ASN, setiap pegawai Kemenag tidak wajib melayani semua agama dan umat beragama. Yang wajib adalah umat agama masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
22. Melindungi dan melayani semua agama dan umat beragama dalam pemerintahan Indonesia adalah bukan bagian dari kewajiban agama saya.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
23. Jika ada pertentangan antara “pendapat keagamaan” dari suatu organisasi keagamaan dengan “undang-undang”, maka tentu saya akan mengikuti “pendapat keagamaan” karena bernilai spiritualitas dan transendental.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
24. Jika ada masyarakat yang berperilaku tidak moderat, tidak toleran, dan melakukan kekerasan, maka sikap saya sebagai ASN adalah:
- Melaporkan kepada Kepolisian bila terindikasi pidana, dan ke Densus 88 bila itu terindikasi terorisme.
 - Menunggu diajak koordinasi oleh pihak berwajib, karena bukan tugas dan fungsi saya.
 - Jika masih dalam perbedaan hukum agama, saya menghargai sebagai keragaman dalam beragama.
 - Memaklumi karena pergolakan politik yang tak terhindarkan dalam demokrasi liberal.
 - Ikut terlibat aktif menyelesaikannya sesuai dengan tugas dan fungsi saya.
25. Sebutkan alasan paling penting mengapa Anda sebagai ASN perlu memastikan moderasi beragama terwujud di ruang lingkup masyarakat Anda:
- Karena saya harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan.
 - Karena kondisi masyarakat yang memanggil untuk melakukannya.
 - Karena ini sudah menjadi kebijakan nasional Pemerintah Indonesia.

- d. Sebagai umat beragama, ini adalah kewajiban saya yang harus saya lakukan.
- f. Sudah menjadi tugas dan kewajiban saya.

DRAF